AHMADIYAH DAN KEINDONESIAAN KITA

Penulis Tamu:
Hasibullah Sastrawi

Editor:
Ismail Hasani
Bonar Tigor Naipospos

Pustaka Masyarakat Setara

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd i 11/1/2011 5:37:34 AM

AHMADIYAH DAN KEINDONESIAAN KITA
Pustaka Masyarakat Setara-Jakarta, September 2011
155 mm x 230 mm
vi+196 halaman
ISBN: 978-602-99042-3-9

PENYUSUN Tim SETARA Institute
PENULIS TAMU Hasibullah Sastrawi
EDITOR Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos
TATA LETAK Titikoma-Jakarta (021-95254570)
PENERBIT Pustaka Masyarakat Setara

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd ii 11/1/2011 5:37:56 AM

Pengantar

Ragam wajah diskriminasi yang menimpa kelompok-kelompok minoritas di Indonesia semakin hari bukannya semakin berkurang tapi justru menunjukkan eskalasi yang serius. Fakta-fakta intoleransi telah dipotret oleh banyak institusi dan sebagian diantaranya diakui oleh pemerintah. Diskriminasi bukan hanya dilakukan oleh aktor-aktor non negara yang berujung pada kekerasan, tapi juga dilegitimasi oleh negara melalui produk-produk hukum yang diskriminatif dan dengan membiarkan setiap kekerasan yang menimpa kelompok-kelompok minoritas nyaris tidak terhukum.

Pada 6 Februari 2011 lalu, di Cikeusik, Pandeglang, Banten, terjadi peristiwa yang paling serius menyasar pengikut Ahmadiyah. Komunitas keagamaan yang dalam beberapa tahun terakhir paling sering mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleranyangberakibatkan kematian sadis ini tidak mendapat penanganan hukum serius aparat penegak hukum. Suara yang mengklaim sebagai representasi publik tampaknya cukup efektif menekan aparat penegak hukum untuk berlaku tidak adil. Padahal apa yang disebut dengan "representasi suara publik" tidaklah otentik sebagai suara publik yang sesungguhnya, karena *silent mayority* justru bersikap berbeda dari kelompok-kelompok intoleran yang selama ini melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Ini terbukti dari dari temuan di lapangan melalui survei opini publik yang dipaparkan dalam buku ini. Meskipun

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd iii 11/1/2011 5:37:56 AM

ajarankeagamaan Ahmadiyah dalam pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah berbeda dengan keyakinan mereka tetapi mereka bisa menerima keberadaan komunitas Ahmadiyah sebagai sesama warga negara.

Terbitan Pustaka Masyarakat Setara yang berjudul **Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita** adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil survei dengan pendekatan kuantitatif di 10 propinsi di Indonesia. Selain berdasarkan survei opini publik, buku ini dilengkapi dengan kajian kualitatif baik bersumber pada dokumen-dokumen relevan maupun pengumpulan informasi melalui wawancara.

Laporan ini menyajikan cara pandangbagaimana kita seharusnya sebagai sesama bangsa bersikap atas berbagai perbedaan agama. Titik tolak bahwa setiap orang adalah saudara sebangsa adalah cara cerdas kita menyikapi fakta keberagaman. Toleran atas beragam kemajemukan merupakan kebutuhan kita untuk terus merawat diri dalam sebuah bangsa.

Jakarta, September 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd iv 11/1/2011 5:37:56 AM

Daftar Isi

Pengantar iii
Daftar Isi v

1. Pendahuluan 1
A. Mengukur Persepsi 7
B. Isi Buku 9

2. Telaah Ahmadiyah: Konteks Keindonesiaan 11
A. Latar Belakang Ahmadiyah 12
B. Hz Mirza Ghulam Ahmad 14
C. Ahmadiyah Qadian dan Lahore 15
D. Sejarah Masuk Indonesia 16
E. Silsilah Kekhalifahan Qadian 19
F. Silsilah Kepemimpinan Lahore 20
G. Gerakan Kerohanian 21
H. Antara Dunia Islam dan non-Muslim 23
I. Konteks Fatwa MUI 24
J. Konteks Keindonesiaan 29
K. Penutup 33

3. Diskriminasi Berkelanjutan 35
A. Lonjakan Diskriminasi 36
B. Masyarakat Menerima Ahmadiyah 52
C. Kesimpulan 60

4. Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita 63
A. Profil Responden 64
B. Sikap Kebangsaan 67
C. Sikap Keagamaan 85

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd v 11/1/2011 5:37:56 AM

D. Kondisi Kemajemukan 97
E. Pandangan terhadap Ahmadiyah 101
F Catatan Analitik 132

5. Kesimpulan: Ahmadiyah Saudara sebangsa 137

Daftar Pustaka 143
Catatan atas Peradilan Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik Banten 147
Indeks 189

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd vi 11/1/2011 5:37:56 AM

1
Pendahuluan

Pengikut Ahmadiyah, yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 300.000 jiwa, telah ada dan terus tumbuh di Indonesia sejak awal abad ke-20. Selama hampir satu abad, keyakinan Ahmadiyah --yang berpendapat bahwa pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), merupakan pembawa wahyu-- telah ada bersama arus utama (*mainstream*) keyakinan muslim Sunni di Indonesia. Pada tahun 1953,Ahmadiyah secara resmi diakui sebagai badan hukum oleh Pemerintah Indonesia.Meskipun ada pertentangan dalam bentuk dialog menyangkut ajaran keagamaan Ahmadiyah di beberapa tempat antara sejumlah ulama *mainstream* dengan tokoh Ahmadiyah, tetapi praktis tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan yang berarti terhadap pengikut Ahmadiyah sampai menjelang berakhir kekuasaan Orde Baru.Pada tahun 1982, ketika Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa terhadap Ahmadiyah. Pada waktu itu, di bawah rezim otoriter Soeharto, juga tidak ada protes atau kekerasan terbuka diarahkan terhadap anggota jemaat Ahmadiyah.

Namun, dengan jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, seiring denganmulai terbukanya ruang kebebasan politik, sikap intoleransi jugamuncul dan terus menguat bahkan berujung pada kekerasan terbuka. Pada bulan Januari 2005, Kejaksaan Agung dan badan pemerintah lainnya (yaitu Kementerian Agama, MUI, BIN, dan lainnya) mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa organisasi Ahmadiyah, kegiatan, ajaran dan kitab-kitab rujukannya agar dilarang dengan Keputusan Presiden.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 1 11/1/2011 5:37:57 AM

Amin Djamaluddin, pimpinan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) dan juga menjadi salah satu pengurus MUI, adalah aktor dan kekuatan pendorong di belakang rekomendasi ini. Selain MUI dan institusi pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pengawas Agama dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), organisasi besar Islam semacam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga menganggap ajaran Ahmadiyah sebagai sesat, namun dua organisasi ini selama ini memilih jalur dakwah dan dialog dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah. Pendek kata, mereka menghindari jalan kekerasan dalam menyikapi Ahmadiyah. Dinamika di tahun 2005 ini adalah awal bagi persekusi-persekusi serius terhadap Ahmadiyah. Persekusi terhadap Ahmadiyah seolah-olah menjadi sahih. Persekusi yang awalnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti Front Pembela Islam (FPI) yang secara terbuka menentang Ahmadiyah, kemudian menyebar ke kelompok-kelompok lainnya dan bahkan menyebar ke sebagian masyarakat.

Segera setelah rekomendasi dari Kejaksaan Agung dikeluarkan, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) juga mengeluarkan fatwa anti Ahmadiyah pada bulan Juli tahun 2005. Fatwa FUUI dengan cepat diikuti dengan serangan terhadap pertemuan Ahmadiyah di Bogor, dilakukan oleh FUUI, LPPI, dan Front Pembela Islam (FPI). Pada akhir Juli, MUI kembali mengingatkan fatwa yang diterbitkan 1982, hasil Musyawarah Nasional VII, dan menyerukan kepada pemerintah untuk melarang Ahmadiyah.

Pada bulan September 2007, dialog antara perwakilan pemerintah dan perwakilan Ahmadiyah dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi Ahmadiyah. Dalam rangkaian dialog, perwakilan Ahmadiyah mengemukakanpandangan bahwa mereka adalah muslim. Ahmadiyah juga menegaskan dalam 12 butir pernyataan yang salah satunya menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi. Pernyataan 12 butir yang ditandatangani pada 14 Januari 2008 itu, kemudian dijadikan indikatoroleh Bakorpakem untuk mengukur kepatuhan Ahmadiyah pada kesepakatan yang telah dibuat. Aparat kejaksaan di semua tingkatan dan juga organisasi Islam memantau kegiatan Ahmadiyah apakah sesuai dengan 12 butir kesepakatan atau menyimpang.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 2 11/1/2011 5:37:57 AM

Tertanggal 14 Januari 2008, Jemaat Ahmadiyah mengeluarkan 12 butir pernyataan setelah melalui rentetan dialog dengan Departemen Agama. Pernyataan itu terkait dengan rapat Bakorpakem yang akhirnya menetapkan bahwa negara tak melarang Jemaat Ahmadiyah.

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Asyhaduanlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasullulah, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa *Muhammad Rasulullahadalah Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup).
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru,mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiridan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiarIslam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai'at yang harus dibacaoleh setiap calon anggota jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kataRasulullah.
5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa:
    a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada nabi Muhammad.
    b. Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 3 11/1/2011 5:37:57 AM

6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohami Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orangIslam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.
8. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut Masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnyaberkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan perundang-undangan.
11. Kami warga jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/ golongan umat Islam dan masyarakat dalamperkhidmatan sosial kemasyarakat untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, 14 Januari 2008

PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 4 11/1/2011 5:37:57 AM

H. Abdul Basit

Amir

Mengetahui (disertai tanda tangan)

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar (Kabalitbang dan Diklat Depag RI)
2. Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA (Dirjen Bimas Islam Depag RI)
3. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA (Deputi Seswapres Bidang Kesra)
4. Drs. Denny Herdian MM (Ditjen Kesbangpol Depdagri)
5. Ir. H. Muslich Zainal Asikin, MBA, MT (Ketua II Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia – GAI)
6. KH Agus Miftah (Tokoh masyarakat)
7. Irjen Pol. Drs. H. Saleh Saaf (Kaba Intelkam Polri)
8. Prof. Dr. HM Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
9. Ir. H. Anis Ahmad Ayyub (Anggota Pengurus Besar JAI)
10. Drs. Abdul Rozzaq (Anggota Pengurus Besar JAI)

Dari pemantauan yang dilakukan ternyata menurut MUI, LPPI dan ormas-ormas Islam lainnya, Ahmadiyah dianggap melanggar kesepakatan 12 butir di atas. Atas dasar itu, sejumlah organisasi Islam kembali menuntut jemaat Ahmadiyah dibubarkan. Pada bulan Februari tahun 2008, FPI, Hizb At-Tahrir, Abu Bakar Ba'asyir dan lain-lain secara terbuka menyerukan perang terhadap Ahmadiyah. Tim pemantauan Bakorpakem juga kemudian mengumumkan bahwa Ahmadiyah telah mempraktikkan ajaran yang menyimpang dari 12 butir yang pernah disepakati.

Penyebaran kebencian terhadap Ahmadiyah bukan hanya menyasar kepada kelompok Ahmadiyah tapi juga kelompok-kelompok yang mengusung advokasi kebebasan beragama/

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 5 11/1/2011 5:37:57 AM

berkeyakinan. Aksi damai 1 Juni 2008 yang memperingati Hari Pancasila berakhir rusuh karena diserang oleh Laskar Pembela Islam (LPI), organ milisi bentukan FPI.Sejumlah orang dirawat di rumah sakit karena menderita luka akibat serangan tersebut. Meskipun pada awalnya ada harapan pemerintah bersikap tegas untuk menindak kelompok-kelompok radikal ini, karena Rizieq Shihab (pimpinan FPI) dan Munarman (pimpinan LPI) diproses secara hukum,tetapi kemudian sikap pasif pemerintah kembali terjadi. Sejumlah pembiaran atas aksi-aksi kekerasan atas nama agama terjaditanpa diproses hukum.

Delapan hari setelah serangan terhadap aksi damai tersebut, pemerintah Indonesia melakukan 'pembatasan' terhadap jemaat Ahmadiyah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3/2008, No. Kep-033/A/JA/6/2008, No. 1999/2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Secara implisit SKB ini tetap memberikan kesempatan kepada Ahmadiyah untuk beribadah tetapi tidak boleh menyiarkanajarannya secara terbuka. Keputusan ini ditentang oleh kelompok radikal karena tidak secara tegas membubarkan Ahmadiyah. Sedangkan kelompok advokasi kebebasan beragama/ berkeyakinan menganggap bahwa SKB ini tidak menyelesaikan masalah, karena nyata-nyata bertolak dari pandangan dan sikap diskriminatif.

Sejak SKB itu, serangan terhadap masjid dan jemaat Ahmadiyah terus meningkat secara signifikan. Peningkatan ini sejalan juga dengan peningkatan kekerasan atas gereja-gereja yang dianggap tidak memiliki izin untuk berdiri. Serangan paling keji yang menimpa jemaat Ahmadiyah terjadi pada 6 Februari 2011 di Cikeusik Pandeglang Banten. Tiga orang anggota jemaat dianiaya secara kejam hingga meninggal dunia. Paska serangan ini ketakutan luar biasa dialami oleh jemaat Ahmadiyah, apalagi sejumlah pemerintah daerah kemudian menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati, yang intinya adalah melarang aktivitas jemaat Ahmadiyah. Bahkan sebuah operasi khusus dilakukan oleh TNI di Jawa Barat dengan sandi Operasi Sajadah. Operasi ini menurut

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 6 11/1/2011 5:37:57 AM

mereka bertujuan untuk mengajak Ahmadiyah mengikuti Islam *mainstream* dan memfungsikan masjid-masjid milik Ahmadiyah menjadi fasilitas umum. Pemaksaan pindah keyakinan terhadap jemaat Ahmadiyah juga terjadi di banyak tempat.

A. Mengukur Persepsi

Rangkaian peristiwa diskriminasi yang menimpa jemaat Ahmadiyah, jelas bukan merupakan tindakan dari kelompok *mainstream* yangmerepresentasikan kepentingan kolektif umat Islam. Tindakan tersebut hanya merupakan kepentingan kelompok tertentu yang juga mempunyai tujuan politik tertentu.

Peragaan praktik persekusi terhadap Ahmadiyah sesungguhnya dilakukan oleh kelompok Islam garis keras. Sedangkan kelompok *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah tidak menunjukkan resistensinya terhadap Ahmadiyah secara berlebihan apalagi melakukan aksi kekerasan. Sehinggapatut dipertanyakan sikap pemerintah pusat maupun sejumlah pemerintah daerah dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap Ahmadiyah.Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pilihan pemerintah daerah menerbitkan berbagai kebijakan diskriminatif merupakan cerminan pendapat publik? Atau justru sebaliknya, kebijakan tersebut muncul atas tekanan kelompok organisasi radikal dan bagian dari kapitalisasi isyu Ahmadiyah untuk tujuan politik elit lokal?

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya pandangan masyarakat awam terhadap persoalan Ahmadiyah. Kita tahu kelompok-kelompok garis keras selalu mengatasnamakan umat/publik, demikian juga dengan suara-suara menentang Ahmadiyah yang muncul di permukaan. Apakah betul suara-suara itu merupakan cerminan dari kehendak publik?

Asumsi dasar survei yang diselenggarakan oleh SETARA Institute adalah bahwa sebagian besar masyarakat sebetulnya tidak mengetahui secara utuh tentang apa dan bagaimana Ahmadiyah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 7 11/1/2011 5:37:57 AM

dan/atau bahkan kurang peduli terhadap berbagai isyuyang berkaitan dengan Ahmadiyah. Bagi masyarakat isyu Ahmadiyah bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas dan mendesak dalam kehidupan keseharian mereka. Kalaupun Ahmadiyah dalam pandangan masyarakat adalah sesat, tidak berarti menjadikan mereka harus bermusuhan dengan pengikut Ahmadiyah. Terbukti banyak dari mereka terbiasa dan sejak lama hidup berdampingan dengan pengikut Ahmadiyah.

Karena itu menjadi penting untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap Ahmadiyah; sikap masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan restriktif yang menyasar Ahmadiyah, dan sebagainya. Secara umum survei ini bertujuan untuk mengetahui pandangan publik dan menghimpun langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh negara dalam menangani soal Ahmadiyah saat ini dan di masa mendatang.

Pertanyaan kunci yang diajukan dalam survei ini adalah (1) bagaimana publik memandang Ahmadiyah? Apakah kebijakan tentang pembatasan Ahmadiyah mencerminkan kehendak publik? Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menangani soal Ahmadiyah?

Sebuah survei yang mengukur persepsi publik jelas dibutuhkan dalam rangka memastikan akurasi pembentukan kebijakan di tingkat pemerintahan sehingga diperoleh gambaran dan landasan yang obyektif dan faktual.

Survei ini diselenggarakan dengan metode *stratified random sampling* untuk menentukan wilayah-wilayah survei secara berjenjang dari tingkat propinsi hingga rumah tangga. Sementara untuk menentukan responden, survei ini menggunakan *kish grid methode,* suatu teknik tertentu yang digunakan untuk dapat menentukan secara acak/random seorang responden terpilih dalam sebuah keluarga.

Survei dilaksanakan di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Survei opini publik ini melibatkan 3000 orang

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 8 11/1/2011 5:37:57 AM

sebagai responden. Dengan jumlah sampel sebanyak 3000 orang margin of error survei ini berkisar +/- 2.2% dan berada pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara pengumpulan data dilakukan pada 10-25 Juli 2011.

Selain menggunakan pendekatan survei, SETARA Institute juga menghimpun pendapat tokoh masyarakat, aktivis, dan jemaat Ahmadiyah untuk menangkap aspirasi terkait dengan situasi mutakhir Ahmadiyah pasca peristiwa penyerangan Cikeusik, Pandeglang Banten. Data yang diperoleh dari wawancara ini dikelola secara deskritif analitis untuk memperoleh gambaran situasi mutakhir tentang Ahmadiyah.

B. Isi Buku

Secara garis besar, buku ini menyajikan tiga topik utama yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan secara komprehensif tentang Ahmadiyah. Setelah Bab Pendahuluan, pada bab II buku ini disajikan kajian pustaka tentang Telaah Ahmadiyah: Konteks Keindonesiaan. Bab II ini mengulas secara ringkas bagaimana sejarah dan dinamika Ahmadiyah di Indonesia, termasuk perlakuan negara dan elemen masyarakat terhadap Ahmadiyah.

Pada bab III, buku ini memuat topik Diskriminasi Berkelanjutan yang merupakan potret mutakhir Ahmadiyah. Sementara hasil survei secara utuh disajikan dalam bab IV tentang Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita. Bagian ini berupaya menggambarkan bagaimana posisi warga negara dengan seperangkat prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selanjutnya diukur pula sikapa keagamaan masyarakat dan diakhiri dengan posisinya terhadap Ahmadiyah.

Bagian akhir dari buku ini berupa kesimpulan dan rekomendasi, yang merupakan jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bagian ini juga disertai dengan rekomendasi yang dihimpun dari pendapat masyarakat dan kajian kualitatif seluruh hasil wawancara. []

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 9 11/1/2011 5:37:57 AM

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 10 11/1/2011 5:37:57 AM

2
Telaah Ahmadiyah: Konteks Keindonesiaan

Hampir bisa dipastikan seandainya ada lembaga survei yang menanyakan kepada masyarakat tentang Ahmadiyah: Apakah Anda mengenal istilah Ahmadiyah? Apa Ahmadiyah dalam pandangan Anda? Mayoritas masyarakat Indonesia (terutama mereka yang beragama Islam) akan menjawab dengan mengatakan; "Saya tahu Ahmadiyah. Mereka adalah kelompok yang sesat."

Inilah realitas "popularitas negatif" Ahmadiyah saat ini yang sulit dipungkiri oleh siapapun. Hampir semua elemen masyarakat familiar dengan istilah Ahmadiyah, mulai dari para elite pemerintahan, politikus, aktivis hingga masyarakat biasa yang ada di pedalaman. Sangat disayangkan, ketenaran Ahmadiyah bersifat negatif. Karena mereka dikenal sebagai kelompok sesat dan menyesatkan.

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya "popularitas negatif" Ahmadiyah sebagaimana di atas. Salah satunya adalah sikap ormas-ormas Islam yang ramai-ramai menyesatkan pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini. Begitu juga dengan sikap para elite pemerintahan (mulai dari pusat hingga daerah) yang tidak mau "mengambil risiko" di tengah derasnya aksi penentangan dan tuntutan pembubaran terhadap Ahmadiyah. Hingga para pemimpin daerah banyak yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang melarang aktivitas Ahmadiyah.

Pada era keterbukaan seperti sekarang, tentu peran media

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 11 11/1/2011 5:37:57 AM

tak dapat diabaikan dalam pembentukan "popularitas negatif" Ahmadiyah. Apa pun tragedi yang dialami Ahmadiyah di Indonesia tak akan diketahui masyarakat luas bila media tidak melakukan peliputan secara massif. Dengan kata lain, pemberitaan media yang sedemikian massif tentang Ahmadiyah telah menembus semua sekat-sekat masyarakat. Hingga para petani atau nelayan di pedalaman, yang bahkan tidak terlalu mendalam pengetahuan keagamaannya pun tahu bahwa Ahmadiyah adalah kelompok sesat.

Padahal, apakah Ahmadiyah sesat atau tidak merupakan persoalan "kaum elite keagamaan". Mengingat persoalan tersebut terkait dengan keyakinan. Masyarakat umum hampir bisa dipastikan tidak mempunyai kapasitas memadahi untuk menilai sesat atau tidaknya sebuah keyakinan. Alih-alih menyesatkan keyakinan kelompok lain, mengetahui secara utuh keyakinan yang diikuti sendiri masih menjadi persoalan yang sangat serius bagi masyarakat umum.

Bagian kedua dari buku ini membahas secara deskriptif persoalan Ahmadiyah dalam konteks keindonesiaan, mulai dari sejarah masuknya ke Indonesia dan latar belakang munculnya fatwa sesat MUI. Sebelumnya, mari kita mengenali Ahmadiyah sebagaimana diyakini oleh para pengikutnya. Berikut kutipan profil Ahmadiyah sebagaimana dimuat dalam beberapa situs terkait dengan Ahmadiyah.[1]

A. Latar Belakang Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Hazrat (Hz) Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889. Ahmadiyah bukanlah suatu agama tersendiri. Sebagaimana umat Islam pada umumnya, Jemaat Ahmadiyah menjunjung tinggi kalimat syahadat, *Laa ilaaha illallah, Muhammadu rasulullah.*

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah dan http://www.alislam.org/indonesia/ latar.html.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 12 11/1/2011 5:37:57 AM

Jemaat Ahmadiyah menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang paling sempurna. Jemaat Ahmadiyah menjunjung tinggi Nabi Muhammad sebagai *khatamun-nabiyyiyn*. Beliau adalah Nabi pembawa syariat terakhir, penutup pintu kenabian *tasyri'i* (pembawa syariat). Tidak ada lagi Nabi pembawa syariat baru sesudah Nabi Muhammad SAW.

Nama Ahmadiyah berasal dari salah satu nama Nabi Muhammad, yaitu Ahmad. Dalam bahasa Arab, Ahmad bermakna yang terpuji karena kejujuran dan keluhuran moral yang bersangkutan. Pada era seperti sekarang, sisi ke-Ahmad-an Islam perlu ditampakkan. Atau dalam bahasa Jemaat Ahmadiyah disebut dengan istilah penampakan sifat Ahmadiyah Rasulullah SAW.

Jemaat Ahmadiyah bertujuan untuk y*uhyi ad-diyna wa yuqiymu as-syariah* (menghidupkan kembali agama Islam dan menegakkan kembali syariat Al-Quran). Dengan kata lain, Ahmadiyah bertujuan untuk menghimbau umat manusia kembali kepada Allah dengan memperkenalkan sosok sejati Nabi Muhammad SAW. dan menciptakan perdamaian serta persatuan antarberbagai kalangan manusia. Ahmadiyah berusaha menghapus segala kendala yang timbul karena perbedaan ras dan warna kulit sehingga umat manusia dapat bersatu dan mengupayakan perdamaian semesta.

Ahmadiyah beriman bahwa Allah Maha Esa dan tidak mempunyai sekutu dalam zat-Nya maupun dalam sifat-sifat-Nya, dan tidak dilahirkan maupun melahirkan. Dia bebas dari segala jenis kekurangan dan kelemahan dan sempurna di dalam segala sifat-Nya. Dia mengabulkan doa-doa para hamba-Nya dan membantu mereka dalam memenuhi segala keperluan mereka. Nikmat-nikmat-Nya, baik secara materi ataupun rohani, tidak terbatas, dan tidak hanya dilimpahkan kepada suatu bangsa atau kaum tertentu.

Para penganut Ahmadiyah meyakini bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada umat manusia melalui semua agama besar mengenai turunnya seorang juru selamat di akhir zaman telah menjadi kenyataan di dalam diri Hz Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau adalah Isa Al-Masih yang ditunggu-

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 13 11/1/2011 5:37:58 AM

tunggu oleh umat Kristiani; Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam; dan Krishna yang dinanti-nantikan oleh umat Hindu.[2]

B. Hz Mirza Ghulam Ahmad

Hz Mirza Ghulam Ahmad berasal dari keluarga yang taat beragama di Samarqand, sebuah kota di Asia Tengah. Nenek moyang beliau hijrah dari Samarqand menuju Punjab, India, pada awal abad ke-16 di masa kekuasaan Emperor Babar dari Dinasti Moghul.[3]

Beliau adalah keturunan dari Haji Barlas yang tak lain adalah paman Amir Timur. Timur berasal dari suku Barlas yang terkenal dan yang menguasai kawasan Kish selama 200 tahun. Kawasan ini pada zaman dahulu dikenal dengan nama Sogdiana, yang mana ibukotanya adalah Samarqand. Mereka adalah suku yang berakar dari Persia.[4]

Kata Samarqand berasal dari bahasa Persia (Samarkand). Pun demikian Barlas yang berarti pemuda gagah berani dari kalangan terhormat. Mirza Hadi Beg memimpin hijrah dari Samarqand menuju Punjab, India, dengan membawa rombongan sekitar 200 orang.[5]

Emperor Babar memberikan kepada Mirza kawasan yang mencakup ratusan perkampungan. Dan beliau ditunjuk sebagai *Qazi* di sana. Sehingga kampung kediaman beliau dikenal dengan nama *Islampur Qazi*. Dalam perkembangan selanjutnya, hanya *Qazi* yang tersisa dari nama *Islampur Qazi* dan lebih dikenal dengan sebutan *Qadi* yang kemudian menjadi Qadian.[6]

---

2 Dikutip dari Akidah Dan Tujuan Jamaah Ahmadiyah; Suvenir Peringatan Seabad Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari 1894-1994, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, 1994, hal. 46-47 (sebagaimana dimuat dalam http://www.alislam.org/indonesia/latar.html).

3 Abdul Halim Mahally, *Benarkah Ahmadiyah Sesat?,* PT Cahaya Kirana Rajasa, Jakarta, Cet. II, Tahun 2006, Hal. 3.

4 *Ibid.*

5 *Ibid,* Hal. 6.

6 *Ibid.*

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 14 11/1/2011 5:37:58 AM

Hz Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan kembar di Qadian pada tahun 1835. Saudara kembarnya wafat beberapa hari setelah lahir.[7] Semenjak kecil Mirza dikenal gemar belajar tentang Grammar, Ilmu Mantiq, dan Filsafat di bawah bimbingan Fazl Ilahi, Maulavi Fazl Ahmad, dan Maulavi Gul Ali Shah.[8]

C. Ahmadiyah Qadian dan Lahore

Ahmadiyah terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Pengikut kelompok Qadian di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah berbadan hukum sejak tahun 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Adapun pengikut kelompok Lahore membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang mendapat badan hukum nomor IX tanggal 30 April 1930.[9]

1. Pokok-Pokok Ajaran Ahmadiyah Qadian (di antaranya) sebagai berikutMengimani dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi.
2. Meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, Isa Al-Masih dan nabi
3. Tidak diperbolehkan kawin dengan non-Ahmadiyah.
4. Haram hukumnya bermakmum kepada orang lain di luar Ahmadiyah dalam shalat.
5. Meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi merupakan elemen penting bagi seseorang untuk bisa disebut Muslim.[10]

Adapun pokok-pokok keyakinan Ahmadiyah Lahore (di

7 Sayid Abdul Hasan Ali Nadwi, *Tikaman Ahmadiyah terhadap Islam,* Fadlindo, Jakarta, Cet. II, 2006, Hal. 11.

8 *Ibid.*

9 http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah.

10 Abdul Halim Mahally, *Benarkah Ahmadiyah Sesat?,* PT Cahaya Kirana Rajasa, Jakarta, Cet. II, Tahun 2006, Hal. 66.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 15 11/1/2011 5:37:58 AM

antaranya) sebagaimana berikut:

1. Meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi lagi sesudah beliau. Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai pembaharu.
2. Meyakini bahwa siapa pun yang membacakan dua kalimat syahadat adalah Muslim.
3. Membolehkan bermakmum (dalam shalat) kepada non Ahmadiyah selama yang bersangkutan tidak pernah mengafirkan orang lain.
4. Membolehkan kawin dengan non-Ahmadiyah.[11]

D. Sejarah Masuk Indonesia

Sejarah masuknya Ahmadiyah Qadian ke Indonesia berawal dari tiga pemuda asal Pesantren Sumatera Tawalib di Sumatera. Ketiganya meninggalkan kampungnya untuk menuntut ilmu. Mereka adalah Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan.

Pada mulanya, tiga santri tersebut berencana belajar di Mesir mengingat saat itu Kairo terkenal sebagai pusat studi ilmu keislaman. Namun mereka disarankan agar melanjutkan studinya ke India karena negara tersebut mulai menjadi pusat pemikiran modernisasi Islam. Hingga akhirnya ketiga pemuda itu tiba di Kota Lahore dan bertemu dengan Anjuman Isyaati Islam, atau dikenal dengan nama Ahmadiyah Lahore.

Setelah beberapa waktu di sana, mereka ingin melihat sumber dan pusat Ahmadiyah yang ada di Desa Qadian. Setelah mendapatkan penjelasan dan keterangan, akhirnya mereka melakukan bai'at di tangan Hadhrat Khalifatul Masih II, Hz Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad.

Pada perkembangan selanjutnya, tiga pemuda itu memutuskan untuk belajar di Madrasah Ahmadiyah yang kini disebut Jamiah

11 *Ibid.*

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 16 11/1/2011 5:37:58 AM

Ahmadiyah. Merasa puas dengan pengajaran di sana, ketiganya mengundang rekan-rekan pelajar di Sumatera Tawalib untuk belajar di Qadian. Tidak lama kemudian duapuluh tiga orang pemuda Indonesia dari Sumatera Tawalib bergabung dengan ketiga pemuda tersebut, untuk melanjutkan studi juga bai'at masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah.

Dua tahun setelah peristiwa itu, para pelajar Indonesia menginginkan agar Khalifatul Masih II berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Haji Mahmud (juru bicara para pelajar Indonesia dalam Bahasa Arab). Permintaan ini mendapatkan respons positif dari Khalifatul Masih II. Khalifatul Masih kemudian meyakinkan akan berkenjung ke Indonesia. Setidaknya akan mengirim wakilnya ke Indonesia.

Maulana Rahmat Ali Haot pun dikirim oleh Khalifatul Masih II sebagai muballigh ke Indonesia sekaligus mewakilinya. Pada tanggal 17 Agustus 1925, Maulana Rahmat Ali Haot dilepas Khalifatul Masih II berangkat dari Qadian menuju Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1925 Maulana Rahmat Ali Haot sampai di Tapaktuan, Aceh. Kemudian berangkat menuju Padang, Sumatera Barat.

Tak beberapa lama, Maulana Rahmat Ali Haot berangkat ke Jakarta, Ibukota Indonesia. Perkembangan Ahmadiyah tumbuh semakin cepat, hingga dibentuklah Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah dengan menjadikan R. Muhyiddin sebagai ketua pertamanya.

Terjadilah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Tidak sedikit kaum Ahmadi Indonesia yang ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan. Misalnya, R. Muhyiddin. Beliau dibunuh oleh tentara Belanda pada tahun 1946 karena menjadi salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Ada juga beberapa Ahmadi yang bertugas sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan mengorbankan diri mereka untuk negara.

Sementara para Ahmadi yang lain berperan di bidang masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia, seperti Maulana Abdul Wahid dan Maulana Ahmad Nuruddin yang berjuang sebagai penyiar radio; menyampaikan pesan kemerdekaan Indonesia ke

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 17 11/1/2011 5:37:58 AM

seluruh dunia. Sementara itu, muballigh yang lain,Maulana Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada beliau untuk dedikasinya kepada negara.[12]

Di tahun lima puluhan, Jamaah Ahmadiyah Indonesia mendapatkan legalitas menjadi satu organisasi keormasan di Indonesia. Yakni dengan dikeluarkannya badan hukum oleh Menteri Kehakiman RI No. JA. 5/23/13 tertanggal 13-3-1953.

Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik akhirnya menjungkalkan presiden pertama Indonesia, Soekarno (juga memakan banyak korban). Satu simbol era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain adalah seorang Ahmadi. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru. Ia pun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera.

Pada Era 70-an (tepatnya tahun 1978), Robithah Alam Islamiy menyatakan Ahmadiyah sebagai kelompok di luar Islam. Beberapa tahun berikutnya (tahun 1980), Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah yang kemudian dikukuhkan dengan fatwa serupa pada tahun 2005. Hingga banyak masjid Ahmadiyah yang dirobohkan oleh massa. Selain itu, banyak kaum Ahmadi yang menderita serangan secara fisik.

Era 90-an menjadi periode pesat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia bersamaan dengan diluncurkannya Moslem Television Ahmadiyah (MTA). Ketika Pengungsi Timor Timur yang membanjiri wilayah Indonesia (setelah jajak pendapat) dan menyatakan bahwa Timor Timur ingin lepas dari Indonesia, hal ini memberikan kesempatan kepada Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia

12 Tentu data penting seperti ini perlu mendapatkan konfirmasi dari para ahli sejarah kemerdekaan. Hal ini sangat penting untuk menghilangan kesan "bias" dalam data tersebut sekaligus untuk menghilangkan keraguan pihak-pihak tertentu akan keabsahan data tersebut.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 18 11/1/2011 5:37:58 AM

untuk mengirimkan tim Khidmat Khalq untuk berkhidmat secara terbuka.

Pada Tahun 2000, Hz Mirza Tahir Ahmad berkunjung ke Indonesia dari London. Ketika itu Tahir sempat bertemu dan mendapat sambuatan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais.

Adapun sejarah masuknya Ahmadiyah Lahore ke Indonesia bermula dari Tahun 1924. Pada tahun ini dua pendakwah Ahmadiyah Lahore, Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad, datang ke Yogyakarta. Minhadjurrahman Djojosoegito, sekretaris Muhammadiyah, mengundang Mirza dan Maulana untuk berpidato dalam Muktamar ke-13 Muhammadiyah dan menyebut Ahmadiyah sebagai "organisasi saudara Muhammadiyah".

Pada tahun 1926, Haji Rasul terlibat dalam perdebatan sengit dengan Mirza Wali Ahmad Baig hingga berujung pada pelarangan paham Ahmadiyah dalam lingkup Muhammadiyah. Pada Muktamar ke-18 di Solo (tahun 1929), Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan bahwa "orang yang percaya akan adanya Nabi sesudah Muhammad adalah kafir". Djojosoegito yang diberhentikan dari Muhammadiyah lalu membentuk Gerakan Ahmadiyah Indonesia pada 4 April1930 sekaligus menjadi ketua pertama dari gerakan ini.[13]

Saat ini, Ahmadiyah memiliki cabang di 174 negara yang tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Adapun pengikutnya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang, baik yang beraliran Qadian ataupun Lahore.

E. Silsilah Kekhalifahan Qadian

Setelah Hz Mirza Ghulam Ahmad wafat, Mirza digantikan oleh Khalifatul Masih I, yaitu Hz Mlv Hafiz Hakim Nuruddin. Pertablighan Islam dan pengembangan missi Ahmadiyah ke Eropa sudah dimulai pada masa Masih I ini.

13 http://id.wikipedia.org/wiki/Minhadjurrahman Djojosoegito.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 19 11/1/2011 5:37:58 AM

Khalifatul Masih I wafat pada tahun 1914 dan digantikan oleh Khalifatul Masih II, yaitu Hz Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Pertablighan Islam dan pengembangan missi Ahmadiyah ke seluruh dunia lebih terorganisir. Pengorganisiran itu diwujudkan pada tahun 1935 dalam bentuk gerakan yang dikenal dengan nama *tahrik jadid* (gerakan baru).

Di dalam gerakan ini Masih II menghimpun dana sukarela dari para anggota dan mengumpulkan tenaga-tenaga sukarela yang mewakafkan diri mereka untuk pengembangan Islam ke seluruh dunia. Pada masa Khalifatul Masih II ini Jemaat Ahmadiyah telah berkembang di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.

Setelah memimpin selama lebih kurang 50 tahun, Khalifatul Masih II wafat pada tahun 1965 dan digantikan oleh Khalifatul Masih III, yaitu Hz Mirza Nasir Ahmad. Masih III wafat pada tahun 1982 dan digantikan oleh Hz Mirza Tahir Ahmad sebagai Khalifatul Masih IV hingga tahun 2003. Kemudian dilanjutkan oleh Hz Mirza Masroor Ahmad sebagai Khalifatul Masih V hingga sekarang.

F. Silsilah Kepemimpinan Lahore

Gerakan Ahmadiyah Lahore tidak mengenal istilah khalifah sebagai pemimpin, melainkan Amir. Adapun para Amir tersebut adalah sebagaimana berikut:

- Hazrat Maulana Hakim Nurudin.
- Maulana Muhammad Ali MA. LLB.
- Maulana Sadrudin.
- Dr. Saed Ahmad Khan.
- Prof. Dr. Asghar Hamid Ph.D.
- Prof. Dr.Abdul Karim Saeed.[14]

14 http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 20 11/1/2011 5:37:58 AM

G. Gerakan Kerohanian

Dari yang telah disampaikan, Ahmadiyah dapat disebut sebagai gerakan kerohanian Islam, atau biasa dikenal dengan istilah tasawuf. Hal ini terlihat jelas dari latar-belakang sosial-politik di balik muculnya gerakan Ahmadiyah. Di mana Ahmadiyah tumbuh dalam sosio-politik yang sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam; Barat berkembang pesat. Sedangkan kenyataan umat Islam justru terpuruk dan harus menerima bahwa Barat telah mengambil alih kendali peradaban dunia yang selama berabad-abad sebelumnya dipegang oleh umat Islam.

Ajaran tasawuf hampir selalu identik dengan psikologi-terpuruk. Kepedihan realitas yang ada memaksa masyarakat membangun optimisme di dunia "dalam sana" sekaligus menjadikannya sebagai obat untuk menetralisir rasa pedih yang dirasakan.

Dalam sejarah pemikiran Islam, tasawuf muncul di saat umat Islam dilanda pelbagai macam konflik internal yang menyebabkan para sahabat Nabi saling berperang. Bahkan sahabat agung Nabi seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib harus meningggal akibat pertikaian internal yang terjadi.

Samarqand dan wilayah Persia pada umumnya dikenal dengan tradisi tasawufnya yang sedemikian kuat. Tidak jarang tradisi tasawuf *ala* Persia berbaur menjadi satu dengan tradisi tasawuf Arab-Islam. Hingga sulit dibedakan antara tradisi tasawuf versi ajaran Islam dengan tradisi tasawuf dari luar, termasuk dari Persia.

Muhammad Abid Al-Jabiri menggambarkan dengan sangat baik tentang tradisi tasawuf dalam Islam dan wilayah sekitar Arab, terutama Persia. Dalam salah satu bukunya berjudul *Aqlu Akhlaqil Arabi* (nalar moral Arab), pemikir asal Maroko yang sudah almarhum itu melansir banyak tradisi dalam tasawuf yang justru berasal dari tradisi kerohanian masyarakat Persia dan sekitarnya.[15]

Salah satu ciri khas gerakan tasawuf adalah ajarannya yang

15 Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, *Al-Aqlul Akhlaqi Al-Arabi,* Darun Nasyr Al-Maghribiyah, 2001.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 21 11/1/2011 5:37:58 AM

bersifat antikekerasan. Hampir semua gerakan tasawuf menjauhkan diri dari konflik dan aksi kekerasan. Mengingat tasawuf terlahir dari kenyataan konfliktual yang bercita-cita mewujudkan kehidupan yang lebih damai dan tentram.

Sejauh ini Ahmadiyah kerap menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang anti terhadapnya, terutama dari kalangan ekstremis. Namun demikian, Ahmadiyah belum pernah terdengar sebagai pelaku aksi kekerasan. Utamanya kekerasan secara opensif.

Hal ini semakin mengukuhkan Ahmadiyah sebagai gerakan kerohanian yang anti terhadap kekerasan. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan *kassyaf* Mirza Ghulam Ahmad yang selama ini telah menjadi ciri khas para sufi besar.

Pada suatu ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku menerima wahyu dari Allah, mengaku sebagai Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. "Aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia", demikian salah satu dari pernyataan *kassyaf* yang disampaikan oleh Mirza.[16]

Dalam kesempatan yang lain Mirza menegaskan, "Tugas yang diberikan Tuhan kepadaku ialah agar aku dengan cara menghilangkan hambatan di antara hamba dan Khaliq-Nya, menegakkan kembali di hati manusia, kasih dan pengabdian kepada Allah. Dan dengan memanifestasikan kebenaran lalu mengakhiri semua perselisihan dan perang agama, sebagai fondasi dari kedamaian abadi serta memperkenalkan manusia kepada kebenaran rohaniah yang telah dilupakannya selama ini. Begitu juga aku akan menunjukkan kepada dunia makna kehidupan kerohanian yang hakiki yang selama ini telah tergeser oleh nafsu duniawi. Dan melalui kehidupanku sendiri, memanifestasikan kekuatan Ilahiah yang sebenarnya dimiliki manusia namun hanya bisa nyata melalui doa dan ibadah. Di atas segalanya adalah aku harus menegakkan kembali Ketauhidan Ilahi yang suci, yang telah sirna dari hati manusia, yang bersih dari segala kekotoran

16 http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 22 11/1/2011 5:37:58 AM

pemikiran *polytheistic*."[17]

Kitab Tazkirah merupakan kumpulan dari pengalaman kerohanian puncak yang dialami oleh Mirza Ghulam Ahmad. Seseorang yang membaca buku ini akan merasakan suasana sufistik yang sedemikian kuat dan kentara. Sebuah pengalaman sufistik yang bahkan kerap dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan tekstual secara syariat.

H. Antara Dunia Islam dan non-Muslim

"Sengsara di kampung sendiri, berjaya di negara orang." Istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan perbedaan nasib Ahmadiyah di dunia Islam dan di dunia Barat. Di saat dunia Islam menolak dan kerap melakukan "pemburuan secara tidak manusiawi" terhadap kelompok Ahmadiyah, dunia luar seperti Eropa justru menjadi pembuktian keberhasilan kelompok ini.

Dunia Islam hampir kompak menolak kehadiran Ahmadiyah. Bahkan sebagian negara seperti Pakistan mengidentifikasi mereka sebagai kelompok minoritas di luar Islam. Parlemen Pakistan telah mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas di luar Islam. Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi Muslim, yaitu "orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.[18] Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkah menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam.[19]

Beberapa tahun berikutnya, Arab Saudi mengikuti langkah Pakistan. Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa Robithah Alam Islamiy (*Muslim World League*), Arab Saudi menyesatkan Ahmadiyah, khususnya yang beraliran Qadian.

17 *Ibid.*

18 http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/amendments/2amendment.html.

19 http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319274&kat_id=3.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 23 11/1/2011 5:37:58 AM

Lembaga fatwa Arab Saudi turut menandatangai fatwa tersebut. Robithah Alam Islamiy merupakan organisasi Islam yang mengklaim diri sebagai organisasi dunia Islam dan berpusat di Arab Saudi.[20]

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa negara Islam turut menyesatkan Ahmadiyah, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Kedua negara berpenduduk mayoritas Muslim itu bahkan melarang keberadaan Ahmadiyah di negaranya.

Pada tahap tertentu, Indonesia bisa dikatakan telah mengikuti langkah sejumlah negara Islam di atas. Bedanya adalah, Indonesia sejauh ini hanya menyesatkan Ahmadiyah, dan membatasi keberadaan Ahmadiyah tidak seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Brunei.

I. Konteks Fatwa MUI

Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyesatkan Ahmadiyah Qadian. Fatwa yang ditandatangani oleh Buya Hamka itu bisa disebut sebagai "peningkatan status" penolakan terhadap Ahmadiyah di Indonesia; dari penolakan yang sebelumnya terjadi di lingkungan Muhammadiyah menjadi meluas berskala nasional. Hal ini terjadi mengingat MUI (sejak berdiri) kerap meneguhkan diri sebagai organisasi perkumpulan ulama Indonesia, sesuai dengan namanya.

Fatwa MUI di atas dikeluarkan setelah dua tahun sebelumnya (1978) Arab Saudi dan Robithah Alam Islamiy mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah (sebagaimana di atas). Peran Buya Hamka dalam fatwa ini menarik dipelajari lebih mendalam.

Di satu sisi beliau adalah Ketua Umum yang menandatangani fatwa tersebut. Beliau juga disinyalir pernah belajar ke Arab Saudi. Dan yang tak kalah penting karena Haji Rasul (ayahanda beliau) sebelumnya juga menunjukkan sikap yang kurang lebih sama terhadap Ahmadiyah Lahore yang sangat disukai oleh salah satu tokoh Muhammadiyah, Minhadjurrahman Djojosoegito.

20 http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=76&l=AR.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 24 11/1/2011 5:37:58 AM

Bahkan sebagaimana telah disebutkan, sikap keras Haji Rasul terhadap Ahmadiyah Lahore membuat Minhadjurrahman Djojosoegito dikeluarkan dari Muhammadiyah dan kemudian mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Pada Muktamar ke-18 di Solo (1929), Muhammadiyah mengeluarkan sikap tegas bahwa "orang yang percaya akan adanya Nabi sesudah Muhammad adalah kafir."[21]

Hal yang perlu diperhatikan adalah, kisah awal kedatangan Ahmadiyah (baik Qadian maupun Lahore) di Indonesia berikut penolakan terhadapnya melibatkan sosok-sosok penting di lingkungan Muhammadiyah. Mengingat sejarah Ahmadiyah Qadian berawal dari tiga santri asal Pesantren Sumatera Tawalib yang belajar ke Pakistan (sebagaimana di atas). Menurut sebagian sumber, pesantren tersebut didirikan oleh Haji Rasul.[22]Sedangkan Ahmadiyah Lahore sangat terkait dengan sosok Minhadjurrahman Djojosoegito yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Muhammadiyah.

Dengan demikian, dua tokoh terkemuka tersebut (Buya Hamka dan Haji Rasul) telah "berperang" melawan Ahmadiyah di Indonesia yang tumbuh di dalam "keluarga besarnya" sendiri; Buya Hamka "berperang" dengan menyesatkan Ahmadiyah Qadian (melalui fatwa MUI 1980) dan Haji Rasul "berperang" dengan bersikap keras terhadap Ahmadiyah Lahore di lingkungan Muhammadiyah (melalui sikap kerasnya terhadap Minhadjurrahman Djojosoegito).

Menarik untuk digarisbawahi, walaupun ada penolakan di sebagian pihak terhadap kedatangan Ahmadiyah awal di Indonesia, namun hal tersebut tidak sampai memancing lahirnya aksi kekerasan. Bahkan walaupun penolakan terhadap Ahmadiyah dilakukan dengan pendekatan kelembagaan seperti yang dilakukan Muhammadiyah (melalui Muktamar Solo di atas) ataubahkan melalui fatwa MUI.

Pemerintahan Soeharto yang acap menggunakan tangan besi untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat bisa dijadikan

21 http://id.wikipedia.org/wiki/Minhadjurrahman Djojosoegito

22 http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Karim_Amrullah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 25 11/1/2011 5:37:59 AM

sebagai salah satu faktor yang membuat fatwa MUI tersebut tidak melahirkan aksi kekerasan. Ditambah dengan keberadaan media yang saat itu hampir tidak berperan kecuali bagi pemberitaan tentang kebijakan pemerintah, Soeharto dan keluarga besarnya.

Namun demikian, kenyataan tersebut juga bisa dipahami sebagai cerminan dari tegaknya kultur toleransi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Hingga perbedaan-perbedaan yang bersifat keyakinan tidak menjadi pemicu konflik sosial.

Faktanya adalah, Ahmadiyah masuk ke Indonesia tidak melalui jalur peperangan yang berdarah-darah. Melainkan melalui "kehendak sadar" beberapa anak negeri (tiga santri Sumatera Tawalib untuk konteks Ahmadiyah Qadian dan Minhadjurrahman Djojosoegito untuk konteks Ahmadiyah Lahore).

Di sini bisa dikatakan, sejarah masuknya Ahmadiyah ke Indonesia telah mempertemukan dua arus besar toleransi (budaya toleran masyarakat Nusantara dan ajaran damai Ahmadiyah) yang kemudian membentuk samudera kehidupan bermasyarakat yang damai, tentram dan saling menghormati.

Pada tahun 2005, MUI kembali mengeluarkan fatwa sesat Ahmadiyah yang menguatkan fatwa MUI 1980. Berbeda dengan fatwa MUI 1980 yang hanya menyebutkan sesatnya aliran Ahmadiyah Qadian, fatwa MUI 2005 juga menyesatkan aliran Ahmadiyah Lahore. Dan berbeda dengan fatwa MUI 1980 yang tidak terlalu menimbulkan aksi kekerasan di masyarakat, fatwa MUI 2005 kemudian acap disambut dengan pelbagai macam aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah yang terjadi di banyak daerah paska keluarnya fatwa tersebut.

Pertanyaannya adalah, apa yang membuat MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah? Baik dalam konteks fatwa 1980 atau fatwa 2005. Begitu juga, kenapa MUI merasa perlu mengukuhkan fatwa sesat Ahmadiyah 1980 dengan fatwa serupa pada tahun 2005?

Ada dua konteks yang harus dilihat untuk menjawab pertanyaan di atas. *Pertama,* konteks meningkatnya suara penolakan terhadap Ahmadiyah di pentas dunia global, khususnya

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 26 11/1/2011 5:37:59 AM

negara-negara berpenduduk Muslim. Terhitung sejak awal 70-an, suara kritis terhadap Ahmadiyah semakin terdengar keras dari sejumlah negara berpenduduk Muslim yang berujung pada keluarnya fatwa sesat Ahmadiyah oleh Robithah Alam Islamiy dan pelarangan kelompok ini di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Kedua, konteks nasional terkait dengan menguatnya kelompok-kelompok konservatif. Fatwa sesat Ahmadiyah 1980 bisa dijadikan sebagai cermin yang bisa memperlihatkan "retaknya" kerukunan antarumat beragama yang ditandai dengan munguatnya konservatisme di dalam kehidupan umat beragama. Itu sebabnya, tidak mengherankan bila keluarnya fatwa sesat Ahmadiyah tahun 1980 hampir bersamaan dengan keluarnya fatwa haram selamat Natal yang sama-sama berasal dari MUI.

Pada tahap tertentu, fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan MUI pada tahun 2005 terlahir dari konteks yang kurang lebih sama. Saat itu Ahmadiyah kerap dijadikan sebagai musuh bersama oleh kelompok-kelompok konservatif yang tersebar di dalam ormas-ormas keagamaan. Mulai dari ormas keagamaan yang hampir identik dengan aksi kekerasan, hingga ormas keagamaan yang selama ini dikenal moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Kelompok-kelompok ini kemudian bersatu dalam menghadapi musuh bersama dan berada di belakang fatwa MUI 2005.[23]

Inilah kurang lebih yang bisa menjelaskan kenapa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan MUI pada tahun 2005 (untuk mengukuhkan fatwa MUI 1980) bersamaan dengan keluarnya fatwa haram terhadap pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Tak lain karena Ahmadiyah dan kelompok-kelompok pluralis dianggap sebagai musuh bersama.

"Aliansi" kelompok konservatif di atas merasa perlu MUI

23 Sebagaimana terdapat dalam susunan kepengerusan MUI 2005, mereka yang duduk di komisi fatwa MUI periode 2005-2010 adalah KH. Ma'ruf Amin (Ketua), Prof. DR. H. M. Amin Suma, SH., MA. (wakil ketua), DR. H. Anwar Ibrahim (wakil ketua), Prof. K.H. Ali Mustafa Yacub, MA (wakil ketua), Dr. H.M. Masyhuri Na'im (wakil ketua), Drs. Hasanuddin, M.Ag. (sekretaris), Drs. H. Aminuddin Ya'cub, MA (wakil sekretaris), dan Drs. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.Ag. (wakil sekretaris).

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 27 11/1/2011 5:37:59 AM

mengukuhkan fatwa sesat Ahmadiyah 1980 (dengan fatwa 2005) mengingat fatwa tersebut dianggap tidak efektif. Faktanya para pengikut Ahmadiyah semakin banyak dan berani mendakwahkan keyakinannya secara terbuka (sebagaimana kelompok konservatif juga demikian), terutama pada era reformasi.

Dilihat dari kecenderungan di atas, kemungkinan Ahmadiyah di Indonesia dipaksa menjalani nasib seperti di negara Islam lain semakin besar. Apalagi pelbagai macam kekuatan politik di republik ini cenderung mengambil "sikap aman" dari persoalan Ahmadiyah. Hingga mereka tidak melakukan sikap yang semestinya terhadap persoalan ini. Bila tidak, maka mereka terancam akan dianggap sebagai pendukung Ahmadiyah yang besar kemungkinan akan kehilangan dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan cenderung anti terhadap Ahmadiyah, sebagaimana telah disebutkan di awal tulisan ini.

Dalam beberapa waktu terakhir, tuntutan pembubaran dan pelarangan Ahmadiyah Indonesia semakin menguat dengan menggunakan strategi yang lebih canggih. Bila selama ini mereka kerap menempuh jalur pemerintah pusat untuk mewujudkan tuntutannya, dalam beberapa waktu terakhir mereka justru menempuh jalur daerah. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya Perda yang melarang aktivitas Ahmadiyah, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan yang lainnya.

Pelarangan Ahmadiyah melalui Pemerintah Daerah dianggap lebih realistis dibanding pelarangan melalui pemerintah pusat. Mengingat pelarangan Ahmadiyah melalui pemerintah pusat banyak mendapatkan tantangan dan rintangan. Sedangkan pelarangan Ahmadiyah melalui Pemda hampir tak mempunyai kendala yang berarti.

Ibarat semut memakan kue, pelarangan Ahmadiyah melalui Pemda bertujuan untuk melarang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia secara total. Memang cara ini lebih lambat dalam mencapai tujuan ketimbang pelarangan Ahmadiyah melalui jalur pemerintah pusat. Namun bila "kue" itu terus dikikis dari pinggir, akhirnya akan habis juga.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 28 11/1/2011 5:37:59 AM

Nasib Ahmadiyah di dunia Islam sebagaimana di atas sangat berbeda dengan nasib kelompok ini di wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim, terutama di negara-negara Eropa. Ahmadiyah berkembang sedemikian pesat di wilayah ini. Mereka tak hanya berhasil membangun masjid-masjid besar di sana. Lebih daripada itu mereka berhasil mempertahankan citra Islam sebagai agama anti kekerasan dari gempuran para teroris yang kerap melakukan aksi teror atas nama Islam di satu sisi, dan dari kampanye negatif terhadap Islam yang dilakukan oleh sebagian elemen masyarakat setempat di sisi yang lain.

Inilah peran Ahmadiyah yang acap dinihilkan oleh kelompok-kelompok Muslim di dunia Islam. Apalagi mereka mempunyai jaringan media yang sangat kuat, terutama dengan adanya jaringan televisi satelit MTA sebagaimana di atas.

Sementara kelompok-kelompok besar Islam di dunia Muslim hanya bisa menghujat dan memburu keberadaan anggota Ahmadiyah yang ada di negaranya lantaran perbedaan yang bersifat teologis. Padahal mereka acap tak mempunyai peran dalam perjuangan Islam di pentas global, alih-alih hadir langsung seperti yang dilakukan oleh Ahmadiyah.

J. Konteks Keindonesiaan

Dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah, Indonesia tak seharusnya ikut-ikutan melakukan apa yang telah dilakukan oleh beberap negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Pakitan, Malaysia, Brunai Darussalam dan yang lainnya. Mengingat ada perbedaan yang sangat mendasar anatara konteks keindonesiaan dengan konteks yang dihadapi oleh negara-negara berpenduduk Muslim tersebut.

Setidaknya karena tiga alasan utama. *Pertama,* Indonesia adalah negara majemuk yang sarat dengan nilai-nilai toleransi. Kemajemukan yang ada telah hadir di Indonesia sebelum negara ini dilahirkan. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara-bangsa terlahir justru karena adanya komitmen kemajemkan untuk hidup bersama secara damai dan berdampingan.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 29 11/1/2011 5:37:59 AM

Dengan kata lain, kemajemukan adalah jati diri sejati bangsa Indonesia. Eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran dan semangat kemajemukan di kalangan segenap warganya. Indonesia tetap akan tegak selama semangat kemajemukan juga tegak. Pun demikian sebaliknya, Indonesia akan berakhir bersamaan dengan runtuhnya semangat kemajemukan.

Meminjam istilah yang digunakan oleh almarhum Cak Nur (Nurcholish Madjid), kemajemukan Indonesia bisa menjadi keistimewaan, tapi juga bisa menjadi kerawanan.[24] Menjadi keistimewaan tatkala semua kemajemukan yang ada bisa dipahami dan dikelola secara baik. Menjadi kerawanan tatkala kemajemukan yang ada tidak dipahami secara baik. Hingga kemajemukan menjadi bom waktu yang bisa meletuskan konflik sosial di mana-mana.

Inilah yang kerap terjadi belakangan dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah. Kemajemukan tak lagi dipahami sebagai jati diri bangsa ini. Hingga terjadi pelbagai macam aksi kerusuhan dan konflik sosial yang justru berbasis pada kemajemukan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sejatinya kemajemukan adalah masa depan gemilang bagi bangsa ini. Karena bangsa ini mempunyai sejumlah undang-undang yang memberi jaminan bagi kebebasan beragama, seperti Amandemen UUD Negara RI 1945 Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2); UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kevenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); dan masih banyak lagi lainnya. Dan tentu saja semua ini memuncak pada *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai filofosi berbangsa dan bernegara yang bahkan menjadi kebanggaan Presiden Amerika Serikat (AS) saat ini, Barack Obama.

Namun demikian, semua perundang-undangan dan filosofi kebangsaan yang ada selama ini masih menjadi huruf mati di atas kertas. Karena praktik sehari-hari justru penuh dengan aksi-aksi kekerasan. Bahkan negara pun turut melakukan aksi kekerasan

24 *Indonesia Kita,* PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 30 11/1/2011 5:37:59 AM

seperti yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dengan melarang Ahmadiyah di daerahnya.

Sungguh tidak pada tempatnya bila Indonesia atau Pemda melarang Ahmadiyah, baik larangan beraktivitas, larangan berkeyakinan, terlebih lagi larangan berada di Indonesia. Karena melarang Jemaat Ahmadiyah beraktivitas atau menyebarkan keyakinan sama halnya dengan menganjurkan Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan segala macam aktivitas keagamaannya secara eksklusif, tertutup dan tidak membaur dengan masyarakat.

Padahal, selama ini eksklusivitas Jemaat Ahmadiyah dalam menjalankan aktivitas keagamannya menjadi salah satu persoalan serius dari kelompok ini. Hingga menimbulkan pelbagai macam asumsi dan kecurigaan yang tak jarang berakhir dengan konflik berdarah.

Sejatinya semua pihak mendorong Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan aktivitas keagamannya secara lebih terbuka. Hingga tidak menimbulkan pelbagai macam asumsi dan kecuirgaan di kalangan masyarakat luas. Pun demikian tidak masuk akal bila negara melarang warganya berkeyakinan. Mengingat keyakinan merupakan "gerak hati" yang tak bisa dipaksakan. Sebuah keyakinan tak akan pernah berubah hanya karena larangan maupun paksaan. Sebaliknya, larangan dan paksaan kerap membuat seseorang semakin mantap dengan keyakinannya.

Dan lebih tak dapat dibenarkan lagi bila negara ataupun Pemerintah Daerah melarang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Apa pun keyakinan Jemaat Ahmadiyah dan berapa pun kadar kesesatannya, mereka mempunyai *ari-ari* kebangsaan yang tak bisa diputus dengan alasan apa pun. *Ari-ari* kebangsaan mereka tersambung kuat dengan semua warga Indonesia lain sebagai saudara, termasuk dengan mereka yang kerap menuntut pembubaran dan pelarangan Ahmadiyah. Indonesi adalah bumi pertiwi bagi siapa pun yang mengalami tumpah darah di republik ini.

Kedua, Ahmadiyah turut berperan dalam proses kemerdekaan dan kelahiran Indonesia. Tak sedikit dari pengikut Ahmadiyah yang

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 31 11/1/2011 5:37:59 AM

turut berdarah-darah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagian dari mereka telah mengorbankan jiwa-raganya demi kemerdekaan bangsa Indonesia dari kekuatan penjajah.

Realitas historis sebagaimana di atas menunjukan bahwa Ahmadiyah telah menjadi bagian dari semangat kemajemukan untuk hidup bersama di bawah naungan bangsa Indonesia yang merdeka. Dengan kata lain, sebagaimana elemen bangsa yang lain, Ahmadiyah turut mempunyai saham tak ternilai bagi lahirnya Indonesia merdeka.

Oleh karenanya, Ahmadiyah sesungguhnya menjadi salah satu "pemilik" bangsa Indonesia merdeka bersama seluruh komponen bangsa yang lain. Sebagai pemilik bangsa, Ahmadiyah mempunyai hak untuk tetap mengawal eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa yang berdiri di atas semangat kemajemukan.

Adalah ironis karena Ahmadiyah justru kerap dituntut untuk dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Di mana tuntutan seperti ini justru dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak ikut andil dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti MUI yang dibentuk oleh Orde Baru, FPI, HTI dan lain sebagainya. Lebih ironis lagi, karena kekuatan-kekuatan lain yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan ikut serta dalam pelbagai macam aksi menuntut pembubaran dan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Mereka seakan melupakan "masa-masa bersama" dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Ketiga, Ahmadiyah tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana telah disampaikan di atas, Ahmadiyah selama ini tidak terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang harus ditindak oleh negara, walaupun mereka kerap menjadi sasaran aksi kekerasan dan diskriminasi.

Bila harus ada yang diposisikan sebagai ancaman bagi NKRI dan harus dibubarkan, tentulah bukan Ahmadiyah. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang kerap menuntut Ahmadiyah dibubarkan dan dilarang justru lebih pantas untuk dibubarkan dan dilarang di Indonesia karena secara nyata melakukan tindakan kekerasan.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 32 11/1/2011 5:37:59 AM

Selain karena perbuatan mereka melawan semangat kemajemukan sebagai jati diri bangsa, juga karena mereka selama ini sangat akrab dengan aksi kekerasan dalam menjalankan perjuangannya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kekerasan apa pun dan dilakukan oleh kelompok mana pun harus mendapatkan hukuman tegas dari negara. Bila tidak, maka aksi kekerasan akan melahirkan aksi kekerasan baru yang pada akhirnya mengikis arti kehidupan berbangsa dan bernegara.Sebaliknya, negara tidak mempunyai hak untuk menghukumi sebuah keyakinan, berapa pun kadar kesesatan dari keyakinan tersebut.

Oleh karenanya, sungguh tidak pada tempatnya bila seorang pejabat negara (mulai dari kepala desa hingga presiden) turut menyesatkan kelompok tertentu lantaran kelompok tersebut dinyatakan sesat oleh seorang ataupun lembaga keagamaan tertentu. Terlebih lagi bila pejabat negara melarang kelompok seperti Ahmadiyah untuk beraktivitas. Karena pemerintah sebagai abdi negara sejatinya mengayomi semua anak bangsa, apa pun agama dan keyakinannya.

Tiga hal di atas mutlak harus diperhatikan oleh semua pihak dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, terutama para pejabat pemerintah di semua instansinya. Hingga semua pihak bisa mengambil sikap proporsional dalam menghadapi tuntutan pembubaran dan pelarangan Ahmadiyah.

K. Penutup

Sebagai penutup, perlu disampaikan sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW. yang bisa diteladani oleh semua pihak dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah, terutama dalam konteks keindonesiaan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW. menolak usulan para sahabatnya untuk membunuh seorang tokoh munafik yang mengaku Muslim, tapi tak dianggap Muslim oleh para sahabat Nabi yang lain lantaran orang tersebut kerap melakukan kejahatan terhadap umat Islam (termasuk meracuni Nabi Muhammad SAW). Sosok munafik tersebut bernama Ubai bin Salul. Nabi Muhammad

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 33 11/1/2011 5:37:59 AM

SAW menolak usulan pembunuhan terhadap Ubai bin Salul dengan satu alasan; Aku khawatir orang luar (yang bukan beragama Islam) akan menganggap Muhammad membunuh sahabatnya sendiri.

Toh kalaupun Ahmadiyah harus dianggap sesat, tapi mereka tidak sejahat Ubai bin Salul. Setidak-tidaknya karena Ahmadiyah Indonesia tidak melakukan aksi kekerasan ataupun kejahatan lain terhadap umat Islam lain, alih-alih meracuni Nabi seperti yang dilakaukan oleh Ubai bin Salul di atas.

Nabi membiarkan Ubai bin Salul bersama kelompoknya tetap hidup dan tidak dipaksa keluar dari Islam. Jelas Ahmadiyah bukan kelompok munafik seperti kelompoknya Ubai bin Salul. Maka Ahmadiyah pun lebih pantas untuk mendapatkan prilaku baik dari umat Islam, sebagaimana yang dilakukan Nabi terhadap Ubai bin Salul bersama kelompoknya.

Jemaat Ahmadiyah di Indonesia sama-sama anak bangsa. Bahkan mereka juga turut berkontribusi dalam memperjuangan kemerdekaan. Melarang, mengusir apalagi membunuh Jemaat Ahmadiyah hanya akan dianggap oleh orang luar sebagai pertikaian sesama umat Islam dan sesama anak bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya bila bangsa ini (yang beragama Islam) mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW di atas.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 34 11/1/2011 5:37:59 AM

3
Diskriminasi Berkelanjutan

Pelbagai macam tindakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah semakin jamak terjadi. Mulai dari tindakan diskriminatif yang bersifat administratif kenegaraan hingga tindakan kekerasan yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.Tragedi Cikeusik pada tanggal 6 Februari 2011 yang mengakibatkan 3 anggota Jemaat Ahmadiyah meninggal dunia (begitu juga dengan korban luka, pengrusakan mobil dan rumah) menjadi "puncak sementara" dari pelbagai macam aksi diskriminasi yang dialami Ahmadiyah dalam beberapa tahun terakhir. Disebut "puncak sementara" karena bukan tidak mungkin pelbagai macam aksi kekerasan lebih sadis dari tragedi Cikeusik akan kembali terulang pada masa-masa mendatang.

Faktanya pemerintah dan semua aparat hukum gagal menegakkan keadilan dalam peristiwa Cikeusik. Alih-alih mengganjar para pelaku aksi kekerasan yang telah memakan korban jiwa dengan hukuman yang setimpal, Pengadilan Negeri Serang justru menghukum anggota Ahmadiyah, Deden Sudjana, dengan hukuman 6 bulan penjara. Hukuman ini notabene setara dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada para pelaku aksi kekerasan yang berjumlah 11 orang. Yakni hukuman antara 3-6 bulan penjara.[25]

Tragedi Cikeusik harus dibedakan dengan aksi-aksi kekerasan lain yang mungkin memakan korban jiwa dalam jumlah yang jauh

25 http://www.voanews.com/indonesian/news/Pengikut-Ahmadiyah-Cikeusik-Dihukum-6-Bulan-Penjara-127742978.html.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 35 11/1/2011 5:37:59 AM

lebih banyak. Mengingat peristiwa itu terkait dengan aksi kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan dalam kehidupan umat beragama.

Telah maklum bersama, semua agama membawa konsep keyakinan yang berbeda dengan agama yang lain. Alih-alih dalam konteks agama-agama, perbedaan dalam menafsir keyakinan juga terjadi dalam konteks kelompok-kelompok intra-agama. Inilah "kerawanan" dalam beragama. Tanpa adanya jiwa toleransi dan penghormatan yang tinggi terhadap semua perbedaan yang ada, umat beragama dengan mudah bisa masuk ke dalam jurang aksi kekerasan karena segenap perbedaan yang ada.

Dalam konteks seperti inilah, pemerintah dan para penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku aksi kekerasan di Cikeusik. Hal ini mutlak harus dilakukan untuk menutup semua kemungkinan yang ada bagi terjadinya aksi kekerasan atas nama agama dan keyakinan. Bukan justru membuka pintu lebar-lebar bagi terjadinya aksi kekerasan atas nama agama atau keyakinan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang yang justru menghukum Jemaat Ahmadiyah.

A. Lonjakan Diskriminasi

Hasil wawancara lapangan SETARA Institute dengan beberapa pihak di beberapa wilayah dimana komunitas Ahmadiyah berada menunjukkan terjadinya lonjakan tindakandiskriminasi paskatragedi Cikuesik. Tindakandiskriminasi yang terjadi paskatragedi Cikuesik terjadi dalam beberapa bentuk sebagai berikut.

1. Kebijakan Diskriminatif

Tindakandiskriminasi dalam bentuk penerbitan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini adalah bentuk diskriminasi yang paling merata terjadi di wilayah-wilayah yang selama ini banyak terdapat pengikut Ahmadiyah.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 36 11/1/2011 5:37:59 AM

Di wilayah Jawa Timur, contohnya, tragedi Cikeusik seakan dijadikan momentum oleh pihak-pihak tertentu untuk mendesak pembubaran Ahmadiyah. Kelompok-kelompok garis kerasdi Jatim memanfaatkan tragedi Cikeusik untuk mendesak lahirnya kebijakan pelarangan Ahmadiyah.

Selasa, 8 Februari 2011, MUI Jatim bersama Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Jatim menuntut Pemerintah Propinsi Jatim dan polisi membubarkan Ahmadiyah.[26] Pada 11 Februari 2011, KH. Abdussomad Buchori (Ketua MUI Jatim) bertemu dengan 130 kiai se-Jawa dan Madura di Pondok Pesantren Sidogiri, di Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Pertemuan itu secara khusus mensosialisasikan desakan untuk pembubaran Ahmadiyah.[27]

Sementara MUI melakukan desakan dengan pendekatan "diplomasi", Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Umat Islam Bersatu GUIB[28] Jatim memilih menggelar aksi demonstrasi pada 13 Februari 2011. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Haidar Al-Hamid (Ketua I FPI Jatim) dan menuntut Gubernur Jatim segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembubaran Ahmadiyah.[29] Puncaknya, 22 Februari 2011, GUIB Jatim bersama dengan FPI mendatangi Rumah Dinas Gubernur di Jalan Imam Bonjol. Mereka mendesak Soekarwo selaku Gubernur Jatim untuk segera melarang keberadaan Ahmadiyah di Jatim.[30] Para perwakilan GUIB memberi Gubernur waktu seminggu untuk segera menerbitkan Pergub yang mereka inginkan. Desakan ini terbukti sakti karena belum genap seminggu sesudah pertemuan tersebut,

26 http://metrotvnews.com/metromain/newscat/nusantara/2011/02/08/41976/MUI-Jatim-Menuntut-Pembubaran-Ahmadiyah.

27 http://www.beritajatim.com/detailnews.php/19/Lapsus/2011-02-11/92604/Ulama_Jawa-Madura_Bahas_Ahmadiyah_di_Sidogiri.

28 Aliansi ormas-ormas Islam yang mengklaim diri beranggotakan 32 ormas, antara lain: Center for Indonesia Community Studies (CICS), GNPI (Gerakan Nasional Patriat Islam), MUI Jatim, FPI, FUI (Forum Umat Islam), FPIS (Forum Pemuda Islam Surabaya), Al-Irsyad, NU, Muhammadiyah, FPI, Persis, Hidayatullah, DDII, Laskar Arif Rahman Hakiem, dan PPI (Pelajar Islam Indonesia).

29 http://www.i-berita.com/hot/fpi-desak-bubarkan-ahmadiyah.html.

30 http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=d8ac0f226ea250d11944b89ebd3687cc201188859.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 37 11/1/2011 5:38:00 AM

Soekarwo benar-benar mengeluarkan Peraturan Gubernur Surat Keputusan (SK) tentang pembatasan kegiatan Ahmadiyah.

SK No. Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pembatasan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah tersebut ditandatangani dan dibacakan oleh Soekarwo di Gedung Negara Grahadi pada Senin, 28 Februari 2011. Soekarwo berdalih bahwa SK tersebut dikeluarkan bukan untuk membubarkan, melainkan untuk membatasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jatim. Dalam argumentasi Soekarwo, SK justru diperlukan untuk menjaga keamanan dan suasana kondusif Jatim.[31]

Ada empat poin penting dalam SK tersebut, yakni larangan bagi Jemaat Ahmadiyah untuk: (1) menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik; (2) memasang papan nama Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum; (3) memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lainnya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; (4) menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya.[32]

Betapapun SK itu lahir dengan argumentasi keamanan, tetapi justru melahirkan mata rantai pelanggaran yang beruntun bagi JemaatAhmadiyah. Tidak berselang lama sesudah SK diumumkan oleh Soekarwo, sejumlah personil Polres Surabaya yang dipimpin oleh Kasat Intel Polresta Surabaya, AKBP Imran Siregar, mendatangi kantor JAI Jatim dan memaksa pengurusnya untuk mencopot papan nama Ahamdiyah.

Atas desakan polisi tersebut, pengurus Ahmadiyah akhirnya mencopot papan nama gerakan ini. Pencopotan papan nama segera diikuti oleh pengurus Ahmadiyah di berbagai daerah. Di Sidorajo, Mojokerto, Kediri, Madiun, dan beberapa daerah lain, pengurus Ahmadiyah memilih mencopot sendiri papan organisasi karena tidak kuasa melawan tekanan polisi.[33]

---

31 http://us.surabaya.detik.com/read/2011/02/28/181704/1581534/466/sk-gubernur-jatim-larang-ahmadiyah-untuk-redam-keresahan-warga.

32 Dokumen SK No. Nomor 188/94/KPTS/013/2011.

33 http://us.surabaya.detik.com/read/2011/02/28/174700/1581502/466/papan-nama-pusat-kegiatan-ahmadiyah-jatim-dicopot.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 38 11/1/2011 5:38:00 AM

Di berbagai kota tersebut, para Bupati/Walikota menyampaikan komitmennya untuk melarang aktivitias Ahmadiyah. Di Lumajang, misalnya, Wakil Bupati Lumajang, As'at Malik, menghimbau kepada MUI dan lembaga keagamaan lain untuk menyebarluaskan SK larangan Ahmadiyah beraktivitas.[34] Beberapa hari sesudah SK keluar, aktivitas ibadah, terutama shalat Jum'at, terus dipantau ketat pihak kepolisian.[35]

Bahkan, menurut Jerry C. Gunadi (Humas JAI Jatim), pihaknya sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena dilarang shalat Jum'at di Masjid Al-Nur Surabaya.[36] Atas dasar inilah, menurut Jerry, keluarnya SK Gubernur, membuat anggota Jemaat Ahmadiyah mengalami tekanan psikologis. Diantaranya, pelarangan ibadah di Masjid Ahmadiyah dan sikap diskriminasi terhadap anak-anak JAI.

Terbitnya SK Ahmadiyah di Jatim mendapatkan respons beragam. Sebagian kalangan berpandangan bahwa SK itu merupakan langkah yang tepat untuk meredam kekerasan di Jatim. Akan tetapi kelompokhak asasi manusia tetap memandang SK tersebut sebagai kebijakan diskriminatif yang mencerminkan pembangkangan terhadap konstitusi.

Pandangan pertama, misalnya, dapat ditemukan pada pernyataan H. Kasno Sudaryanto (sekretaris FKUB Jatim). Sebagai orang yang berada di lingkaran kiai dan ulama yang mendesak diterbitkannya SK, Kasno berpandangan bahwa SK justru sangat efektif dalam menjaga kondusifitas Jatim. "*Saya kira SK tentang Ahmadiyah, itu justru upaya menjaga kerukunan di Jawa Timur," tegas Kasno*.[37]

Lebih jauh, dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel itu berpandangan, di lingkungan para kiai ada ulama ada kesepahaman

34 http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-03-04/94540/Lumajang_Larang_Aktivitas_Ahmadiyah.

35 http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-03-01/94232/_Polisi_Jaga_Masjid_Ahmadiyah_di_Sawotratap.

36 http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=1739.

37 Wawancara dengan Kasno Sudaryanto pada 5 Agustus 2011, pukul 13.00–14.00 WIB.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 39 11/1/2011 5:38:00 AM

bahwa keberadaan Ahmadiyah sering dijadikan alasan oleh ormas Islam tertentu untuk berbuat kekerasan. Atas dasar argumentasi inilah, Kasno berpandangan bahwa keputusan Gubernur menerbitkan SK tersebut sudah sangat tepat karena bisa meredam aksi kekerasan. "*... dengan SK itu,* smooth *kan Jatim (?) Selesai kan masalahnya (Ahmadiyah) (?)*," tegas Kasno membanggakan kesuksesan SK tersebut. [38]

Argumentasi Kasno sebagaimana dipaparkan di atas merupakan argumentasi resmi Pemprop Jatim. Dalam sebuah kesempatan berbicara di media massa, Soekarwo juga menegaskan bahwa Jatim aman dan tetap kondusif karena adanya SK tersebut.[39]

Argumentasi demikian tentu sepenuhnya dipahami oleh kalangan *human rights defender*. Bambang Budiono (Direktur Pusham Unair) misalnya, mengakui bahwa usaha melegitimasi SK Ahmadiyah salah satunya memang dengan logika keamanan. Meski begitu, dosen FISIP Unair ini tetap kokoh pada pendiriannya bahwa, apa pun argumentasi pemerintah, kebijakan tersebut tetap merupakan kebijakan diskriminatif dan inkonstitusional.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, *"Apapun argumentasinya, menurut saya, kalau negara mengambil pilihan seperti itu, negara kemudian tunduk pada kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak bersandar pada Ketuhanan yang maha Esa dan nilai-nilai kebangsaan yang mentoleransi kemajemukan vertikal. Akibatnya, negara kemudian mengambil pilihan untuk mendiskriminasi yang lemah karena negara tunduk pada kekuatan mayoritas."*[40]

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011. Pergub ini lahir setelah adanya kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, 6 Februari 2011 yang menewaskan 3 Jamaah Ahmadiyah. Pascatragedi itu, Pemerintah Daerah seolah berlomba-

38 *Ibid*.

39 http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/03/30/47088/Gubernur-Soekarwo-Jatim-Aman-Setelah-SK-Ahmadiyah-Keluar

40 Wawancara dengan Bambang Budiono pada 5 Agustus 2011, pukul 15.00 – 17.00 WIB.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 40 11/1/2011 5:38:00 AM

lomba membuat Perda.[41] Gubernur Jabar pun ikut menerbitkan Pergub larangan aktivitas Ahmadiyah.[42]

Seperti tertuang di dalamnya, Pergub ini bertujuan mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Namun hanya berselang satu hari setelah Pergub ditetapkan pada 2 Maret 2011, puluhan warga Bunijaya, Gununghalu, Bandung Barat, beramai-ramai membongkar kuburan seorang Jemaat Ahmadiyah karena tak sudi Tempat Pemakaman Umum (TPU) umat Islam ditempati pengikut Ahmadiyah.[43]

Alih-alih menghentikan pelbagai macam aksi kekerasan atas nama keyakinan, paskapenerbitan Pergub tersebut kelompok warga atau ormas malah kian giat bergerak merangsek ke kantong-kantong pemukiman warga Ahmadiyah. Dengan dalih masih menemukan aktivitas Ahmadiyah yang menyimpang, mereka melakukan intimidasi, ancaman perusakan, pembakaran dan meminta warga Ahmadiyah menghentikan segala aktivitasnya termasuk ibadah shalat. Mereka juga memaksa warga Ahmadiyah bertaubat dan keluar dari Ahmadiyah. Ini terjadi di berbagai wilayah di Jabar, khususnya di Garut, Tasikmalaya dan di wilayah

41 Merebaknya Perda pelarangan Ahmadiyah memunculkan dugaan adanya strategi desa mengepung kota. Saat itu tuntutan pembubaran Ahmadiyah sangat deras mengalir ditujukan kepada Presiden. Diduga untuk membagi beban Ahmadiyah, maka dibuatlah Perda-Perda sehingga pada ujungnya nanti Presiden tinggal membuat Keppres.

42 Pergub No. 12 Tahun 2011 berisi tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Isi larangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 3, adalah: (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. (2) Aktivitas/kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi: a. penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik; b. pemasangan papan nama organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia di tempat umum; c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia; dan d. penggunaan atribut Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.

43 Poskota.co.id, 03/03/2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 41 11/1/2011 5:38:00 AM

Bandung seperti telah diungkap di atas.[44]

Menyusul terbitnya Pergub di atas, Operasi Sajadah yang digagas Kodam III Siliwangi segera diluncurkan. Operasi yang menyulut kontroversi ini dimaksudkan sebagai pembinaan untuk mengajak warga Ahmadiyah kembali pada ajaran Islam yang benar. Namun pelaksanaannya operasi tersebut berjalan represif.

Sejumlah kalangan mengkritik keras keterlibatan TNI dalam Operasi Sajadah. Pola keterlibatan TNI dalam operasi ini mencakup; (1) TNI aktif untuk meminta data Jemaat Ahmadiyah, anggota, stuktur kepengurusan dan ajaran; (II) TNI aktif untuk mendesak Jemaat Ahmadiyah keluar dari Ahmadiyah dan melakukan ikrar pertaubatan; (III) TNI bersama kepolisian dan aparatur pemerintah dan ormas memaksakan untuk menguasai masjid dengan menjadi imam shalat Jum'at.[45]Beberapa pihak seperti Imparsial, melihat TNI telah melanggar UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena keterlibatan dalam aksi Pemda Jabar ini mencerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum.

Dedi, Humas JAI Bandung, merasa bahwa Operasi Sajadah kesalahan Pangdam. TNI yang semestinya berada di tengah dan netral justru masuk ke dalam urusan agama. Apa lagi dengan adanya pendataan, Dedi terbayang tragedi 65 dimana orang-orang PKI didata lalu ditandai daerah-daerahnya. Menurutnya, Jamaah Ahmadiyah merasa trauma dimana mereka didatangi ke

44 Juru Bicara JAI Priangan Barat, Rafiq Ahmad, mengatakan, tindakan anarkis kepada jamaahnya terus bertambah setelah ada Pergub. Sedikitnya tujuh kejadian menimpa JAI dengan kasus berbeda. Perusakan Mesjid Ahmadiyah di Cipeuyeum Kabupaten Cianjur, 8 rumah warga JAI di Kabupaten Bogor, penutupan madrasah di Jampang Kabupaten Sukabumi. Jemaah di Majalengka tidak bisa ibadah karena masjidnya dibakar dan rumah yang dipakai beribadah akhirnya disegel warga. Selain gesekan dengan warga, JAI juga kerap berhadapan dengan aparat pengawas aktivitas Ahmadiyah, terutama TNI dan Polri. Kasus tersebut terjadi di Binong Subang, Sumedang, dan beberapa daerah lainnya di Jabar. Modusnya yakni mengundang ke sebuah acara, tetapi dalam acara tersebut JAI dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, seperti dikutip Inilahjabar.com, Rabu, 16/3/2011.

45 Imparsial, 14/03/2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 42 11/1/2011 5:38:00 AM

rumah-rumahnya oleh aparat TNI. Mereka didata dan diintimidasi untuk keluar dari Ahmadiyah oleh aparat kepolisian dan Koramil. Ini seperti terjadi di Garut dan Tasikmalaya, juga daerah-daerah lainnya di Jabar.

Pergub larangan aktivitas Ahmadiyah ini juga tak lepas dari pro dan kontra. Penolakan datang dari kelompok-kelompok pembela HAM yang selama ini membela hak-hak warga Ahmadiyah berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi. AKUR (Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama) yang merupakan aliansi puluhan organisasi pemuda, mahasiswa dan NGO lintas agama, menyayangkan keluarnya Pergub ini. Akur menilai Pergub ini sebagai intervensi pemerintah yang tidak adil bagi Ahmadiyah. Menurutnya, apapun ideologi dan keyakinan tidak akan pernah bisa dikerangkeng.[46]

Penolakan senada muncul dari ALJABAR (Aliansi Masyarakat Jawa Barat). ALJABAR menilai Gubernur gegabah menerbitkan Pergub larangan kegiatan Ahmadiyah. Karena dikhawatirkan Pergub itu dapat melanggengkan praktik diksriminasi dan intolerasi dan bisa memicu konflik horizontal serta ketegangan di Jabar.

ALJABAR menegaskan semestinya Gubernur menunggu pemerintah pusat karena persoalan ini domainnya pemerintah pusat. “Kami menentang keras Pergub tersebut. Sebab tidak semua warga Jabar menginginkan Ahmadiyah dilarang,” demikian disampaikan ALJABAR dalam konferensi persnya di Kantor Nahdalatul Ulama (NU) Kota Bandung.[47]

ALJABAR merupakan gabungan dari sejumlah elemen masyarakat Jabar.Diantaranya Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama (AKUR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Pagar Nusa, Institute for Culture and Religion Studies (INCReS), Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) dan yang lainnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBHB), Gatot Rianto, menyatakan prihatin atas terbitnya Pergub tersebut.

46 http: //www.detik.com, 03/03/2011.

47 http: // www.detik.com, 07/03/2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 43 11/1/2011 5:38:00 AM

Ia menyatakan bahwa ini adalah bentuk nyata pelanggaran berupa diskriminasi dan tindakan melanggar hak dasar manusia, sebagaimana dimaksud pasal 18 ICCPR atau pasal 18 UU No.12 Tahun 2005 dan ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perlakuan diskriminatif seperti ini sangat mengkhawatirkan karena negara tidak bisa berdiri di atas semua golongan dan melindungi semua golongan.[48]

Menurutnya, meskipun pertimbangan yang digunakan dalam Pergub tersebut bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah memiliki kewenangan menindaklanjuti SKB tiga menteri No. 3 Tahun 2008, itu tidak bisa diterima. Karena SKB tiga menteri itu sendiri bertentangan dengan ketentuan UU HAM yang menyatakan pengurangan tentang HAM hanya bisa dilakukan dengan undang-undang, tidak dengan SKB, tidak degan Pergub. Undang-undang juga harus dibuat dengan tidak karena desakan.

Sementara dukungan terhadap Pergub juga mengalir. Salah satunya dari API (Aliansi Pergerakan Islam). Dalam pernyataannya mereka menegaskan siap mengambil alih masjid milik Ahmadiyah pascakeluarnya Pergub No. 12 Tahun 2011. "*Kita keberatan kalau tempat ibadahnya disebut masjid. Kalau masih menggunakan nama masjid, kita akan ambil alih*," kata Koordinator API Jabar Asep Syarifudin di gedung DPRD Jabar.[49]

Menurutnya, masjid merupakan tempat ibadah milik umat Islam. Sementara Ahmadiyah jelas bukan umat Islam karena menyimpang dari syariat yang ada. Asep menerangkan, tindakan itu bukan berarti pengekangan atau diskriminasi. Namun lebih kepada pembelaan umat Islam atas akidahnya yang dinilai telah dirusak oleh Ahmadiyah.

Apa yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur (sebagaimana di atas) seakan terulang di Sulawesi Selatan. Pada 18 Februari 2011, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk merespons tuntutan ormas-ormas

48 Wawancara dengan Gatot Rianto, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBHB), 18/07/2011.

49 www.detik.com, 04/03/2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 44 11/1/2011 5:38:00 AM

Islam agar Ahmadiyah dibubarkan di Sulawesi Selatan. Surat Edaran Gubernur Nomor: 223.2/803/Kesbang itu bersifat rahasia. Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Juni 2008.

Salah satu isi surat edaran tersebut adalah memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat ahmadiyah (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Sigi (salah sati basis Ahmadiyah di Sulawesi Tengah), contohnya, mengeluarkan surat edaran pada tanggal 25 Februari. Salah satu isi dalam surat edaran tersebut adalah; rumah ibadah yang digunakan oleh Jamaah Ahmadiyah segera dibekukan; Jamaah Ahmadiyah untuk dapat melebur diri dengan pemeluk agama Islam yang ada di sekitarnya; memegang teguh surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri; ustaz Jemaat Ahmadiyah atas nama Nanang. S yang berasal dari Bogor Jawa Barat segera kembali ke daerah asalnya terhitung mulai 25 s/d 26 Februari 2011; diharapkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Donggala untuk dapat melakukan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Sigi.

Pun demikian dengan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Pada tanggal 24 Maret 2011, Gubernur Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera mengeluarkan larangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sumbar melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011. Disebutkan bahwa Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengan Muspida Sumbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), serta beberapa ormas di Sumbar, di Gubernuran Sumbar, pada 18 Maret lalu, dan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008 Nomor

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 45 11/1/2011 5:38:00 AM

3 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.[50]

Gubernur Sumbar menyebutkan dengan adanya Pergub tersebut, aktivitas Jemaat Ahmadiyah resmi dilarang di seluruh daerah di Sumatera Barat. Pelarangan tersebut mulai dari larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah dalam bentuk apa pun, penyebaran ajaran Ahmadiyah, larangan pemasangan papan organisasi Ahmadiyah baik di kantor organisasi maupun di rumah peribadatan milik Ahmadiyah, serta larangan bagi Jamaah Ahmadiyah untuk memasang atribut Ahmadiyah dalam bentuk apa pun.[51]

Apa yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendapatkan apresiasi dan pantas ditiru oleh para pemerintah daerah lainnya. Walaupun kerap mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi, justru mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Penyelesaian Ahmadiyah dengan jalan dakwah.

Bahkan Gubernur DIY, Sultan Hamangkubuwono X sebagai pemimpin Yogyakarta tidak mau terjebak dan ikut-ikutan menganggap "sesat" salah satu golongan warganya, yaitu Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan ikut membubarkannya. Walaupun ada desakan dari berbagai ormasi Islam, seperti FPI, HTI, dan MMI, Sultan menunjukkan kepemimpinannya untuk tidak merusak harmoni sosial yang telah terbangun.

Secara diplomatis, Sultan menegaskan, "Pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan Ahmadiyah. Kewenangan tersebut ada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi DIY tidak mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan Ahmadiyah. Pemda tidak punya hak

50 Pendapat Hukum LBH Padang, kritik terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Larangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat.

51 Isi Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 46 11/1/2011 5:38:00 AM

membubarkan Ahmadiyah, karena hal semacam itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata Sultan, hanya berwewenang mengendalikan penyebaran ajaran Ahmadiyah seperti yang tertuang dalam SKB 3 Menteri".[52]

2. Pemaksaan Pindah Keyakinan

Tindakandiskriminatif dalam bentuk pemaksaan pindah keyakinan/ pertaubatan paksa adalah bentuk kedua diskriminasi lanjutan terhadap Ahmadiyah. Dalam beberapa waktu terakhir, terutama paskatragedi Cikeusik, tindakandiskriminatif dalam bentuk pertaubatan paksa banyak ditemukan di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat.

Di daerah Tasikmalaya, contohnya, kerap terjadi pertaubatan secara paksa. Enam anggota JAI Tasikmalaya dikabarkan ditaubatkan. Pertaubatan tersebut dilakukan di Mesjid Agung Tasikmalaya yang dipimpin Ketua DPD FPI Jabar, Abdul Kahar, Selasa, 12 Juli 2011. Kahar menyatakan anggota JAI tersebut bertaubat tidak dalam tekanan. [53] Habib Riziq Shihab yang turut hadir dalam acara itu memberikan pernyataan bahwa hingga saat ini sudah 324 jemaat Ahmadiyah kembali ke Islam dan 4.170 masih menganut Ahmadiyah.[54]

Menurut Dedi (Humas JAI), setelah dilakukan konfirmasi ke pengurus JAI Tasikmalaya, "pertaubatan" tersebut memang terjadi dan mereka memang anggota Ahmadiyah. Namun enam orang tersebut adalah anggota yang sudah tidak aktif karena sudah tidak melaksanakan lagi ketentuan-ketentuan organisasi. Pertaubatan tersebut juga terjadi karena disertai unsur paksaan.[55]

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di daerah Garut. Pada tanggal 11 Agustus 2010, bertempat di Mesjid Nurul Huda Kampung Sukarame, sekitar 80 Jamaah Ahmadiyah membacakan

52 http://nasional.kompas.com/read/2011...rkan.Ahmadiyah

53 Pikiran-rakyat.com, 12/07/2011.

54 www.pikiran-rakyat.com, 12/07/2011.

55 Wawancara dengan Dedi Suherman, 16/07/2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 47 11/1/2011 5:38:00 AM

syahadat sebagai tanda kembali ke Islam yang benar di hadapan ulama, unsur pemerintah, dan ratusan warga.[56] Ikrar pertaubatan ini berawal dari serangkaian serangan sekelompok orang dari luar Cigedug. Mereka melakukan intimidasi, teror dan ancaman pembakaran fasilitas warga Ahmadiyah.[57]

Kegiatan hampir sama juga terjadi di sela-sela kegiatan dialog dan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah di Graha Intan Balarea, Garut (30 Maret 2011). Kegiatan dialog dimulai dengan pernyataan kembalinya lima pengikut ajaran Ahmadiyah kepada ajaran Islam yang lurus. Mereka menyatakan kekhilafannya telah menjadi pengikut Ahmadiyah dan mereka pun bersyahadat kembali.

Kelima pengikut Ahmadiyah itu adalah Rohimat (55), Encu (87), Siti Nurjanah (45), Juju (46) dan Cicih (55). Mereka adalah warga Kampung Pangauban, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Ikrar pertaubatan itu dipandu Ketua MUI Kabupaten Garut, KH. Agus M Soleh. Turut hadir Bupati Garut Aceng HM Fikri, unsur Muspida dan ratusan tamu undangan yang memadati Graha Intan Balarea.[58]

Sebelum berujung pertaubatan lima warga itu, sama halnya seperti di Cigedug, warga Ahmadiyah Pangauban tersebut juga diawali dengan pengejaran oleh sekelompok massa. Mereka men-*sweeping* warga Ahmadiyah di sana untuk ditaubatkan. Hingga sekarang, terdapat sekitar 30 keluarga Ahmadiyah masih eksodus ke luar kampung karena takut. Mereka diancam dan hanya bisa kembali ke kampungnya jika mau bertaubat. Kini mereka tinggal berpencar di rumah saudara-saudaranya. Ada yang di Sulawesi, Lampung, dan Bandung.[59]

Begitu juga dengan yang terjadi di Bandung. Menurut Dedi, di Bandung juga pernah digelar acara pertaubatan warga Ahmadiyah.

56 Pikiran-rakyat.com, 11/08/2011.

57 Wawancara dengan Cecep Ahmad Santosa, Ketua JAI Garut dan Jafar Ahmad, Mubalig Ahmadiyah Garut, 21/07/2011.

58 Tribunnews.com, 30/03/2011.

59 Wawancara dengan Dedi Suherman, 16/07/2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 48 11/1/2011 5:38:01 AM

Sekitar bulan Maret lalu di Masjid Al-Ukhuwah Wastukencana Kota Bandung, beberapa warga Ahmadiyah diminta membaca syahadat kembali sebagai tanda keluar dari Ahmadiyah. Namun menurut Dedi, itu pun sama seperti di Tasikmalaya, mereka warga Ahmadiyah yang sudah tidak aktif dan ada unsur paksaan. Karena sebelumnya mereka didatangi oleh salah satu ormas ke rumah mereka masing-masing.[60] Secara konstitusional, pertaubatan secara paksa tak dapat dibenarkan. Mengingat pertaubatan seperti ini dilakukan dengan cara memaksakan pendapat dan kehendak dari pihak tertentu kepada pihak lain.

Secara normatif-keagamaan, pertaubatan secara paksa pun tak dapat dibenarkan. Karena taubat pada prisnsipnya adalah adanya kesadaran dari seseorang akan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karenanya, taubat tak mungkin dilakukan secara terpaksa ataupun dipaksa oleh pihak lain. Bila tidak, maka taubat akan kehilangan esensi utamanya,yaitu kesadaran akan kesalahan yang dilakukan dan komitmen untuk kembali pada ajaran kebaikan.

3. Diskriminasi Layanan Kependudukan

Tindakan diskriminatif berikutnya adalah diskriminasi layanan kependudukan, seperti upaya mempersulit pelayanan surat nikah dan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kuningan, contohnya, pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kantor Kemenag Kuningan untuk tidak mengeluarkan KTP dan tidak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sebagaimana diberitakan Mitra Dialog (11-12/2/2003), sekarang Jemaat Ahmadiyah tidak boleh memiliki Kartu Tanda Penduduk dan KUA harus menolak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia (selama para jemaat tersebut masih

60 www.detik.com, 20/03/2011, merilis berita bahwa akan ada sedikitnya enam anggota Ahmadiyah Kota Bandung yang bertaubat. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Dewan Syuro Front Umat Islam (FUI), Hilman Firdaus. Prosesi pertaubatan akan dilakukan di Masjid Al-Ukhuwah, dan akan dihadiri Walikota Bandung Dada Rosada.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 49 11/1/2011 5:38:01 AM

menganut kepercayaan Ahmadiyah). Akibat dari kebijakan ini, sekitar 101-an pasang Jemaat Ahmadiyah yang melangsungkan pernikahan tidak terdaftar di KUA setempat.[61]

Menurut Bapak Uba, Jemaat Ahmadiyah Manis Lor, isu yang berkembang adalah bahwa pihak PPN (Petugas Pencatat Nikah) bisa mengeluarkan surat pengantar nikah asal yang bersangkutan mau mengeluarkan biaya adminitrasi sebesar Rp 1.5 juta.[62]

Berbagai bentuk diskriminasi yang diterima Ahmadiyah Manis Lor tersebut, bermula dari adanya SKB (surat keputusan bersama) yang dikeluarkan pada 3 Nopember 2002 tentang Pelarangan Aliran/Ajaran JAI di wilayah Kuningan. SKB ini ditandatangani oleh Bupati Kuningan (Arifin Setiamihardja), Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan (Ading Ahjadi), Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan (R. Effendi, SH), Komandan Kodim 0615 (Letkol Harry Suharyanto), Kapolres Kuningan (Drs. Hasanudin), Sekda Kuningan (H. Aan Suharso), Kandepag (Drs, H.MA. Syarifudin), Ketua FKPP Kuningan (KH. Dodo Murtadlo, Lc), Ketua MUI Kuningan (KH. Drs. Hafidin Achmad), PD Muhammadiyah (Drs. H. Uri Mashuri), PCNU (Machfud Silahuddin), DPC GUPPI (Drs. Diding Wahyudin), dan beberapa tokoh agama seperti H. Enuy Masnui, Drs. H. Sukardi, Drs. H.S.A. Saputra, PP Mathlaul Anwar (KH. D.N Abdul Dunun), GAMAS (KH. Udi Samanhudi), Robithah Ma'ahid Islamiyah (KH. Kholil Anwar), MDI (H. ME. Wasman, BA), STAI Al-Ihya (Drs. H. Fenny Rahman, M.Pd), Thariqoh Idaroh Syu'biyah (KH. Endang Samsudin).

Tembusan SKB ini ditujukan kepada Mendagri, Menag RI, Jakgung RI, Ketua MUI Pusat dan Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Kepada kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kepala Kantor wilayah Depag.

Setelah keluarnya SKB ini, Bakorpakem Kuningan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat tertanggal 3

61 Daerah yang menerima pernikahan Jamaah ahmadiyah yaitu Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang dan Cirebon. Lihat Rosyidin dan Ali Mursyid, Diskriminasi Hak Sipil Minoritas: Pelarangan Pencatatan Pernikahan Ahmadiyah Kuningan dalam Ahmad Suaedi, dkk, Politisasi Agama dan Konflik Komunal; beberapa isu penting di Indonesia, (Jakarta: the wahid institute, 2007), 53.

62 Wawancara, 15/2/2006.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 50 11/1/2011 5:38:01 AM

Desember 2002. Isi surat tersebut antara lain (I) meminta kepada Kapolres untuk melakukan penyidikan terhadap pengurus Jemaat Ahmadiyah. (II) meminta Camat dan Kepala KUA agar tidak menikahkan Jemaat Ahmadiyah. (III) meminta kepada Camat agar tidak membuatkan KTP bagi Jamaah Ahmadiyah.

Sebagaimana disebutkan di atas, pasca adanya surat dari Pakem di atas, KUA Jalaksana tidak mau menikahkan Jemaat Ahmadiyah. Sehingga mereka (kalau mau menikah) harus keluar dari Kuningan. Bahkan menurut Bapak Uba, Bupati Kuningan sendiri yang pada awalnya berjajnji akan menghadiri pernikahan anggota jemaat yang menikah, pada akhirnya tidak berani.[63]

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat. Di Sangir, Kabupaten Solok Selatan, contohnya, ada upaya-upaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) memaksa Jamaah Ahmadiyah untuk bertaubat serta meninggalkan ajaran Ahmadiyah.

Di daerah Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti yang masuk wilayah administratif Kabupaten Solok, terjadi pula diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dimana KUA setempat tidak mau menikahkan pasangan anggota Jemaat Ahmadiyah (sebelum mereka menandatangani surat pernyataan keluar dari Jemaat Ahmadiyah).[64]

Tentu masih banyak lagi bentuk perlakuan diskriminatif yang kerap dialami Ahmadiyah selama ini, seperti aksi kekerasan secara fisik, penyerangan terhadap fasilitas milik Ahmadiyah, dan yang lainnya. Tiga macam aksi diskriminatif terhadap Ahmadiyah sebagaimana di atas bisa dipahami sebagai bentuk "evolusi baru" dari diskriminasi yang ada.

63 Pak Uba adalah warga Ahmadi, wawancara 18 Juli 2011.

64 Keterangan Mudasyir Achmad Surbakti, Mubalig Ahmadiyah wilayah Sumatera Barat, 20 Juli 2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 51 11/1/2011 5:38:01 AM

B. Masyarakat Menerima Ahmadiyah

Pelbagai macam lonjakan tindakandiskriminatif sebagaimana di atas sangat ironis. Karena pelbagai macam aksi kekerasan dan diskriminasi yang dialami Ahmadiyah dalam beberapa waktu terakhir berlawanan dengan sikap mendasar masyarakat yang menerima keberadaan Ahmadiyah.

Penerimaan masyarakat terhadap Ahmadiyah setidaknya bisa dibuktikan melalui dua hal. *Pertama,* sejarah awal masuknya Ahmadiyah ke Indonesia yang hampir tanpa resistensi berarti dari masyarakat. Begitu juga dengan realitas bahwa mereka yang menolak dan melakukan aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah hanyalah segelintir orang yang selama ini identik dengan gerakan-gerakan kekerasan.

Apa yang terjadi di Yogyakarta bisa dijadikan sebagai salah satu bukti dari yang telah disampaikan. Menurut Nanang Sanusi[65] (salah seorang mubaligh JAI Yogyakarta), Ahmadiyah Qodian telah datang ke Indonesia sejak tahun 1925. Secara historis, tahun 1925 Ahmadiyah masuk ke Indonesia melalui Aceh. Ahmadiyah bersama-sama dengan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut Nanang Sanusi, Ahmadiyah sudah lama di Indonesia, yaitu mengalami masa perjuangan, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang Orde Reformasi.

Ahmadiyah Qodian di Yogyakarta tercatat sejak tahun 1945-an, yaitu paskakemerdekaan Indonesia. Menurut Nanang Sanusi, sejarah Ahmadiyah di Yogyakarta ada kaitannya dengan gedung yang saat ini ditempati sebagai Kantor Sekretariat JAI Wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, yaitu terletak di Jl. Atmosukarto Kota BaruYogyakarta (sebelah timur Stadion Kridosono).

Diceritakan pada waktu itu ada mubalig Ahmadiyah dari Pakistan, Sayid Rahman Al Zailani. Al Zailani adalah pembantu Presiden Sukarno yang diserahi tugas mempropagandakan

65 Wawancara dengan Nanang Sanusi, Mubalih JAI Yogyakarta, tanggal 15 Juli 2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 52 11/1/2011 5:38:01 AM

kemerdekaan Indonesia ke luar negeri melalui RRI Kota Baru Yogyakarta. Beliau menyiarkan proklamasi dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggris.

Oleh karenanya, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka yang terlebih dahulu menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia adalah India. Karena jasanya, Sukarno pun menghadiahkan suatu tempat kepada Sayid Rahman, yang sekarang dijadikan sebagai Sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yogyakarta. Di sini dapat ditegaskan, Ahmadiyah Qodian sudah lama berada di Yogyakarta dan selama itu pula (menurut Nanang Sanusi) orang-orang Ahmadiyah berinteraksi dan membaur secara baik dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan dengan umat yang beragama selain Islam sekalipun.

Hal yang kurang lebih sama juga dapat dijumpai di Jawa Timur, khususnya daerah Surabaya. Jamaah Ahamdiyah di Jatim sudah melakukan kiprah organisasinya sejak 1950-an. Ini bisa dilacak dari keberadaan Masjid Al-Nur di kampung Bubutan Gang I No. 02, RT 01/RW XIII Kelurahan Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan. Masjid Ahmadiyah tertua tersebut diperkirakan dibangun sejak sejak tahun 1950-an.

Saat ini, Jemaat Ahmadiyah di Jatim tersebar di 10 kabupaten/kota di Jatim. Selain di Surabaya, Jemaat Ahmadiyah juga tersebar di Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Gresik, Kediri, Jember, dan Banyuwangi. Diperkiraan jumlah populasi Jemaat Ahmadiyah tidak lebih dari 2500 orang dengan sebaran di masing-masing daerah sekitar 200-300 orang. Jamaah paling banyak tentu berada di Surabaya yang memusatkan aktivitasnya di Masjid Al-Nur.

Sejak tahun 1950-an, Jemaat Ahmadiyah cukup membaur dengan masyarakat. Di tengah masyarakat Jatim yang egaliter, terbuka, dan toleran, Jemaat Ahmadiyah hampir tidak memiliki hambatan yang berarti untuk hidup berdampingan dengan komponen masyarakat lainnya. Penting dicatat, Masjid Al-Nur hanya berjarak sekitar 150 meter dari Masjid MMI Surabaya, dan sejak pertama berdiri tidak ada gesekan apa pun yang melahirkan konflik horizontal. Masjid tersebut juga digunakan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 53 11/1/2011 5:38:01 AM

sebagai tempat ibadah oleh masyarakat sekitar di luar Jemaat Ahmadiyah.

Begitu pula dengan Masjid An-Nashr di daerah Gedangan, Sidoarjo. Masjid tersebut menjadi tempat beribadah masyarakat sekitar di luar Jamaah Ahmadiyah. Masyarakat sekitar masjid Ahmadiyah umumnya juga tidak memiliki hambatan untuk hidup membaur dengan Jemaat Ahmadiyah.

Sentimen terhadap Ahmadiyah di Jatim baru terjadi pada tahun 2008 menjelang dan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 3 tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, pada 9 Juni 2008.

Menjelang dikeluarkannya SKB di atas, sejumlah pengasuh pondok pesantren di Pasuruan, mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Roudlotul Ma'ruf Al-Hasaniyah, Kota Pasuruan (Sabtu, 26 April 2008). Pertemuan itu dilakukan untuk menyatukan sikap terkait dengan keputusan Bakorpakem bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Para kiai ini mendesak pemerintah untuk membubarkan dan melarang setiap bentuk kegiatan Ahmadiyah. Mereka menginginkan keputusan Bakorpakem tersebut menjadi keputusan final yang tidak perlu dinegosiasikan lagi dengan pihak-pihak yang tidak menyetujui.[66]

Selain pertemuan tersebut, Habib Abdurrahman atas nama FPI Jatim juga mengadakan musyawarah dengan para kiai dan habaib se-Jatim di Ponpes An-Najiyah, Sidosermo Dalam, Surabaya, (Kamis, 1 Mei 2008). Hadir dalam pertemuan tersebut KH. Abdullan Faqih dari Ponpes Langitan, Tuban; KH Miftakhul Akhyar; Gus Junaidi Ath Thayyibi Tim Advokasi Forum Ulama Indonesia (FUI) Jakarta, dan; KH Mas Yusuf Muhajir pengasuh Ponpes An Najiyah. Para kiai-habaib yang sebagian besar dikenal tergabung dalam Dewan Imamah Nusantara (DIN) ini mendesak pemerintah karena sejak Bakorpakem mengeluarkan keputusan tentang Ahmadiyah (16

66 Ahmad Zainul Hamdi dan Wahyuni W. Shelter untuk Warga JAI Jatim. Laporan hasil investigasi, Mei 2008. Tidak dipublikasikan.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 54 11/1/2011 5:38:01 AM

April 2008) hingga pertemuan tersebut dilaksanakan, belum ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah. Forum ini tidak sekadar mendesak pemerintah agar melarang keberadaan Ahmadiyah, namun juga merekomendasikan agar pemerintah memberikan sanksi yang tegas atas keberadaannya.[67]

Sesudah SKB Tiga Menteri terbit, hampir tidak ada lagi gejolak yang berarti di Jatim. Bila di berbagai daerah lain di Indonesia, peristiwa kekerasan dan pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah meningkat tajam sesudah terbitnya SKB, sebaliknya di Jatim Jemaat Ahmadiyah tetap bisa melakukan aktivitas ibadah seperti biasa. Sesudah SKB terbit, tidak terjadi sekalipun aksi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jatim. Pada saat itu, Jemaat Ahmadiyah Jatim memilih bersikap kompromis terhadap isi SKB. Bahkan pada 12 Juli 2008 bertempat di Masjid Al-Nur, pengurus JAI Jatim melakukan sosialisasi isi SKB kepada para jamaah. Acara sosialisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara anggota jamaah berkaitan dengan sikap JAI terhadap isi SKB, sekaligus mengantisipasi agar jamaah tidak melakukan aktivitas yang dapat dijerat oleh pasal-pasal SKB. Pengurus JAI meyakinkan, meski ada SKB jamaah tetap bisa melakukan ibadah dan aktivitas organisasi seperti biasa sebab SKB hanya melarang Jemaat Ahmadiyah melakukan syiar.[68]

Sesudah SKB keluar, Jemaat Ahmadiyah tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Penting dicatat, sejak 2008 Jemaat Ahmadiyah Jatim semakin menyadari posisinya sebagai minoritas, dan kesadaran inilah yang mendorong mereka semakin membaur di masyarakat. Di jaringan *civil society,* pengurus JAI juga terlibat secara aktif dalam kampanye toleransi dan kebhinnekaan. Paling tidak, sampai saat ini JAI menjadi bagian aktif dalam Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan (JAMAK) Jatim, sebuah aliansi LSM, agamawan, akademisi yang menaruh perhatian pada isu toleransi dan kebhinekaan di Jatim.

---

67 Surya edisi Jum'at, 2 Mei 2008.

68 Akhol Firdaus dan Ahmad Zainul Hamdi. Sekilas tentang JAI Jawa Timur Sebelum dan Seduah SKB (Laporan hasil wawancara dengan Ma'sum Ahmad, Shd--Pengurus Jemaat Ahmadiyah Jatim), Juli 2006. Tidak dipublikasikan.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 55 11/1/2011 5:38:01 AM

Pun demikian dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Menurut Mudasyir (mubaligh JAI Sumbar), Ahmadiyah masuk ke Sumatera Barat pada tahun 1926 yang dibawa oleh Maulana Rahmad Ibrahim melalui Aceh. Pada awal kedatangan Ahmadiyah ke Sumbar tidak ada perlawanan fisik yang diterima oleh warga/Jamaah Ahmadiyah. Yang terjadi hanyalah pertentangan ilmu dalam beberapa kali dialog. Ditambahkan oleh Mudasyir, pelarangan Ahmadiyah pertama kali terjadi pada tahun 1980-an dimana waktu itu MUI yang dipimpin oleh Buya Hamka mengeluarkan Fatwa bahwa Ahmadiyah non-Muslim dan sesat berdasarkan kajian 9 (Sembilan) buku yang diterbitkan oleh Ahmadiyah.

Sejak keluarnya fatwa MUI pada tahun 1980-an itu, sampai dengan tahun 2004, Jamaah Ahmadiyah di Sumatera Barat tetap aman dan masih dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasa seperti ibadah. Namun paskareformasi, tepatnya pada tahun 2004, terdapat beberapa kali aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam yang dipimpin oleh Irfianda Abidin, Mat Acin dan Amri Mansyur. Namun aksi yang mereka lakukan tidak sampai pada tingkat pengrusakan ataupun tindakan penganiayaan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Aksi-aksi tersebut berlangsung pada tahun 2004, 2007 dan tahun 2008. Tindakan yang ekstrim baru sebatas pembongkaran papan nama Ahmadiyah di beberapa daerah, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Paskakejadian Cikeusik, kondisi Ahmadiyah di Sumbar tetap aman. Bahkan tidak ada aksi-aksi yang menjurus pada tindak pidana. Mudasyir menjelaskan, paskatragedi Cikeusik, ia sempat diundang oleh Walikota Padang untuk datang ke Rumah Walikota. Walikota Padang memberikan semangat kepada Ahmadiyah supaya tidak terpancing dengan kejadian Cikeusik, dan tetap saja melakukan kegiatan seperti biasa. Walikota juga menegaskan bahwa ia tidak akan membuat surat edaran untuk melarang keberadaan warga Ahmadiyah di Kota Padang.

Mudasyir Ahmad, dalam wawancara menyebutkan bahwa ketika lebaran Haji (Idul Adha) Ahmadiyah membagi-bagikan hasil korban kepada masyarakat di sekitar lingkungan Masjid, dan masyarakat menyatakan senang mendapatkan daging dari

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 56 11/1/2011 5:38:01 AM

Ahmadiyah. Bahkan lanjut Mudasyir, ketika ada masyarakat yang hajatan/kenduri/kawinan, mereka juga diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dengan demikian jelas, bahwa tidak ada bentuk penolakan masyarakat terhadap aktivitas Ahmadiyah, terutama di Kota Padang dan Sumatera Barat.

Ahmadiyah Kota Padang, sampai saat ini masih menjalankan program donor darah yang dilaksanakan rutin setiap bulannya. Palang Merah Indonesia (PMI) rutin datang ke Sekretariat Ahmadiyah dan warga Ahmadiyah ikut menjadi pendonor buat PMI. Selain kegiatan sosial itu, warga Ahmadiyah juga ikut dalam merespons terjadi bencana alam, dan tidak pernah ada yang menolak bantuan yang diberikan oleh Ahmadiyah.

Dari hasil survei yang dilakukan, ternyata banyak masyarakat yang tidak paham dengan Ahmadiyah. Mereka mengaku hanya melihat melalui televisi dan mendengar bahwa Ahmadiyah sesat. Namun ketika ditanya kesesatan seperti apa?Warga yang disurvey rata-rata menyebutkan tidak tahu.

Hal yang lebih ironis lagi adalah karena pelbagai macam aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah justru kerap terjadi setelah era reformasi. Sebagaimana diakui oleh Nasrudin, sebelum reformasi, komunitas Ahmadiyah merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan dan keyakinan ke-ahmadiyah-annya. Meskipun, menurut Nasrudin, konflik antara kaum Ahmadi dan non-Ahmadi sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun konflik tersebut tidak mengarah pada kekerasan fisik.[69] Setelah reformasi, Ahmadiyah mendapat serangan, hujatan dan kekerasan dari berbagai kelompok keagamaan Islam termasuk pemerintah.

Kekerasan yang terjadi berupa perusakan masjid, fasilitas pendidikan, pembakaran rumah, pengusiran dari kampung halaman, dan kekerasan lainnya. Melalui menteri terkait, pemerintah melakukan reaksi dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam

69 Nasrudin (51) adalah penggerak dan pendiri GERAH (gerakan anti Ahmadiyah). Wawancara, 21 Juli 2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 57 11/1/2011 5:38:01 AM

Negeri dan Jaksa Agung.[70] SKB ini dikeluarkan sebagai puncak dari polemik pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait JAI. Sebelumnya beberapa daerah seolah berlomba menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Muspida setempat serta didukung oleh ormas yang ada, untuk melarang aktivitas JAI di wilayahnya. Seakan tak mau ketinggalan, MUI juga mengeluarkan fatwa ulangan pada tahun 2005 yang menegaskan bahwa Aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan.[71]

Paskakeluarnya SKB dan fatwa di atas, eskalasi kekerasan

70 SKB yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2008 ini, berisi 6 butir berisi (1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan; penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokokpokok ajaran agama islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.; (3) Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya; (4) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI); (5) Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; (6) Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah Untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini; (7) Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

71 Fatwa yang ditetapkan pada 28 Juli 2005 ini berisi tiga butir yaitu (1) Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq *(al-ruju' ila al-haqq)*, yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis; (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 58 11/1/2011 5:38:01 AM

terhadap JAI justru semakin meningkat. Kelompok penentang semakin merasa memiliki legitimasi baik dari sisi hukum maupun agama dalam melakukan aksinya. Karena baik pemerintah maupun lembaga keagamaan seperti MUI, sama-sama melarang dan menganggap Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Sehingga seakan tak terbendung, kelompok-kelompok Islam radikal semakin leluasa mengintimidasi bahkan melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas keagamaan. Bahkan harta benda serta nyawa anggota Jamaah Ahmadiyah pun dianggap halal.

Oleh karenanya, Burhanudin Buldan, muballigh Ahmadiyah Cirebon, menilai bahwa kebijakan pemerintah baik berupa SKB, Pergub maupun lainnya justru semakin menguatkan kelompok pro kekerasan untuk melakukan penyerangan dan perusakan terhadap Ahmadiyah.[72]

Salah satu komunitas Ahmadiyah yang mendapat kekerasan bertubi-tubi dalam waktu sepuluh tahun terakhir adalah Jemaat Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan Jabar dan Sadasari Majalengka. Kekerasan yang mereka terima seakan tak pernah habis. Dalam catatan Djohan Effendi, Ahmadiyah di Manis Lor, sejak awal kedatangannya sekitar tahun 1952 sudah mendapat tentangan dari masyarakat ketika mereka hendak mendirikan masjid untuk pertama kalinya. Namun karena pengikut Ahmadiyah merupakan kelompok mayoritas di desa Manis Lor, akhirnya kekerasan tidak terjadi dan pendirian masjid dilanjutkan.[73]

Menurut Nasrudin, Ahmadiyah diterima di Manis Lor, karena pada awalnya masyarakat banyak yang tidak paham dengan ajaran Ahmadiyah sehingga mereka menerima saja. Namun setelah mengetahui perbedaan pemahaman keagamaan antara Ahmadiyah dengan paham keislaman pada umumnya, masyarakat yang tidak setuju mulai melakukan gerakan untuk memprotes keberadaan Ahmadiyah dalam berbagai bentuknya. Namun demikian, karena

72 Wawancara, 15 Juli 2011.

73 Lihat Djohan Effendi, Ahmadiyah Qodyan di Desa Manis Lor, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No. 4 Vol. 1, (Jakarta: 1990), 102. Lihat juga Laporan Investigasi tentang Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah, (Jakarta: Kontras & LBH Jakarta, 2008), 33.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 59 11/1/2011 5:38:01 AM

tekanan pemerintah begitu kuat (terutama pada era Soeharto), konflik yang ada tidak sampai terbuka dan muncul ke permukaan. Baru setelah reformasi bergulir dan pintu demokrasi dibuka, ketidaksetujuan sebagian umat Islam terhadap Ahmadiyah disampaikan secara terbuka bahkan dengan aksi kekerasan.[74]

Meski mendapatkan kekerasan bertubi-tubi, baik dari negara, ormas Islam maupun masyarakat, JAI di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, tetap mempertahankan keyakinannya dan beribadah sebagaimana biasanya mengikuti paham Ahmadiyah. Karena kekerasan yang terjadi dalam sepuluh tahun terkahir ini pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh orang di luar Manis Lor dan ekses dari kondisi politik di tingkat nasional dan daerah serta perkembangan gerakan Islam radikal. Beberapa kejadian seperti pada Nopember 2002, Juli 2005, Desember 2007, dan terakhir pada Juli 2010 merupakan peristiwa kekerasan dimana Ahmadiyah Manis Lor menerima ekses dari situasi politik yang memanas serta gerakan Islam radikal yang semakin menguat dan merajalela.

Setelah peristiwa Juli 2010 tersebut sampai sekarang tidak ada lagi peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah. Bahkan peristiwa Cikeusik yang mengakibatkan korban jiwa juga tidak menyulut kekerasan di wilayah ini. Justru pascakerusuhan Cikeusik aparat keamanan semakin berjaga di sekitar fasilitas Ahmadiyah. Mereka khawatir kasus Cikeusik terjadi diwilayahnya.

C. Kesimpulan

Dari yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan, pelbagai macam aksi kekerasan dan diskriminasi yang dialami Ahmadiyah bermuara pada tiga hal sebagai persoalan utama. *Pertama,* ketidaktegasan pemerintah pusat dalam melindungi segenap anak bangsa, apa pun perbedaan agama dan keyakinannya.

Ketidaktegasan pemerintah pusat membuat kelompok-

74 Wawancara dengan Nasrudin, 20 Juli 2011.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 60 11/1/2011 5:38:01 AM

kelompok tertentu semakin berani untuk menjadi hakim jalanan. Bahkan ketidaktegasan pemerintah pusat telah membuat para penegak hukum mengabaikan keadilan, sebagaimana terlihat jelas dalam tragedi Cikeusik.

Apa yang pernah disampaikan oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, kurang lebih mewakili pandangan mayoritas masyarakat terkait dengan persoalan Ahmadiyah, terutama aparat pemerintahan. Bupati Kuningan itu mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil keputusan terkait masalah Ahmadiyah. *"Saya meminta agar penanganan masalah Ahmadiyah secepatnya diselesaikan oleh pemerintah pusat, apa pun keputusannya. Saya di daerah akan mendukungnya, karena pusatlah yang memiliki kewenangan, bukan daerah.*"

Bupati itu juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara kaum Ahmadi dan non-Ahmadi. Karena bagaiamanapun yang menjadi korban adalah rakyat. "*Mereka semua adalah rakyat saya. Baik kaum Ahmadi maupun non-Ahmadi, Saya tidak ingin melihat mereka menderita. Solusinya pemerintah pusat harus cepat mengambil keputusan yang jelas dan tegas.*"[75]

Kedua, Pemda tidak berdaya menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mendiskriminasi anak-warganya sendiri atas nama perbedaan tertentu. Pada era otonomi daerah seperti sekarang, ketidaktegasan pemerintah pusat membuat Pemda kehilangan kendali nasional dan harus berjuang sendirian menghadapi tantangan yang ada di wilayah masing-masing. Padahal Pemda berkepentingan langsung untuk menciptakan stabilitas wilayahnya demi keberlangsungan pemerintahan yang ada.

Oleh karenanya, tidak mengherankan bila dalam beberapa waktu terakhir sejumlah Pemda mengeluarkan pelbagai macam Peraturan Daerah (Perda) yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan di antara Perda yang dikeluarkan secara kasat mata melanggar konstitusi dan mendiskriminasikan anak warganya sendiri, seperti Perda tentang larangan Ahmadiyah.

75 http://radarcirebon.com/2010/07/31/presiden-tanya-soal-ahmadiyah/.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 61 11/1/2011 5:38:01 AM

Ketiga, nihilnya politik kebangsaan. Politik kebangsaan meniscayakan adanya komitmen untuk meletakkan kepentingan semua anak bangsa (apa pun perbedaan mereka) di atas segalanya dengan menjadikan ketentuan konstitusi sebagai panglima.

Inilah komitmen yang hilang dari partai-partai politik mutakhir di Indonesia. Pada umumnya partai politik hanya bekerja untuk kemenangan dan kepentingan kelompok tertentu. Untuk mewujudkan semua kepentingannya, segenap kekuatan politik yang ada kerap tidak keberatan bila harus mengalahkan dan menomorduakan kepentingan kebangsaan yang bersifat lebih besar.

Pelbagai macam aksi kekerasan dan diskriminasi yang terus terjadi hingga hari ini secara telanjang memperlihatkan nihilnya politik kebangsaan seperti di atas. Baik politik pada tingkat nasional ataupun pada tingkat daerah. Alih-alih memastikan terwujudnya hak-hak Ahmadiyah sebagai warga negara, segenap kekuatan politik justru kerap memperlakukan Ahmadiyah secara diskriminatif. Bila tidak, maka mereka memilih diam untuk menghindari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh persoalan Ahmadiyah.[]

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 62 11/1/2011 5:38:02 AM

4
Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita

Sikap intoleran sebagian masyarakat Indonesia terhadap para pengikut Ahmadiyah akhir-akhir ini memperlihatkan kecenderungan yang menguatirkan, bahkan hingga ke tingkat ancaman dan serangan fisik. Penting untuk dicatat bahwa gejala semacam ini tentu saja bukan merupakan satu-satunya peristiwa yang menandai berbagai bentuk sikap intoleran dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap kelompok masyarakat lain. Berbagai bentuk sikap intoleran atas dasar perbedaan identitas agama, suku-bangsa dan etnis memang merupakan salah satu masalah sosial yang cukup menonjol di Indonesia pada era pasca Orde Baru.

Aneka peristiwa semacam itu telah memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah gejala semacam itu merupakan sebuah pertanda bahwa rasa kebangsaan dan politik kebangsaan Indonesia telah terkikis? Apakah nilai-nilai dasar yang telah disepakati sebagai jati-diri bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI tidak dapat berfungsi secara efektif dalam mengkondisikan integrasi sosial di Tanah Air? Atau, apakah terdapat faktor-faktor lain yang mengakibatkan munculnya berbagai sikap dan tindakan intoleran, khususnya yang terjadi pada pengikut Ahmadiyah? Bagaimanakah hari depan hubungan-hubungan sosial di Indonesia?

Untuk menjawab rangkaian pertanyaan tersebut Bab IV buku ini akan menyajikan potret sosial yangbersumber dari survei opini publik di 10 propinsi. Survei ini merupakan bagian dari upaya rekonstruksi sebuah kerangka berpikir tertentu dengan tujuan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 63 11/1/2011 5:38:02 AM

agar alur logika kajian ini memiliki landasan konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, persoalan yang terkait dengan pandangan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap Ahmadiyah akan ditempatkan sebagai fokus utama kajian ini. Atas dasar itu, maka kajian ini pertama-tama akan menelusuri sejauh mana internalisasi dan institusionalisasi pilar-pilar kebangsaan telah 'bekerja' dalam struktur kesadaran maupun tindakan masyarakat Indonesia. Dasar asumsinya adalah bahwa persepsi dan sikap masyarakat terhadap pilar-pilar kebangsaan akan sangat menentukan pandangan mereka terhadap warga Ahmadiyah.

Namun demikian, sekalipun penelusuran sikap masyarakat terhadap pilar-pilar kebangsaan dianggap mampu dalam memberikan penjelasan yang memadai tentang persepsi mereka terhadap Ahmadiyah, upaya semacam itu agaknya memerlukan *variable* lain. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa rangkaian hubungan antara persepsi terhadap pilar-pilar kebangsaan di satu sisi (*independent variable*) dengan persepsi terhadap Ahmadiyah di sisi lain (*dependent variable*) tidaklah bersifat langsung dan serta-merta. Rangkaian hubungan sebab-akibat di antara kedua *variable* tersebut sangat mungkin bersifat kompleks dan multi-arah. Oleh karenanya, kerangka pemikiran yang melandasi kajian ini tidak menempatkan hubungan kedua *variable* tersebut ke dalam determinasi yang ketat, melainkan determinasi relatif. Atas dasar itu, untuk 'menjembatani' kedua *variable* tersebut, maka sikap dan pandangan keagamaan masyarakat akan diletakkan pada posisi *interveningvariable*. Dengan demikian, kuat atau lemahnya hubungan antara kedua variable utama akan dipengaruhi oleh *interveningvariable*. Mengingat persoalan Ahmadiyah secara umum dapat dikategorikan sebagai wilayah keagamaan, maka penelusuran tentang sikap keagamaan masyarakat menjadi relevan dalam kajian ini.

A. Profil Responden

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia di 10 propinsi yang terjaring dalam survei ini merepresentasikan lapisan terbesar masyarakat yaitu kelas menengah bawah dan kelas bawah. Dominasi representasi masyarakat kelas bawah ini tergambar dari mayoritas responden yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 64 11/1/2011 5:38:02 AM

hingga (38.3%) dari seluruh responden dalam survei ini. Selanjutnya berturut-turut SLTA (28,2%), SLTP (17,8%), Diploma/ akademi (2,6%), Sarjana (5,3%). Dalam survei ini juga terjaring sebanyak 7,5% responden yang tidak pernah sekolah. Sedangkan sisanya (0,3%) tidak menjawab/ tidak tahu. Sebaran responden semacam ini menggambarkan kondisi riil masyarakat Indonesia sebagai lansiran data kependudukan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Grafik 1:
Tingkat pendidikan Responden

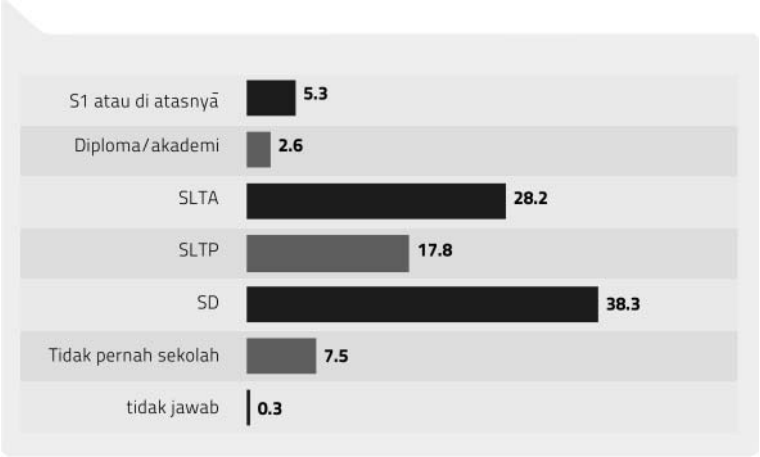

Gambaran dominasi kelas bawah dari responden survei ini juga terlihat dari rata-rata pengeluaran bulanan responden yang sebagian besarnya (42,6%) kurang dari Rp. 500.000,-. Sementara kelompok responden kedua yang pengeluaran bulanannya berkisar 1-2 juta berjumlah (26,7%). Hanya (9,5%) responden yang pengeluaran bulannya di atas Rp. 3.000.000,-.

Gambaran lain yang menunjukkan dominasi kelas bawah dalam lapisan masyarakat kita, survei ini juga menjaring responden dengan komposisi proporsi sebagai berikut: Pekerja Rumah Tangga (26,3%), Karyawan swasta (19,2%), Usaha sendiri (13,8%), Buruh tani/petani (13,1%), Tidak bekerja (5,5%), Buruh; bangunan, cuci, lepas (5,2%), Masih sekolah/kuliah (3,8%), Pegawai negeri (3,5%), Pensiunan (1,4%), Anggota TNI/POLRI (1.0%), Profesional; guru, dokter, wartawan, pengacara, ulama (0,7%), Nelayan (0,5%),

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 65 11/1/2011 5:38:02 AM

Lainnya (0,4%), dan tidak jawab (5,5%).

Responden yang secara sengaja disasar dalam survei ini adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan proporsi masing-masing (50%). Usia responden dalam survei ini sebagian besar adalah mereka yang berada pada usia 26 – 54 tahun (50,3%). Sedangkan yang lainnya masing-masing 17-25 tahun (15,7%), 45-55 tahun (16,9%), dan di atas 56 tahun 17,1%.

Dari sudut Agama survei ini menjaring (95,1%) beragama Islam, Kristen (2,8%), Katholik (1,4%), Hindu (1,0%), Budha (0,6%), dan tidak jawab (0,3%).

Responden tersebar di 10 propinsi dengan proporsi masing-masing dari yang paling banyak, yaitu: Jawa Barat (35,1%), Jawa Timur (30,6%), DKI Jakarta (6,9%), Sumater Selatan (6,9%), Sulawesi Selatan (6,8%), Kalimantan Timur (2,6%), Sumatera Barat (3,4%), Nusa Tenggara Barat (3,4%), DI Yogyakarta (2,6%), dan Sulawesi Tengah (2,6%), Lihat tabel berikut:

Grafik 2:
Sebaran responden

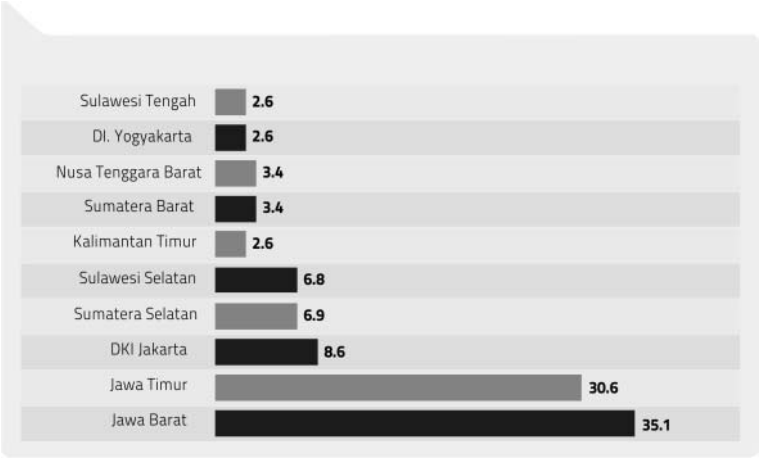

Dari 10 propinsi yang menjadi area survei ini terdapat wilayah-wilayah yang menerbitkan kebijakan pembatasan terhadap Ahmadiyah dan ada juga wilayah yang tidak menerbitkan kebijakan Ahmadiyah. Kebijakan ini bisa dalam bentuk Peraturan Gubernur,

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 66 11/1/2011 5:38:02 AM

Surat Keputusan Gubernur, atau lainnya. Karena itu, selain laporan ini menganalisis berdasarkan propinsi juga menyajikan crosstabullation analisis berdasarkan wilayah yang restriksi (untuk menyebut wilayah yang memiliki kebijakan pembatasan terhadap Ahmadiyah) dan wilayah non restriksi (untuk menyebut wilayah yang tidak memiliki kebijakan pembatasan Ahmadiyah). Wilayah yang masuk kategori restriksi adalah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan wilayah yang non restriksi adalah Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah.

B. Sikap Kebangsaan

1. Pandangan terhadap Pancasila

Rumusan tentang pandangan hidup sebuah bangsa akan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor. Salah satu di antaranya adalah tingkat kelenturannya dalam mengarungi gelombang perubahan sejarah yang kerap bergerak cepat dan hampir tanpa preseden. Faktor berikutnya adalah tingkat penerimaan (legitimasi) dari warga negara. Namun, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuannya untuk menjadi titik acuan dalam menjawab problematika kebangsaan. Dalam konteks ini, maka jika Pancasila dianggap merupakan rumusan pandangan hidup bangsa Indonesia, apakah ia telah memenuhi persyaratan semacam itu?

Kandungan nilai Pancasila terbukti memiliki kekuatan visioner, dan oleh karenanya, tetap relevan dalam menghadapi perubahan dan tantangan jaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tampaknya cukup adaptif terhadap berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi, baik dalam konteks dalam negeri maupun dalam konteks eksternal. Asumsi ini setidaknya didasarkan atas pandangan sebagian besar responden (62.3%) yang beranggapan bahwa dasar negara itu masih relevan (sesuai) dengan perkembangan jaman. Hanya 25.6% saja anggota masyarakat yang berpandangan bahwa Pancasila kurang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Temuan ini sekaligus menepis anggapan dari

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 67 11/1/2011 5:38:02 AM

sementara kalangan bahwa Pancasila adalah ideologi usang, dan oleh karenanya, harus diubah/diganti dengan pandangan hidup lain yang lebih sesuai dengan tuntutan jaman.

Grafik 3:
Tingkat kesesuaian Pancasila

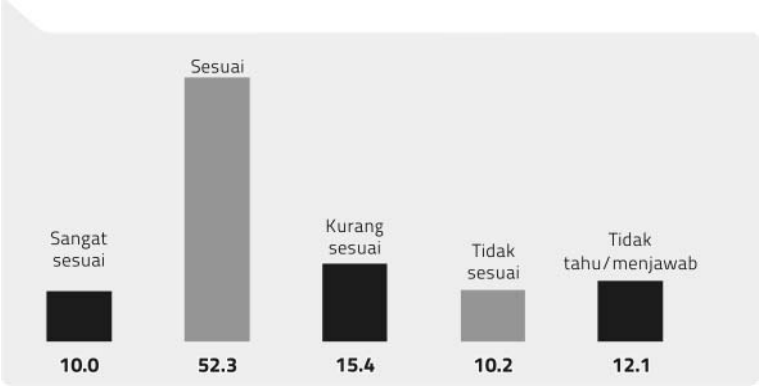

Konsisten dengan pandangan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan zaman, sebagian besar responden (83.9%) juga mengakui bahwa hingga saat ini. Pancasila pada dasarnya masih ampuh sebagai sarana perekat atau alat untuk menciptakan kerukunan bangsa Indonesia. Hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (5.2%) yang menganggap Pancasila tidak dapat berfungsi sebagai alat perekat kerukunan bangsa Indonesia.

Grafik 4:
Pancasila sebagai perekat kerukunan

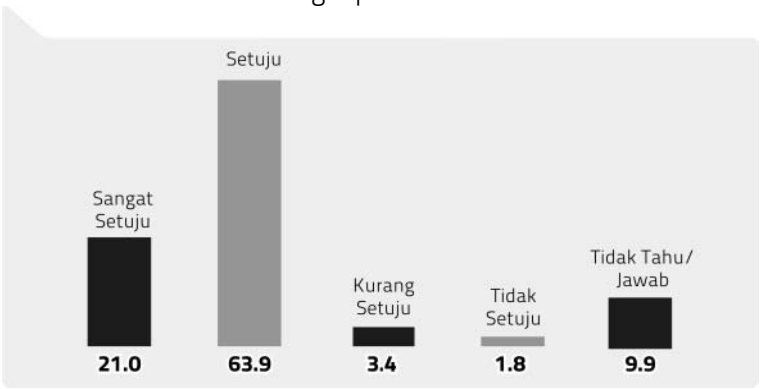

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 68 11/1/2011 5:38:02 AM

Bagi masyarakat Indonesia Pancasila merupakan ideologi negara yang tak tergantikan kedudukannya. Mereka beranggapan bahwa hanya Pancasila yang boleh hidup di bumi Nusantara ini sebagai ideologi negara. Hal ini tampak dari pandangan sebagian besar responden (73.3%) yang dengan tegas menolak terhadap berbagai upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Hanya sebagian kecil saja responden (5.6%) yang mendukung kemungkinan upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Grafik 5:
Sikap terhadap upaya mengubah Pancasila

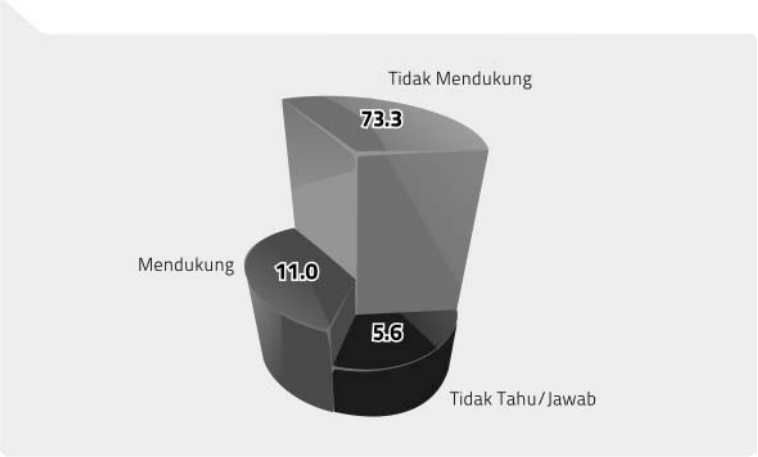

Namun demikian, sekalipun sebagian besar responden beranggapan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan perkembangan zaman dan menolak penggantian Pancasila dengan ideologi lain, namun mereka agaknya meragukan bahwa penerapannya dilakukan secara konsisten di negeri ini. Hal ini tampak dari pandangan responden yang terbelah di antara yang menyatakan sikap setuju bahwa nilai-nilai Pancasila telah dilupakan (42%) dengan mereka (45.8%) yang bersikap sebaliknya.Jawaban responden ini sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di negeri ini masih belum sepenuhnya dijalankan. Ini berarti penerapan Pancasila

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 69 11/1/2011 5:38:02 AM

dalam praktik kehidupan sehari-hari masih menjadi persoalan, dan oleh karenanya, sejumlah tokoh di Indonesia hingga hari ini harus terus mengupayakan agar ideologi negara itu tetap lestari—meskipun Pancasila telah diterima sebagai dasar negara lebih dari enam dasawarsa yang lalu.

Grafik 6:
Persetujuan atas pernyataan bahwa Pancasila telah dilupakan

Terkait dengan persoalan ini, maka pertanyaannya adalah, di era reformasi sekarang ini siapakah tokoh nasional yang paling konsisten memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara?Di antara sejumlah tokoh nasional yang dianggap paling konsisten memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara tampil dua nama teratas yang disebutkan responden, yakni: Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri (22%) dan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (20.9%). Secara statistik tidak terdapat perbedaan angka signifikan yang diperoleh kedua tokoh nasional ini. Ini berarti bahwa di mata publik keduanya-lebih dari tokoh nasional manapun dewasa ini- yang dianggap paling gigih memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara di era reformasi.

Tokoh nasional berikutnya yang dianggap berjasa untuk hal yang sama adalah Presiden RI ketiga B.J. Habibie (6.3%) dan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 70 11/1/2011 5:38:02 AM

mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (5.1%). Di samping itu, terdapat beberapa nama tokoh lain yang umumnya berada di bawah 5%.Terpilihnya empat tokoh ini boleh jadi dilatarbelakangi oleh peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni (2010-2011) di mana keempatnya tampil berpidato di depan MPR RI. Oleh karenanya, Abdurahman Wahid, Presiden RI ke empat, kurang dilihat sebagai sosok yang gigih memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara, sekalipun secara faktual peranan yang dimainkannya dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila selama ia masih hiduptampak amat gigih.

Grafik 7:
Tokoh nasional yang sungguh-sungguh menegakkan Pancasila

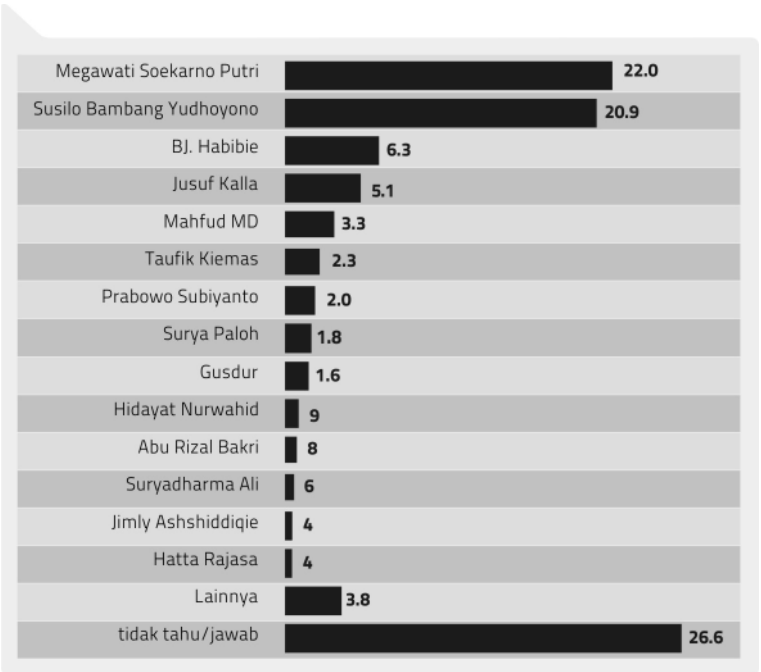

Kecenderungan pandangan masyarakat sebagaimana yang terungkap melalui hasil survei ini memperlihatkan adanya semacam 'kesetiaan' atau 'ikatan' mereka terhadap Pancasila. Tolakan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 71 11/1/2011 5:38:02 AM

masyarakat terhadap upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dengan jelas mengkonfirmasi sikap dukungan masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang di Tanah Air yang berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain kemungkinan besar akan memperoleh tolakan keras dari rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa upaya-upaya untuk menjajakan ideologi lain untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara akan menemui kesulitan untuk mendapatkan 'konsumen' di negeri ini.

Hasil survei ini dengan jelas juga memperlihatkan bahwa masyarakat pada umumnya menerima dan mendukung sepenuhnya posisi Pancasila sebagai ideologi negara RI. Oleh karenanya, mereka tidak saja beranggapan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga melihat Pancasila sebagai acuan yang dapat mengikat kerukunan antar komponen bangsa.

Karena alasan itu pula masyarakat merasa sangat keberatan atau menolak setiap upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Berbagai pandangan masyarakat terhadap Pancasila pada dasarnya juga mencerminkan bahwa kandungan nilai ideologi ini relatif sejalan dengan alam kognitif-kultural masyarakat Indonesia. Faktor ini pula yang menjelaskan mengapa nilai-nilai Pancasila hingga hari ini masih didukung oleh masyarakat Indonesia.

2. Pandangan tentang UUD Negara RI 1945

Sebagaimana diketahui, di era pasca Soeharto ini UUD Negara RI 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Proses amandemen konstitusi ini tentu merupakan momentum penting dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, sekalipun proses amandemen konstitusi merupakan peristiwa penting bagi ketatanegaraan Indonesia, ternyata tidak banyak anggota masyarakat yang mengikutinya dengan seksama. Fenomena ini terlihat dari jawaban sebagian besar responden

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 72 11/1/2011 5:38:02 AM

(74.7%) bahwa mereka tidak mengetahui proses perubahan konstitusi tersebut. Hanya 13.6% saja anggota masyarakat yang mengaku mengetahui proses tersebut.Fakta ini boleh jadi mengindikasikan bahwa proses dan isi perubahan konstitusi itu bersifat elitis sehingga tidak 'melibatkan' alam kognitif masyarakat. Di sisi lain, fakta ini agaknya juga terkait sosialisasi tentang amandemen UUD Negara RI 1945 masih terbatas dan kurang berjalan efektif.

Meski mereka tidak mengikuti secara sekasama proses amandemen UUD'45, namun secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung amandemen UUD Negara RI 1945. Di mata mereka amandemen UUD Negara RI 1945 memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia. Kecenderungan ini terkonfirmasi dengan pandangan sebagian besar responden (57.6%) yang beranggapan bahwa amandemen UUD Negara RI 1945 merupakan jawaban atas persoalan bangsa. Namun demikian, meski prosentasinya lebih kecil, tidak sedikit pula anggota masyarakat (33.3%) yang beranggapan sebaliknya.

Grafik 8:
Pengetahuan responden tentang Amandemen
UUD Negara RI 1945

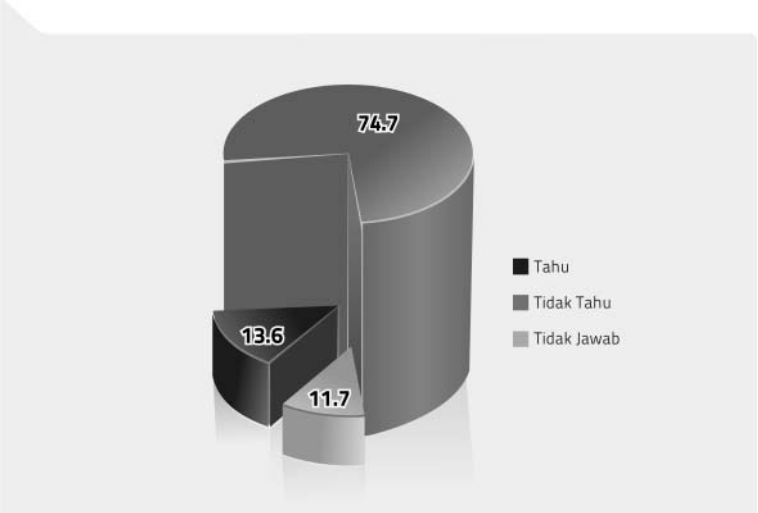

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 73 11/1/2011 5:38:02 AM

Grafik 9:
Amandemen UUD Negara RI 1945 menjawab persoalan bangsa

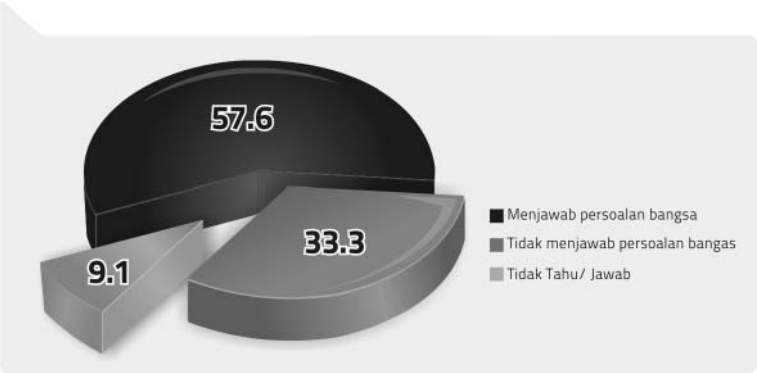

Sama halnya dengan implementasi Pancasila yang dinilai oleh sebagian besar masyarakat sebagai tidak konsisten, pelaksanaan UUD Negara RI 1945 oleh sebagian besar responden (66.7%) juga dinilai kurang atau tidak konsisten.Dengan kata lain, implementasi UUD Negara RI 1945 pada tingkat kehidupan bernegara, setidaknya di mata masyarakat, masih dianggap tidak atau kurang sejalan dengan prinsip dasar yang dikandungnya. Meski prosentasenya lebih kecil, namun terdapat pula anggota masyarakat lainnya (19.5%) yang beranggapan bahwa proses kehidupan bernegara sudah sejalan dengan UUD Negara RI 1945.

Grafik 10:
Tingkat kepatuhan penyelenggaraan negara
pada UUD Negara RI 1945

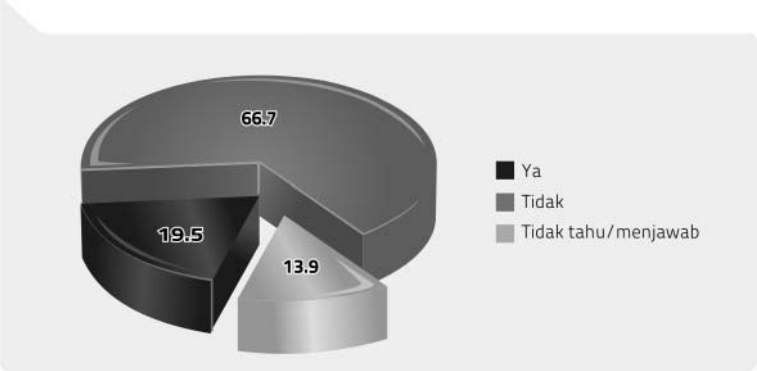

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 74 11/1/2011 5:38:03 AM

3. Pandangan tentang Bhinneka Tunggal Ika

Keberagaman etnis, budaya dan agama merupakan sebuah fakta sosiologis-antropologismasyarakat Indonesia. Kemajemukan semacam ini dalam masyarakat Indonesia agaknya telah menjadi faktor yang bersifat *given.* Fakta sosial ini diterima sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Hidup dalam realitas sosial yang majemuk rupanya telah menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka bukan kebetulan jika sebagian besar masyarakat (60.4%) menganggap keberagaman etnis, budaya dan agama bukan merupakan faktor penghalang bagi terciptanya kerukunan. Hanya sebagian kecil saja (26.6%) yang berpendapat sebaliknya.

Grafik 11:
Keberagaman bukan penghalang toleransi

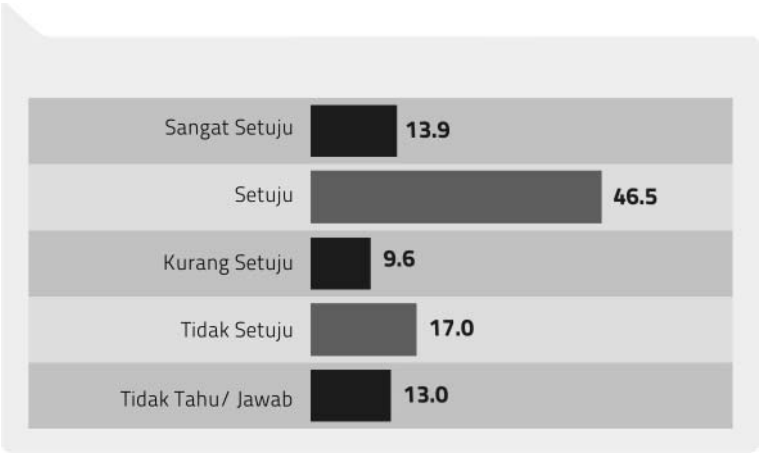

Lebih dari itu, kemampuan untuk menerima dan sekaligus berdamai dengan realitas sosial yang mejemukoleh masyarakat dinilai sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagian responden menyatakan sikap setuju bahwa nilai nilai luhur bangsa/ masyarakat indonesia adalah kemampuan untuk menerima perbedaan identitas kultural (87.5%). Di samping kemampuan untuk menerima perbedaan identitas, mayoritas masyarakat juga mengafirmasi bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat, mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang lebih kecil, serta gotong-royong dan kepedulian terhadap

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 75 11/1/2011 5:38:03 AM

sesama adalah nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung oleh bangsa Indonesia dengan dukungan masing-masing sebesar 91.5%, 85.5% dan 93%. Hanya sebagian kecil saja yang menolak anggapan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Grafik 12:
Persetujuan responden terhadap nilai-nilai luhur bangsa

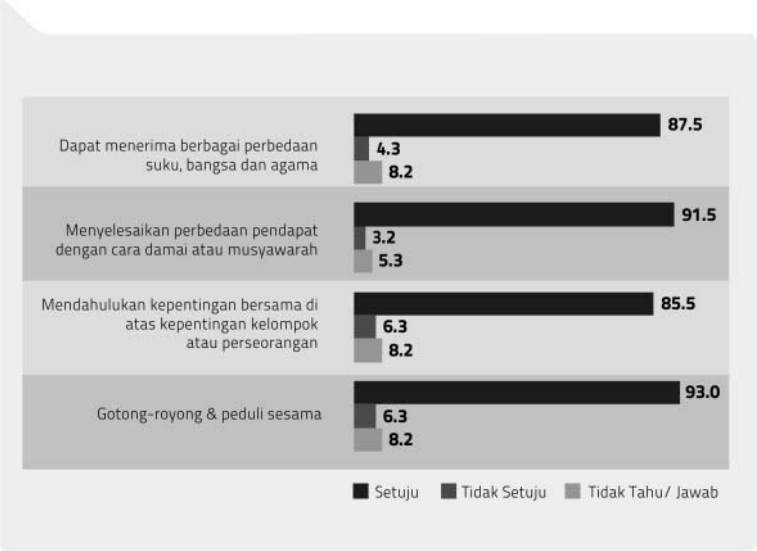

Secara tidak langsung, tingkat persetujuan dan apresiasi yang diungkapkan sebagian besar responden terkait dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang lebih kecil, serta gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut pada dasarnya masih bersemai di masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka mengakui bahwa kesemua nilai itu tidak saja merupakan khazanah budaya masyarakat Indonesia tetapi juga merupakan merupakan jati diri dan bukti keluhuran budi bangsa Indonesia.

Hasil survei ini juga memperlihatkan bahwa sekalipun nilai-nilai tersebut oleh sebagian besar responden diakui sebagai keluhuran budaya masyarakat Indonesia, namun saat ditanyakan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 76 11/1/2011 5:38:03 AM

kepada mereka tentang praktik dan implementasi nilai-nilai luhur tersebut saat ini, muncul jawaban yang cukup menarik.Jika pada jawaban sebelumnya terlihat tingkat persetujuan responden yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mereka pandang sebagai keluhuran, maka pada jawaban tentang praktik terlihat penurunan, baik dalam hal mendahulukan kepentingan bersama (63.3%) maupun musyawarah untuk mufakat (63%). Untuk mendahulukan kepentingan bersama telah terjadi penurunan poin sebesar 21.4%, sementara untuk musyawarah-mufakat terjadi penurunan sebesar 27.4%.

Penurunan yang agak parah terjadi pada sikap gotong-royong dan peduli pada sesama yang tinggal 61.5% atau turun sebesar 30.6%. Lebih dari itu, sikap dapat menerima perbedaan oleh sebagian besar responden dianggap sebagai nilai luhur yang paling jauh merosot menjadi 48.6% dibandingkan dengan nilai lainnya. Nilai luhur ini turun sebesar 41%.

Grafik 13:
Kesenjangan praktik nilai luhur bangsa

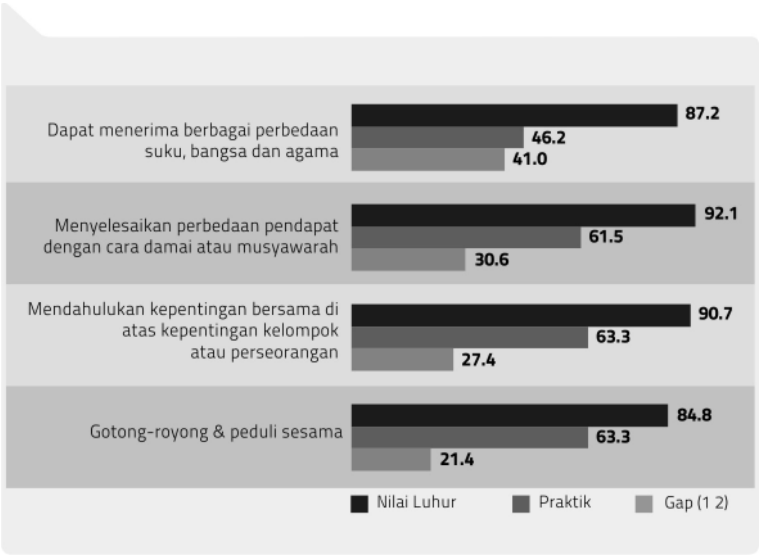

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya dapat menerima sebuah fakta sosiologis keberagaman

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 77 11/1/2011 5:38:03 AM

di Indonesia. Bahkan mereka menganggap bahwa kemampuan menerima perbedaan identitas kultural itu sebagai sebuah nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mereka tampaknya relatif tidak memiliki ketegangan dalam mengembangkan hubungan sosial dalam kondisi yang majemuk. Namun demikian, masyarakat juga mensinyalir bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terutama pada aspek sikap yang dapat menerima keberagamaan, tengah mengalami proses pengikisan. Oleh karenanya, mereka juga tidak menampik adanya gejala ancaman terhadap keberagaman di Tanah Air dewasa ini.

Grafik 14:
Kesenjangan praktik nilai luhur bangsa

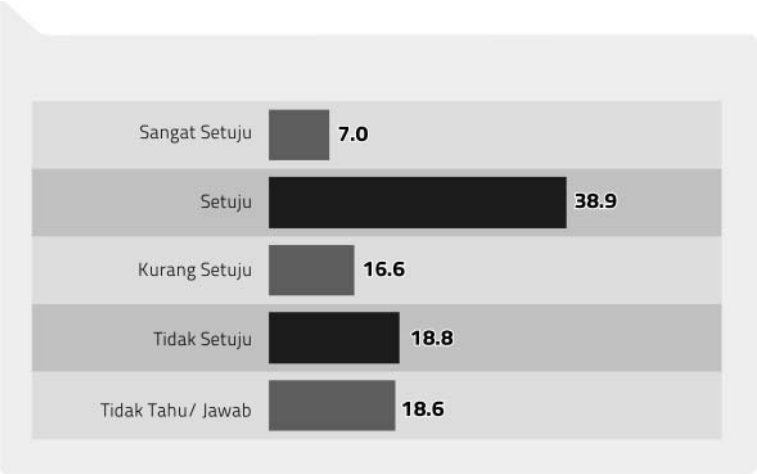

4. Pandangan terhadap NKRI

Bagi sebagian besar responden potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI adalah konflik yang dipicu oleh sentimen antar identitas agama dan suku (30.4%). Faktor berikutnya secara berturut-turut adalah: perebutan kekuasaan antar politisi (21.5%), serta terorisme yang mengatasnamakan agama (12%). Sementara itu faktor-faktor seperti gerakan separatisme, gerakan NII, otonomi daerah yang tidak terkontrol, kejahatan transnasional dan serbuan militer asing masing-masing tidak lebih dari 5% saja dipandang sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 78 11/1/2011 5:38:03 AM

Grafik 15:
Faktor ancaman terhadap keutuhan NKRI

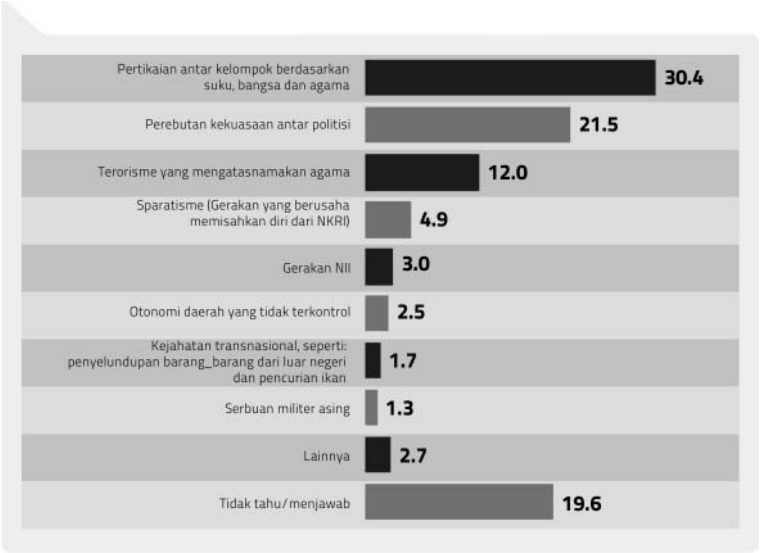

Terkait dengan ancaman terhadap keutuhan NKRI, survei ini menunjukkan bahwa otonomi daerah -yang oleh sementara kalangan dinilai rawan terhadap keutuhan negara- ternyata tidak dipandang sebagai ancaman terhadap NKRI, sebagaimana dinyatakan oleh (50.5%) responden. Aspek-aspek otonomi daerah lainnya yang dianggap positif oleh masyarakat antara lain adalah: meningkatkan partisipasi masyarakat (49.8%), mendekatkan layanan publik (51.4%), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (49.7 %).Sementara itu, aspek-aspek otonomi daerah yang dianggap negatif oleh masyarakat adalah: menciptakan raja-raja kecil (38.1%), menguntungkan elite lokal (45.5%) dan memboroskan anggaran negara (41%). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sekalipun otonomi daerah telah membawa beberapa dampak negatif, namun sejauh ini tidak terdapat indikasi yang membuktikan bahwa otonomi daerah, setidaknya berdasarkan persepsi mayoritas responden, mengancam keutuhan NKRI.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 79 11/1/2011 5:38:03 AM

Grafik 16:
Penilaian responden terhadap Otonomi Daerah

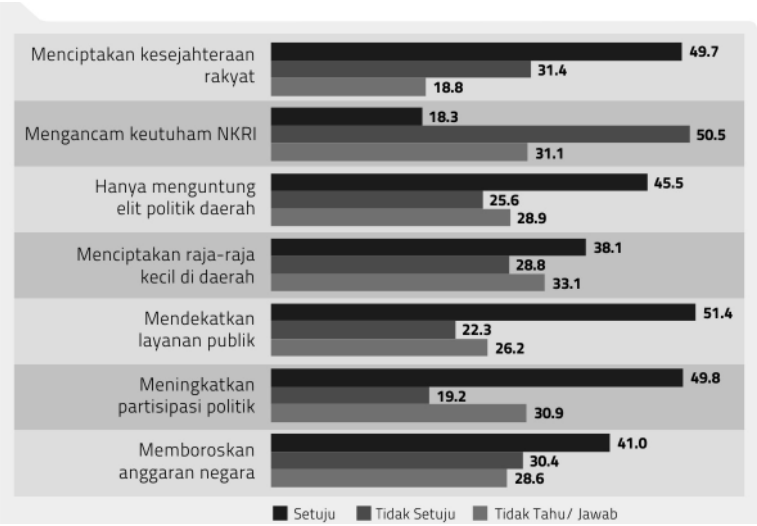

Meski rasa kebangsaan responden cukup tinggi, namun dalam hal kepemimpinan politik di tingkat lokal, sebagian besar anggota masyarakat beranggapan bahwa putra daerah perlu memperoleh kesempatan. Dengan kata lain, posisi gubernur, bupati dan walikota di mata sebagian besar responden (55.2%) sebaiknya merupakan putra daerah. Meski prosentasenya lebih kecil, namun tidak sedikit pula anggota masyarakat (36.1%) yang berpandangan bahwa jabatan seperti gubenur, bupati maupun walikota tidak harus memiliki asal-usul putra daerah.

Pandangan semacam ini boleh jadi merupakan sikap yang wajar, terutama jika dikaitkan dengan pemberian kesempatan bagi putra daerah mengembangkan kemampuannya di pentas politik lokal. Lebih dari itu, warisan era sebelum reformasi yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan membuat harapan masyarakat lokal agar jabatan gubernur, bupati dan walikota sebaiknya diisi oleh putra daerah menjadi hal yang wajar. Namun demikian, setelah 66 tahun merdeka di mana suku seharusnya tidak lagi menjadi dasar pertimbangan memilih pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional; maka kecenderungan semacam itu boleh jadi akan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 80 11/1/2011 5:38:03 AM

menjadi faktor yang kontraproduktif dilihat dari sisi kohesi sosial masyarakat Indonesia.

Grafik 17:
Kepala Daerah harus orang asli daerah

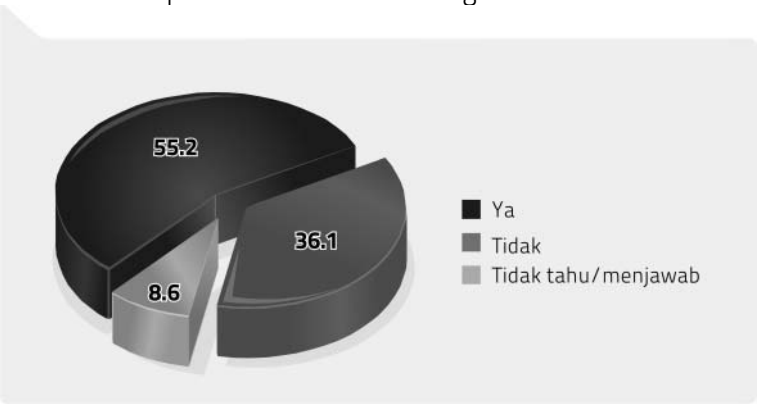

Tingkat keyakinan masyarakat akan keutuhan bangsa Indonesia dalam 10 tahun mendatang agaknya cukup tinggi. Sikap semacam ini diperlihatkan oleh 63.4% responden yang merasa yakin bahwa Indonesia akan tetap utuh sebagai sebuah negara dalam 10 tahun mendatang. Namun demikian, meski prosentasenya lebih kecil, tidak sedikit pula anggota masyarakat (26%) yang beranggapan sebaliknya.

Grafik 18:
Tingkat keyakinan reponden terhadap
keutuhan NKRI 10 mendatang

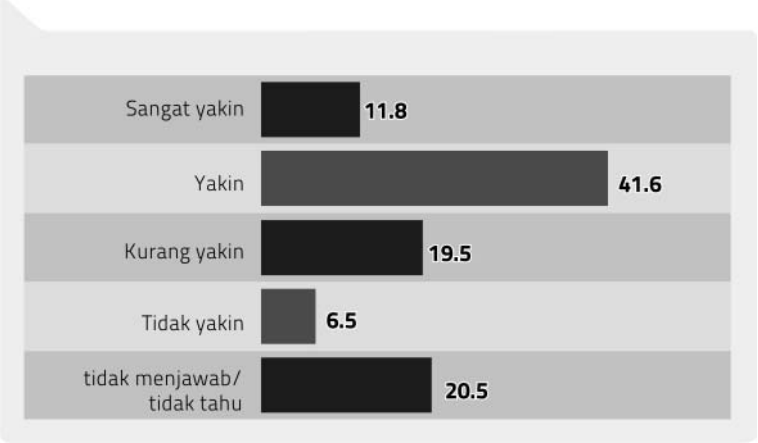

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 81 11/1/2011 5:38:03 AM

Lebih dari tokoh manapun juga di Tanah Air, nama dan posisi Soekarno hingga hari ini ternyata tetap tak tergoyahkan di mata rakyat Indonesia sebagai sosok yang paling berjasa dalam mempersatukan bangsa ini. Hasil survei ini membuktikan bahwa mayoritas responden (75.7%) telah menempatkan Soekarno sebagai tokoh yang paling berjasa dalam mempersatukan NKRI. Tokoh nasional berikutnya yang dianggap berjasa dalam mempersatukan NKRI adalah Mohammad Hatta (5.8%), yang kemudian diikuti oleh Tan Malaka (1.2%), Sjafruddin Prawiranegara (1%), Mohammad Yamin (0.7 %), M. Natsir (0.6 %) dan S.M. Kartosoewirjo (0.2%).

Grafik 19:
Tokoh yang paling berjasa dalam mengawal NKRI

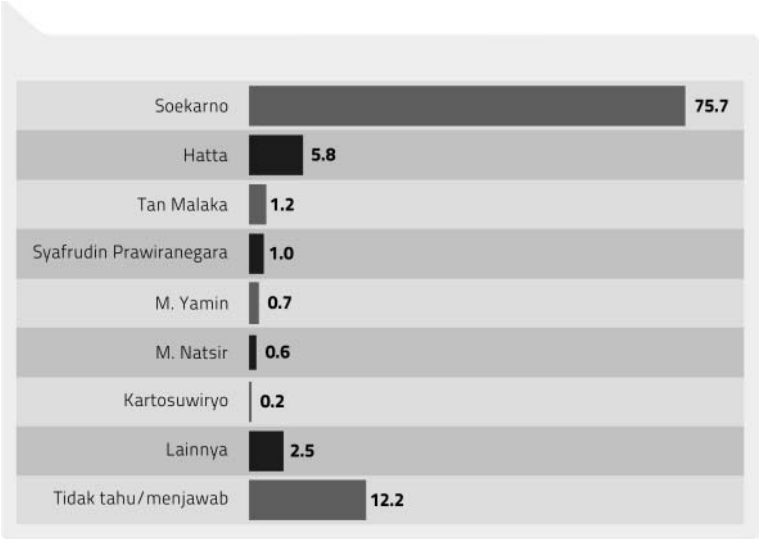

Semangat kebangsaan antara lain dapat diidentifikasi dari seberapa besar antusiasme keikutsertaan warga negara dalam setiap momen peringatan hari-hari besar nasional. Terkait dengan persoalan ini, maka pertanyaannya adalah, seberapa besarkah antusiasme masyarakat dalam memperingati momentum hari kemerdekaan 17 Agustus?Hasil survei ini memperlihatkan bahwa

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 82 11/1/2011 5:38:03 AM

antusiasme masyarakat dalam memperingati momentum hari kemerdekaan 17 Agustus di lingkungannya masing-masing cukup tinggi, baik yang mengaku 'selalu' mengikuti (30.6%) maupun yang mengaku 'sering' mengikuti (33.5%). Sementara itu, 26.6% lainnya menyatakan 'jarang' mengikuti kegiatan semacam itu. Hanya 5.8% saja anggota masyarakat yang mengaku tidak penah mengikuti kegiatan peringatan 17 Agustus di lingkungannya.

Masyarakat Indonesia rupanya bukan penganut paham nasionalisme chauvinis. Pandangan *"right or wrong is my country"* agaknya jauh dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Survei ini memperlihatkan bahwa sikap masyarakat Indonesia relatif terbuka atau moderat dalam merespon kritik yang dilakukan pihak asing terhadap negara RI, baik dengan alasan mempelajarinya terlebih dulu sebelum mengambil sikap (45.1%) ataupun yang langsung dapat menerima kritik secara apa adanya (18.2%). Hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (13.1%) yang langsung menyatakan tolakannya dengan alasan: pasti terdapat agenda terselubung di balik kritik tersebut.

Grafik 20:
Keikutsertaan dalam perayaan hari kemerdekaan RI

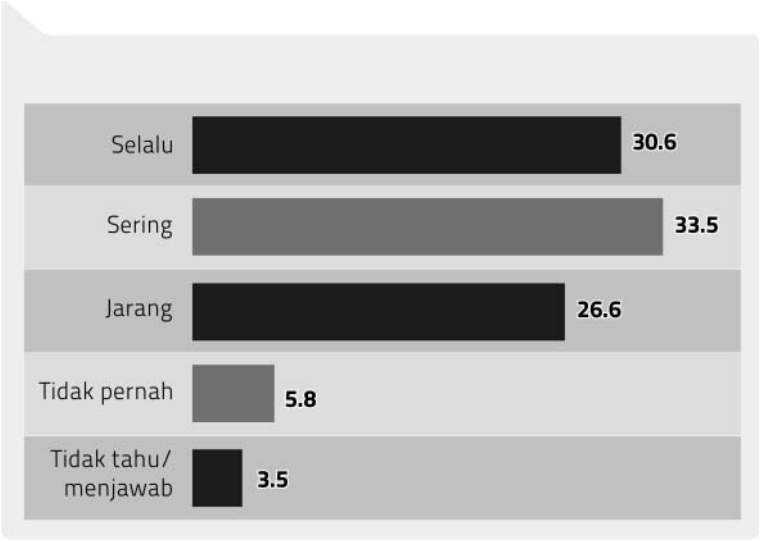

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 83 11/1/2011 5:38:03 AM

Grafik 21:
Sikap terhadap kritik dari negara-negara lain

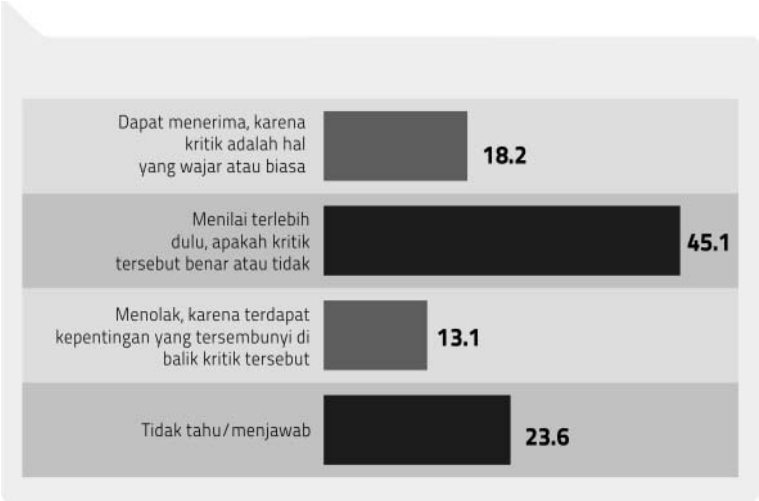

Kesadaran bela negara dalam bentuk ikut dalam wajib militer manakala terjadi invasi militer asing ke wilayah Indonesia ternyata cukup tinggi. Terdapat keinginan yang cukup kuat di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam bela negara. Hal ini antara lain diperlihatkan oleh sebagian besar responden (64%) yang menyatakan kesediaannya untuk ikut wajib militer dalam rangka bela negara. Meski jumlahnya cukup lumayan, namun mereka yang merasa keberatan untuk ikut serta dalam wajib militer (26.1%) jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang menyatakan kesediaannya.

Masyarakat Indonesia rupanya memiliki kesetiaan yang cukup tinggi kepada negara dan bangsanya. Mereka tidak saja dapat menerima fakta sepenuhnya bahwa bangsa ini beranekaragam dan bersedia untuk hidup rukun di tengah-tengah perbedaan yang ada, tetapi juga memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk selalu mengenang hari kelahiran negaranya melalui keikutsertaan dalam setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan. Lebih dari itu, mereka juga tidak merasa keberatan untuk memasuki wajib militer dalam rangka bela negara manakala tejadi serbuan militer asing ke Indonesia.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 84 11/1/2011 5:38:03 AM

Grafik 22:
Kesediaan membela negara jika terjadi invasi

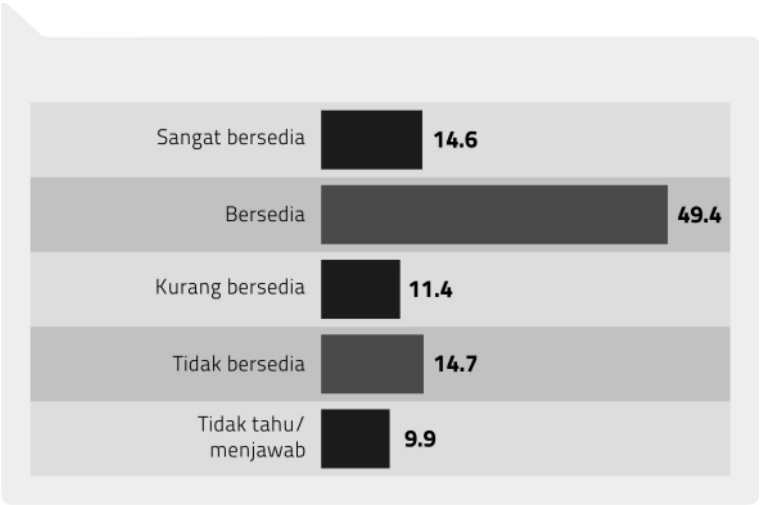

Namun demikian, meski masyarakat menunjukkan kesetiaan kepada bangsa dan negaranya, rasa kebangsaan mereka bukanlah sejenis ultra-nasionalisme (*chauvinis*). Mereka, misalnya, tidak merasa keberatan seandainya negara-negara-negara asing melancarkan kritik terhadap Indonesia. Kesetiaan mereka terhadap NKRI tidak menghalangi sikap yang terbuka terhadap kritik terhadap Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain. Pandangan ini juga mencerminkan ekspresi rasa kebangsaan yang wajar tanpa disertai dengan sikap *xenophobia*. Di sisi lain, survei ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat melihat adanya ancaman bagi keutuhan NKRI. Di antara potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI itu antara lain adalah munculnya pertikaian antar kelompok masyarakat berbasis etnis dan agama.

C. Sikap Keagamaan

Keyakinan beragama, dalam perspektif Hak-hak Asasi Manusia (HAM), tergolong kebebasan yang bersifat *non derogable rights*. Oleh karenanya, keberadaannya tidak dapat ditangguhkan ataupun

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 85 11/1/2011 5:38:04 AM

dibatasi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Norma dasar ini tidak saja telah termuat di dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, tetapi juga termuat di dalam amandemen UUD Negara RI 1945 pada pasal 28 I ayat (1), Pasal 28 E dan UU UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM pasal 4.[76] Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana masyarakat memahami prinsip-prinsip kebebasan beragama berdasarkan perspektif HAM?

Hak-hak asasi manusia dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai bukan berasal dari Barat. Mereka yang menyatakan hal ini tampak jauh lebih besar (36%) dari mereka (16.2%) yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia berasal dari Barat. Pandangan ini secara implisit mengandung pengertian bahwa hak-hak asasi manusia juga merupakan pandangan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, jumlah mereka yang tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini terlihat jauh lebih besar lagi, yakni: 47.8%.

Bagian terbesar anggota masyarakat ternyata kurang atau tidak mengetahui bahwa kebebasan bergama sepenuhnya diakui dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945. Hal ini tampak dari 45.6% masyarakat yang mengaku bahwa mereka tidak mengetahui adanya jaminan kebebasan agama dalam konstitusi RI. Meski prosentasenya lebih kecil, namun tidak sedikit pula mereka (37.6%) yang mengaku mengetahui adanya jaminan kebebasan beragama UUD Negara RI 1945.

---

76 Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) menyatakan sebagai berikut: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."** Sementara itu Pasal 4 UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, **hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"**.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 86 11/1/2011 5:38:04 AM

Grafik 23:
HAM bukan berasal dari barat

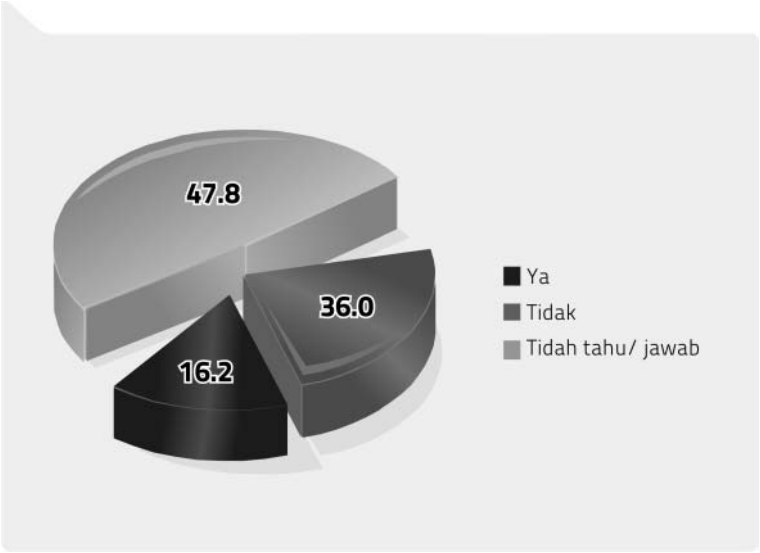

Grafik 24:
Kebebasan beragama/berkeyakinan di jamin
UUD Negara RI 1945

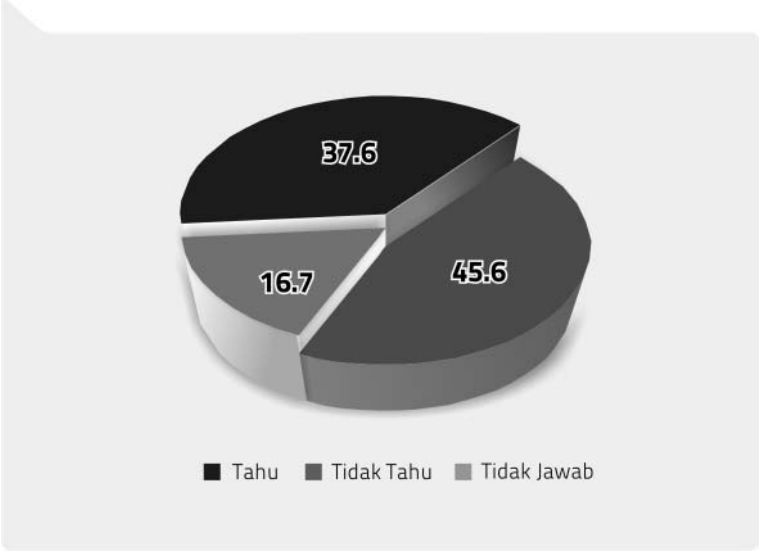

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 87 11/1/2011 5:38:04 AM

Meski sebagian besar anggota masyarakat tidak mengetahui bahwa kebebasan beragama dijamin sepenuhnya oleh UUD Negara RI 1945, namun secara umum masyarakat memandang berbagai varian kebebasan beragama secara positif. Berbagai hak yang terkait dengan kebebasan beragama seseorang memperoleh dukungan yang cukup kuat dari masyarakat. Terkait dengan hak untuk menganut suatu keyakinan agama, misalnya, dukungan atau sikap setuju diperlihatkan oleh mayoritas mutlak responden (90.7%) berbanding jauh dengan memandangnya secara negatif yang hanya didukung oleh 3.8% responden saja.Demikian pula halnya dengan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Hak ini didukung penuh oleh mayoritas responden (91.1%) dan hanya 2.8% saja anggota masyarakat yang berpandangan sebaliknya. Sementara itu, hak untuk menyebarluaskan agama dengan cara damai juga didukung oleh mayoritas responden (70.4%). Mereka yang menolaknya hanya terdiri dari 23.1% responden saja.

Grafik 25:
Pemahaman responden tentang tafsir
kebebasan beragama/berkeyakinan

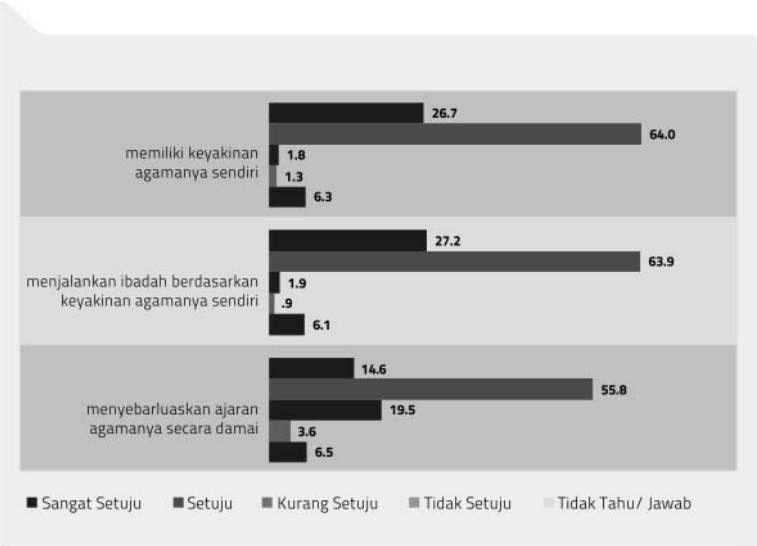

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 88 11/1/2011 5:38:04 AM

Sebagai konsekuensi dari sikap/pandangan yang positif terhadap keberagamaan, kebebasan beragama di mata masyarakat merupakan wilayah yang sepenuhnya berada pada lingkup hak pribadi yang melekat pada diri seseorang, dan oleh karenanya, setiap bentuk campur tangan/intervensi tidak dapat dibenarkan. Pandangan ini tercermin dari sikap sebagian besar responden (63.5%) yang memperlihatkan persetujuannya terhadap pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada pihak manapun juga, termasuk negara, yang dapat mencampuri hak beragama seseorang. Hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (22.3%) yang berpandangan bahwa hak keberagamaan yang dianut setiap orang boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk oleh negara.

Grafik 26:
Persetujuan atas tidak ada pihak manapun yang boleh mencampuri Keyakinan seseorang

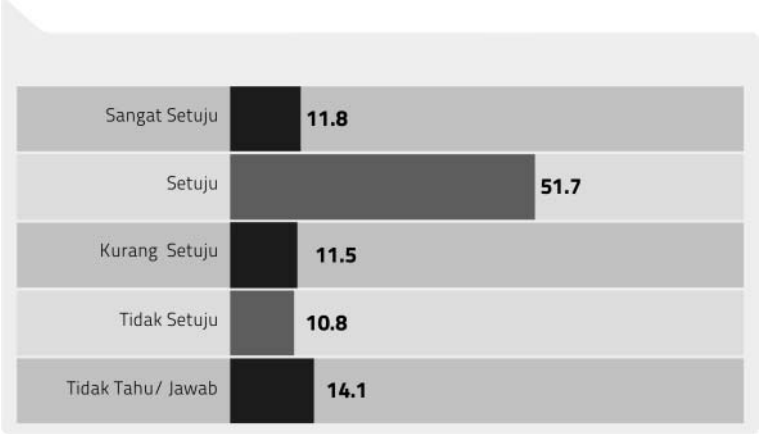

Sama halnya dengan pandangan positif tentang kebebasan beragama, masyarakat juga memandang keimanan seseorang dalam beragama sepenuhnya bersifat privat. Oleh karenanya, tidak seorang atau kelompok manapun yang dapat memintai pertanggungjawaban keimanan seseorang. Cara pandang ini didukung oleh mayoritas responden (72.6%) yang menolak upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memintai pertanggungjawaban keimanan dari seseorang. Hanya sebagian

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 89 11/1/2011 5:38:04 AM

kecil saja responden (12.8%) yang membenarkan atau mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan sekelompok orang yang mengarah pada upaya meminta pertanggungjawaban keimanan sesorang dalam beragama.

Grafik 27:
Persetujuan atas tindakan kelompok yang meminta pertanggungjawaban Keimanan

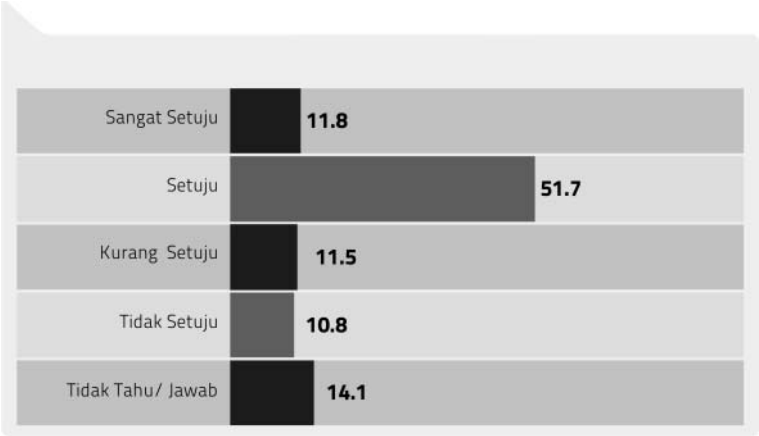

Lalu, di manakah posisi Tuhan dalam hubungannya dengan keimanan seseorang? Dari jawaban responden terlihat dengan jelas bagaimana sesungguhnya posisi Tuhan terkait dengan persoalan ini. Dalam memintai pertanggungjawaban keimanan seseorang, posisi Tuhan bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya, Ia tak tergantikan oleh dzat lain manapun selain diri-Nya sendiri. Atau dengan kata lain, hanya Tuhan satu-satunya pihak yang memiliki hak mutlak dan ekslusif untuk urusan semacam ini. Pandangan tentang absolutisme posisi Tuhan terkait dengan keimanan seseorang itu didukung penuh oleh mayoritas responden (89.8%). Namun demikian, cukup unik sekaligus menarik bahwa-meski prosentasenya sangat kecil (4.2%)-terdapat segelintir orang yang menampik absolutisme posisi dan hak Tuhan dalam hal keimanan seseorang. Dengan kata lain, pandangan minoritas ini secara tidak langsung mengandung arti bahwa posisi Tuhan dalam perkara ini dapat digantikan oleh dzat lain.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 90 11/1/2011 5:38:04 AM

Grafik 28:
Tuhan adalah yang paling berhak
meminta pertanggungjawaban Keimanan

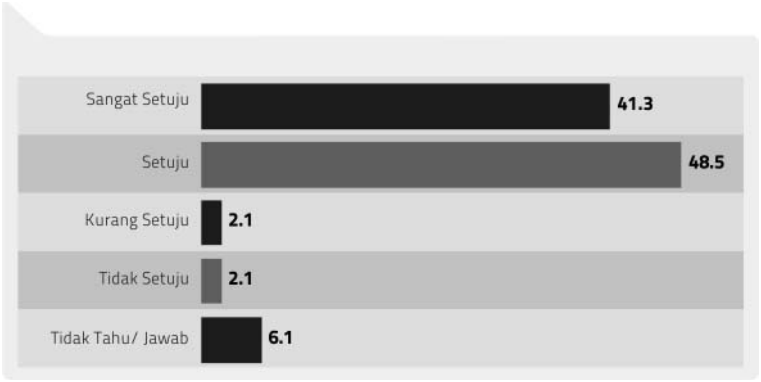

Cukup menarik bahwa sebagian besar responden di 10 propinsi (39%) ternyata beranggapan bahwa semua agama menjamin keselamatan dari bagi pemeluknya. Dari sisi ini terlihat bahwa pandangan responden terhadap berbagai agama cukup positif, di mana semua agama berada pada posisi yang dapat menjamin jalan keselamatan bagi para penganutnya. Sementara itu 29.7% lainnya terlihat kukuh dengan pendirian bahwa hanya agama yang mereka anut yang dapat memberikan jaminan semacam itu. Selebihnya (7.9%) menyatakan bahwa hanya agama mereka dan agama-agama tertentu saja yang dapat berfungsi sebagai jalan menuju keselamatan bagi para pemeluknya.

Grafik 29:
Klaim kebenaran atas agama yang dianut

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 91 11/1/2011 5:38:04 AM

Lalu, bagaimanakah posisi negara terhadap agama? Dalam memposisikan peran negara/pemerintah terkait dengan kehidupan beragama, pandangan mayoritas masyarakat juga dapat dikatakan cukup positif. Pemerintah atau negara di mata masyarakat, tidak saja harus memberikan jaminan atas semua agama/keyakinan untuk tumbuh (47.1%) tetapi juga harus menjamin praktik ibadah dan penyebaran agama yang dilakukan secara damai (14.5%). Hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat yang mendukung intervensi dan restriksi negara terhadap kehidupan beragama, baik dalam bentuk pembatasan agama/keyakinan (5.2%) maupun dalam bentuk pembatasan atas penyebarluasan ajaran suatu agama, meski keyakinannya tetap dijamin (7.8%).

Grafik 30:
Posisi negara atas agama

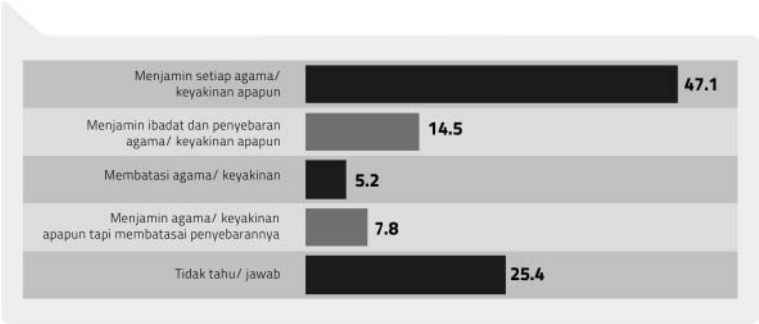

Sejalan dengan pandangan tentang posisi yang harus diambil oleh negara terhadap keberagamaan yang umumnya bersifat positif, maka tafsir atas ajaran agama sepenuhnya dipahami sebagai berada di luar domain negara. Oleh karena itu, negara—secara etik—tidak dapat masuk ke dalam ranah ini dengan alasan apapun. Posisi normatif negara yang semacam ini menempatkannya pada posisi yang imparsial terhadap berbagai tafsir agama yang muncul di kalangan komunitas umat beragama. Pandangan ini didukung oleh sebagian besar responden (41%) yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah sebaiknya berada pada posisi netral terhadap munculnya berbagai tafsir agama yang muncul. Meski prosentasenya lebih kecil, namun

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 92 11/1/2011 5:38:04 AM

tidak sedikit pula (19.2%) yang mengharuskan negara untuk mengikuti tafsir dominan atas ajaran agama. Cukup menarik bahwa hampir 40% anggota masyarakat yang justru tidak dapat memberikan pandangan/pendapatnya atas persoalan ini. Mereka agaknya merasa kesulitan untuk mengambil posisi terkait dengan peran negara terhadap berbagai tafsir ajaran agama yang muncul di kalangan para pemeluk agama.

Grafik 31:
Sikap negara terhadap beda tafsir dalam soal agama

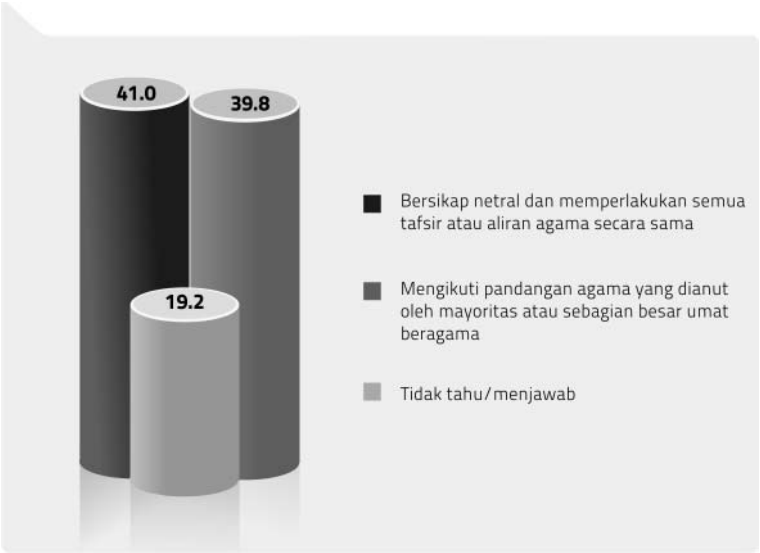

Survei ini juga menjajagi pandangan anggota masyarakat terkait tentang fenomena *hate speech* yang terkadang muncul dalam berbagai forum pertemuan keagamaan. Bagaimanakah respon masyarakat jika dalam berbagai forum keagamaan muncul gejala di mana seorang penceramah cenderung menyebarkan kebencian terhadap kelompok dan agama lain? Apa yang akan dilakukan masyarakat terhadap fenomen semacam ini? Terhadap hal ini bagian terbesar masyarakat (42.1%) ternyata cenderung memilih tetap mengikuti forum tersebut, baik karena alasan bahwa ceramah tersebut merupakan hak yang bersangkutan/penceramah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 93 11/1/2011 5:38:04 AM

(28.9%) maupun yang beralasan bahwa hal itu merupakan bagian dari dakwah (13.2%). Meski prosentasenya lebih kecil (37.4%), namun tidak sedikit pula yang memilih untuk meninggalkan forum semacam itu dengan mengungkapkan alasan bahwa penyebaran kebencian terhadap kelompok agama lain adalah tindakan yang kurang atau tidak pantas.

Grafik 32:
Sikap terhadap ceramah yang mengandung *hate speech*

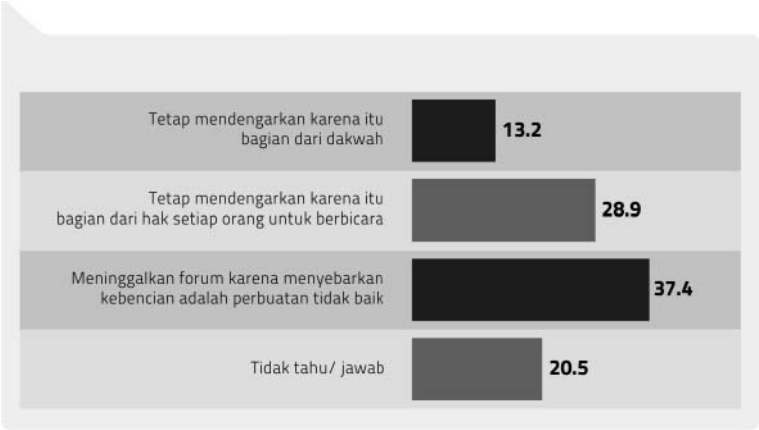

Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap acara-acara keagamaan yang mengandung unsur menyebarluaskan kebencian kepada umat atau agama lain? Fenomena semacam ini agaknya kurang dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat kurang mendukung kecenderungan penyebarluasan kebencian kepada umat atau agama lain. Hal ini terbukti dari sebagian besar anggota masyarakat (43.1%) yang mengusulkan agar pemerintah sebaiknya melakukan teguran, tidak saja kepada penyelenggara kegiatan tetapi juga kepada si penceramah. Opsi berikutnya merekomendasikan agar pemerintah membubarkan forum semacam itu dan menangkap pelakunya (14.3%) serta membubarkan forum pertemuan tersebut (17.2%). Hanya (7,1%) saja responden yang berpendapat bahwa forum semacam itu sebaiknya dibiarkan saja.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 94 11/1/2011 5:38:04 AM

Grafik 33:
Tindakan pemerintah terhadap ceramah
yang mengandung *hate speech*

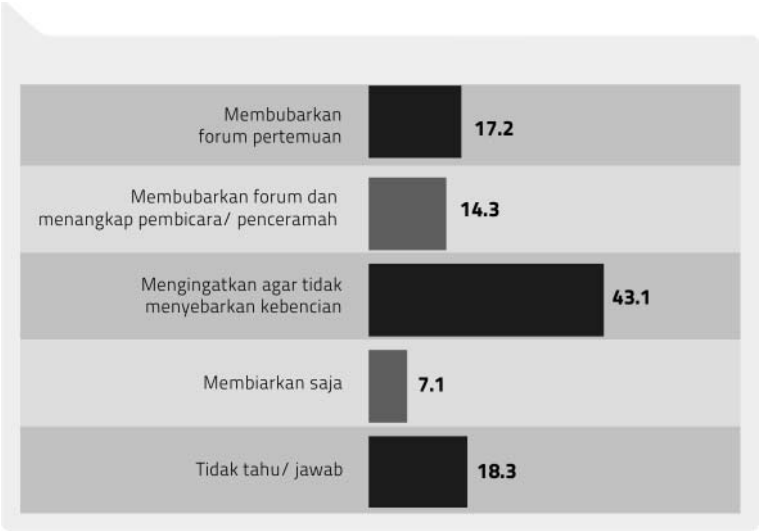

Keengganan masyarakat untuk mendukung kecenderungan *hate speech* antara satu kelompok agama terhadap kelompok agama lainnya mengindikasikan bahwa masyarakat pada dasarnya menolak kekerasan agama, sekalipun hanya dalam bentuk atau tingkat wacana. Atas dasar itu, maka cukup logis kiranya jika masyarakat menolak aksi kekerasan dalam memperjuangkan Islam.Aksi semacam itu agaknya sulit memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat sepertinya lebih menghendaki cara-cara yang lebih damai dalam memperjuangkan/ menyebarkan agama Islam. Hasil survei ini membuktikan bahwa sebagian responden umumnya (82.3%) kurang atau tidak mendukung digunakannya cara kekerasan dalam memperjuangkan Islam. Hanya sebagian kecil saja responden (7.9%) yang menganggap bahwa cara penyebarluasan agama semacam itu dapat dibenarkan.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 95 11/1/2011 5:38:05 AM

Grafik 34:
Tingkat Persetujuan terhadap Cara Kekerasan
dalam memperjuangkan Agama

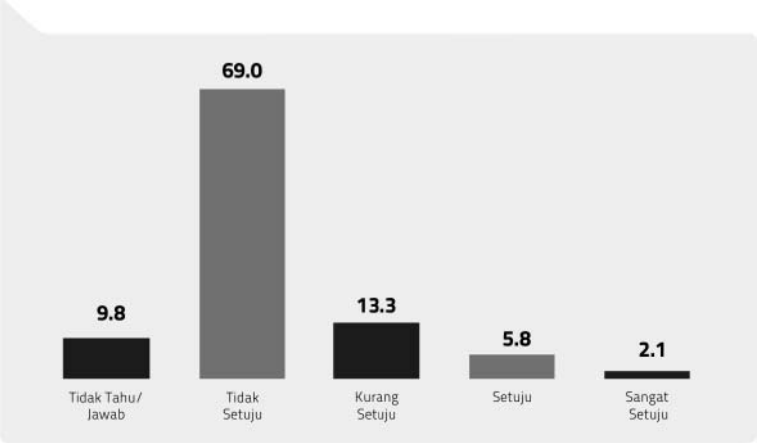

Kebebasan beragama dan toleransi antar para pemeluk agama merupakan nilai-nilai yang didukung sepenuhnya oleh mayoritas masyarakat. Cara pandang ini berakar pada diterimanya keberagaman (pluralitas) berbagai latar belakang identitas yang hidup di bumi Nusantara. Kemampuan untuk menerima dan sekaligus berdamai dengan realitas sosial yang majemuk itu merupakan unsur penting yang menjadi landasan bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk berpandangan positif terhadap kebebasan beragama dan toleransi.

Konsekuensi dari cara pandang ini adalah sikap menolak berbagai bentuk intervensi—tidak saja yang dilakukan negara, tetapi juga yang dilakukan oleh aktor non-negara—atas keyakinan beragama yang sepenuhnya berada di ranah privat. Konsisten dengan sikap semacam itu, penggunaan cara-cara kekerasaan dalam penyebarluasan agama—baik pada tingkat wacana maupun pada tingkat aksi—juga mendapat tolakan dari masyarakat.

Lebih dari itu, masyarakat juga menolak berbagai bentuk intervensi-baik yang dilakukan oleh negara dan aktor non-negara-terhadap keyakinan agama yang dianut seseorang. Bagi mayoritas masyarakat,pertanggungjawaban keimanan seseorang sepenuhnya

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 96 11/1/2011 5:38:05 AM

merupakan domain Tuhan YME, dan oleh karenanya, tak seorang pun di muka bumi ini yang dapat menggantikan posisi-Nya. Ia, oleh karenanya, maha berdaulat atas segala sesuatu. Hasil survei ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempatkan Tuhan YME sebagai hakim yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban keimanan seseorang. Hanya Tuhan YME—lebih dari siapapun juga—yang paling memiliki otoritas untuk memintai pertanggungjawaban keimanan setiap manusia.

D. Kondisi Kemajemukan

Terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan kemajemukan di Indonesia, hasil survei ini menunjukkan bahwa lebih banyak anggota masyarakat (45.9%) yang tidak menolaksinyalemen tentang adanya ancaman terhadap kemajemukan masyarakat. Kendati prosentasenya lebih kecil, namun tidak sedikit pula anggota masyarakat (35.4%) yang menampik sinyalemen seperti itu. Mereka masih beranggapan bahwa tidak ada ancaman terhadap eksistensi dan keberlangsungan pluralitas masyarakat Indonesia.

Grafik 35:
Persetujuan terhadap pernyataan
kemajemukan Indonesia sedang terancam

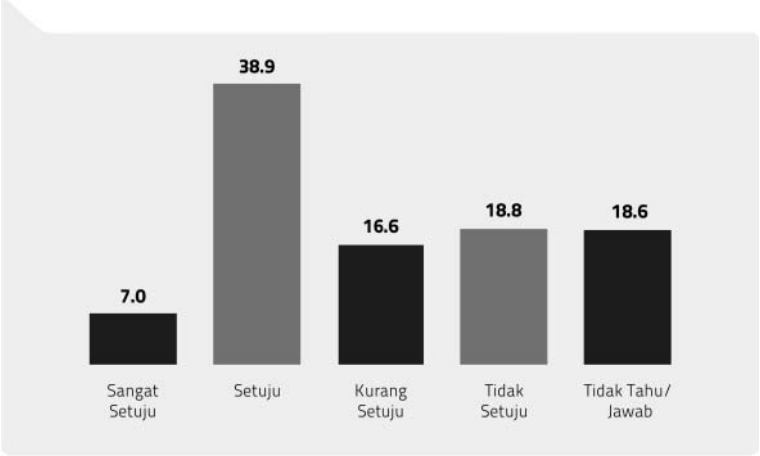

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 97 11/1/2011 5:38:05 AM

Sejalan dengan anggapan adanya gejala yang mengancam keberadaan dan keberlangsungan kemajemukan masyarakat Indonesia, hubungan antar umat beragama di tanah air akhir-akhir ini agaknya juga cenderung kurang harmonis. Toleransi dalam kehidupan beragama berada pada situasi yang cukup mengkhawatirkan -meski tidak dapat dikatakan sebagai berada pada titik nadir. Pandangan ini boleh jadi dipicu oleh berbagai kejadian hubungan antar umat beragama yang mengarah pada intoleransi. Fenomena ini terkonfirmasi dengan pandangan sebagian besar responden (55.2%) yang tidak menampik bahwa tingkat toleransi antar umat beragama dalam beberapa tahun belakangan ini cenderung menurun. Hanya 26.9% responden saja yang beranggapan toleransi antar umat beragama di Tanah Air tidaklah seburuk yang diduga.

Grafik 36:
Toleransi antarumat beragama menurun

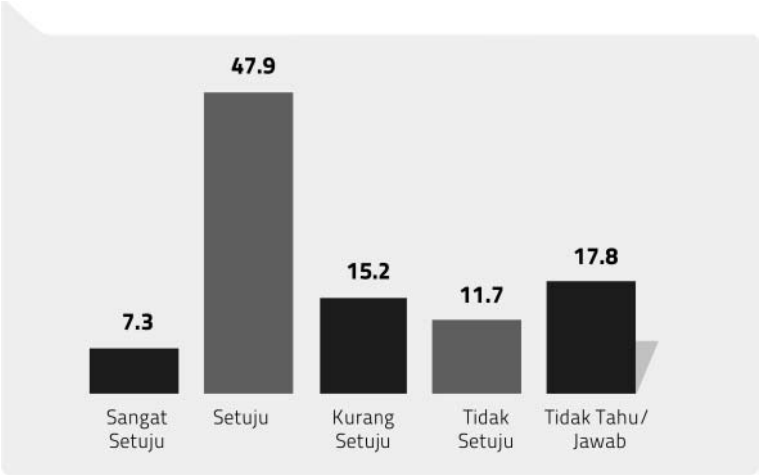

Meski lebih banyak anggota masyarakat (32.1%) yang tidak yakin bahwa berbagai bentuk media telah digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarluaskan pandangan keagamaan radikal, namun tidak sedikit dari mereka (25.4%) yang justru memiliki keyakinan yang sebaliknya. Namun demikian, cukup menarik bahwa jumlah mereka yang tidak mengetahui persoalan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 98 11/1/2011 5:38:05 AM

ini ternyata lumayan besar (42.5%). Fakta ini kemungkinan besar terkait dengan minat masyarakat kebanyakan yang agaknya kurang tertuju pada pada berbagai jenis media berbasis informasi, dan oleh karenanya, mereka kurang memperoleh informasi yang cukup memadai tentang persoalan ini.

Grafik 37:
Media massa sebagai saran untuk menyebarkan pandangan radikal

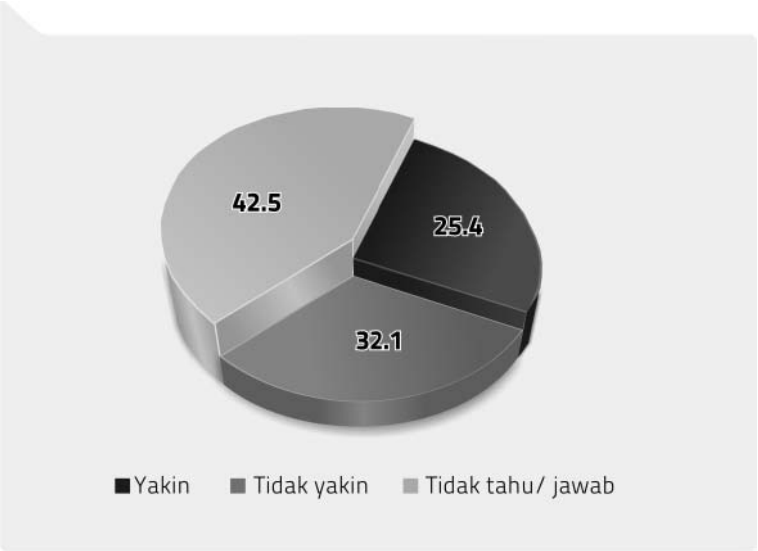

Meski tidak dapat dikatakan sebagai mayoritas mutlak, namun bagian terbesar anggota masyarakat di 10 propinsi menyatakan bahwa keberadaan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dapat mengancam ideologi NKRI, tidak saja karena gerakan ini memiliki kekuatan nyata (25.3%) tetapi juga karena ajaran yang dikembangkan oleh gerakan ini lebih mudah diterima masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (21.9%). Hanya sebagian kecil saja yang beranggapan bahwa gerakan NII tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi NKRI, baik karena menganggap NII hanyalah kedok penipuan yang mengatasnamakan Islam (11.2%) maupun yang beranggapan NII hanyalah permainan intelijen (2.6%).

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 99 11/1/2011 5:38:05 AM

Pandangan responden terkait dengan NII yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap ideologi NKRI ini perlu untuk disikapi secara berhati-hati. Proses pengumpulan data dalam survei ini sendiri dilakukan bersamaan dengan maraknya pemberitaan seputar urusan hukum yang melibatkan seorang pimpinan pondok pesantren Al Zaitun yang kerap dihubungkan dengan gerakan NII. Maraknya pemberitaan tersebut boleh jadi telah memainkan peran dalam membentuk persepsi masyarakat tentang 'kekuatan' gerakan ini sebagai ancaman bagi NKRI.

Grafik 38:
NII sebagai ancaman NKRI

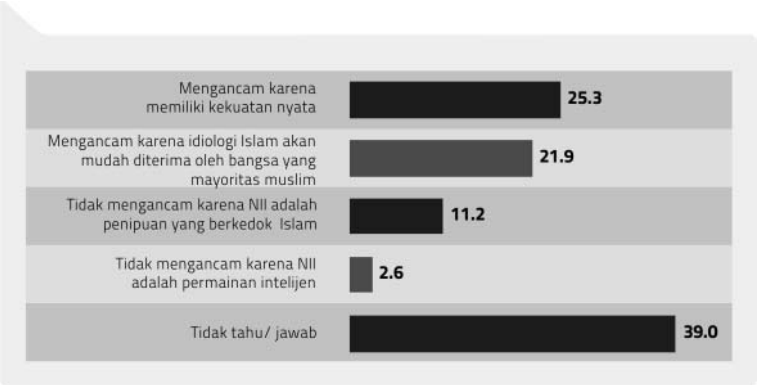

Terkait dengan persoalan NII, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jenis-jenis tindakan apa saja yang perlu diambil pemerintah guna menyelesaikan persoalan ini? Dari berbagai solusi yang ditawarkan, pengungkapan secara tuntas terhadap segala sesuatu yang terkait dengan gerakan ini tampaknya menjadi pilihan utama masyarakat (25.3%). Dua tindakan berikutnya dengan prosentase yang tidak jauh berbeda masing-masing adalah memproses secara hukum setiap pengaduan masyarakat terkait dengan modus operandi NII (19.5%) serta memproses secara hukum terhadap sejumlah orang yang diduga terkait langsung dengan gerakan ini (19%). Hanya 2.4% saja yang berpendapat bahwa masalah NII sebaiknya dibiarkan saja.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 100 11/1/2011 5:38:05 AM

Grafik 39:
Sikap Pemerintah terhadap NII

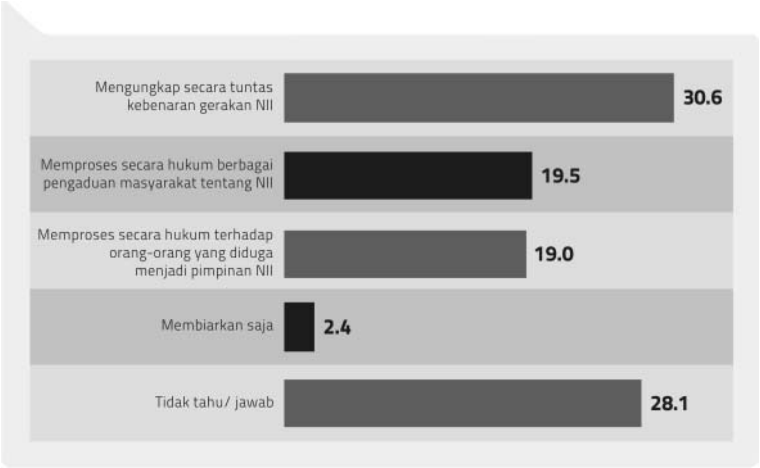

Sebagian besar masyarakat mencemaskan kondisi keberagamaan di Indonesia. Mereka umumnya memandang bahwa toleransi antar umat beragama tengah mengalami kemerosotan akhir-akhir ini. Kecemasan masyarakat terhadap kondisi keberagaman di tanah air pada dasarnya mencerminkan bahwa mereka sesungguhnya mendambakan keadaan pluralitas yang damai. Sikap-sikap intoleransi dalam pandangan keagamaan semacam itu, berdasarkan persepsi masyarakat, dapat mengalami intensitas dan eskalasi yang berpeluang bagi munculnya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

E. Pandangan terhadap Ahmadiyah

Tidak semua anggota masyarakat di Tanah Air, khususnya yang beragama Islam, mengetahui substansi isi ajaran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah rupanya berada di luar pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini ditunjukkan oleh 60.9% responden yang menyatakan ketidaktahuannya saat ditanyakan apakah mereka mengetahui tentang isi ajaran Ahmadiyah. Hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (15.3%) yang mengaku

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 101 11/1/2011 5:38:05 AM

paham atau mengetahui ajaran Ahmadiyah.

Grafik 40:
Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Ahmadiyah

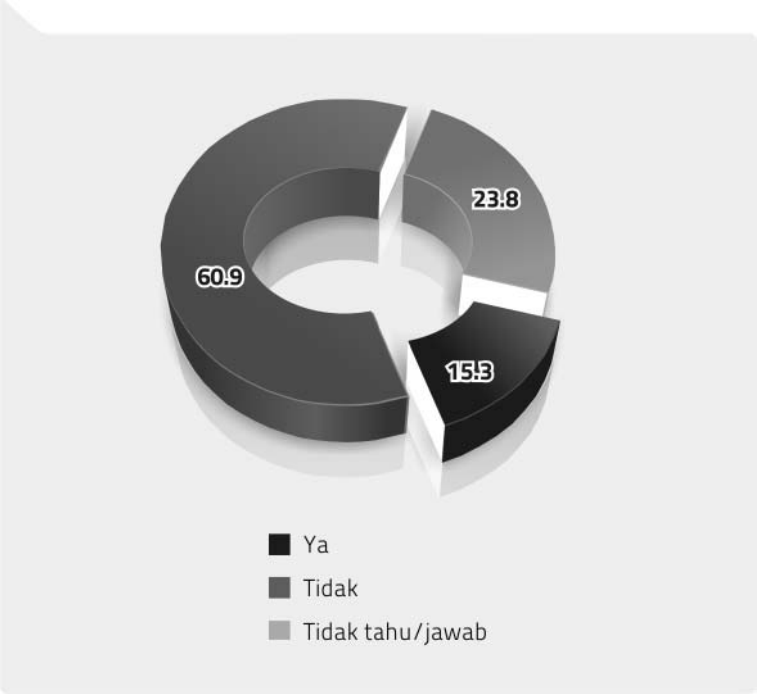

Namun demikian, meski sebagian besar anggota masyarakat mengakui bahwa mereka tidak mengetahui ajaran Ahmadiyah, uniknya mereka (52.6%) menganggap para pengikut aliran ini bukan sebagai saudara seiman. Hanya sebagian kecil saja (13.7%) yang menganggap bahwa para penganut ajaran Ahmadiyah sebagai saudara seiman.Di sisi lain, meski prosentasenya kecil, tidak sedikit pula anggota masyarakat (33.8%) yang tidak dapat menentukan sikapnya terkait dengan persoalan, apakah para para penganut ajaran Ahmadiyah merupakan saudara seiman atau bukan. Jawaban ini mengindikasikan bahwa tidak sedikit kalangan Muslim di tanah air yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang ajaran Ahmadiyah yang sesungguhnya.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 102 11/1/2011 5:38:05 AM

Grafik 41:
Ahmadiyah adalah saudara se-iman

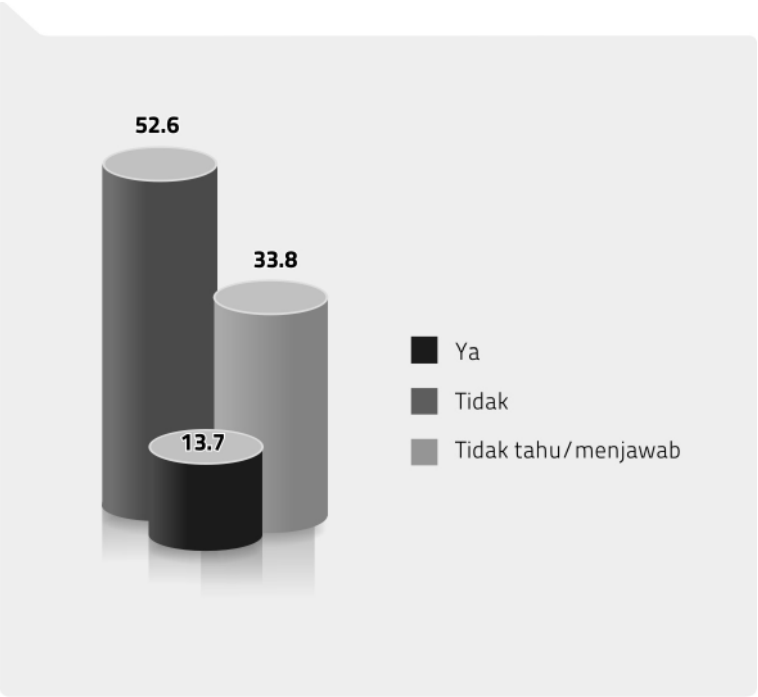

Sikap menolak menempatkan warga Ahmadiyah sebagai saudara seiman muncul baik di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan restriksi maupun di wilayah-wilayah yang tidak menerapkan kebijakan restriksi terhadap warga Ahmadiyah. Namun demikian, uniknya tolakan untuk memposisikan warga Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman itu justru lebih kuat diekspresikan oleh anggota masyarakat (57.3%) yang berada di wilayah-wilayah yang tidak menerapkan kebijakan restriksi terhadap warga Ahmadiyah dibandingkan dengan wilayah yang telah terdapat kebijakan restriksi terhadap warga Ahmadiyah sebagaimana ditunjukkan oleh 51.1% anggota masyarakat.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 103 11/1/2011 5:38:05 AM

Grafik 42:
Ahmadiyah adalah saudara se-iman
[*Crosstabulation* wilayah restriksi vs non restiksi terhadap Ahmadiyah]

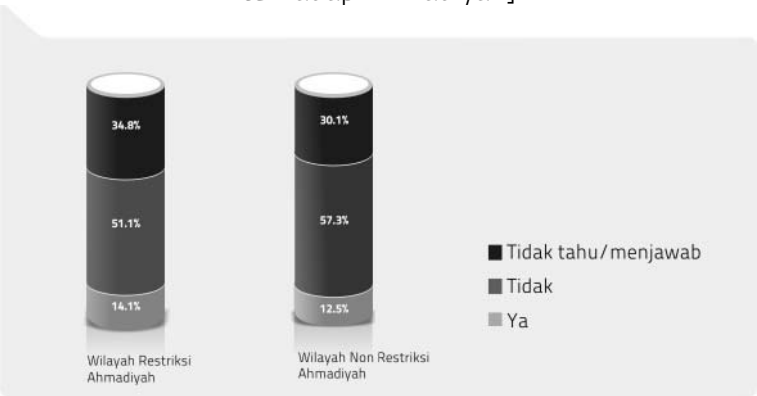

Sementara itu, berdasarkan temuan per propinsi terlihat beberapa kecenderungan yang agaknya cukup menarik untuk dicermati, sekalipun pada umumnya di seluruh propinsi yang menjadi lokasi survei memperlihatkan bahwa lebih banyak anggota masyarakat yang menganggap warga Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman dibandingkan dengan yang beranggapan sebaliknya. Beberapa temuan menarik antara lain muncul di Kalimantan Timur. Di propinsi ini terlihat bahwa mereka yang menanggap warga Ahmadiyah bukan saudara seiman dengan yang menolak anggapan semacam itu relatif seimbang dengan komposisi 28.2% berbanding 25.6%.

Yang agak mengejutkan justru muncul di Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah ini selisih (*gap*) persentase yang menolak menganggap warga Ahmadiyah bukan saudara seiman dengan yang tidak setuju dengan pandangan tersebut tampak paling tinggi (73.7% : 14.3%) dibandingkan *gap* yang terjadi di propinsi lainnya. Dengan demikian, terdapat *gap* yang hampir mencapai 60% di DKI Jakarta. Asumsi bahwa masyarakat metropolitan relatif memiliki pandangan keagamaan yang cenderung toleran dan liberal ternyata tidak dapat dibuktikan melalui survei ini. Atau dengan kata lain, konservatisme sikap keagamaan wagra DKI Jakarta jauh lebih timggi dibanding dengan wilayah lain, setidaknya untuk kasus ini.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 104 11/1/2011 5:38:05 AM

Grafik 43:
Ahmadiyah adalah saudara se iman
[*Crosstabulation* berdasarkan propinsi]

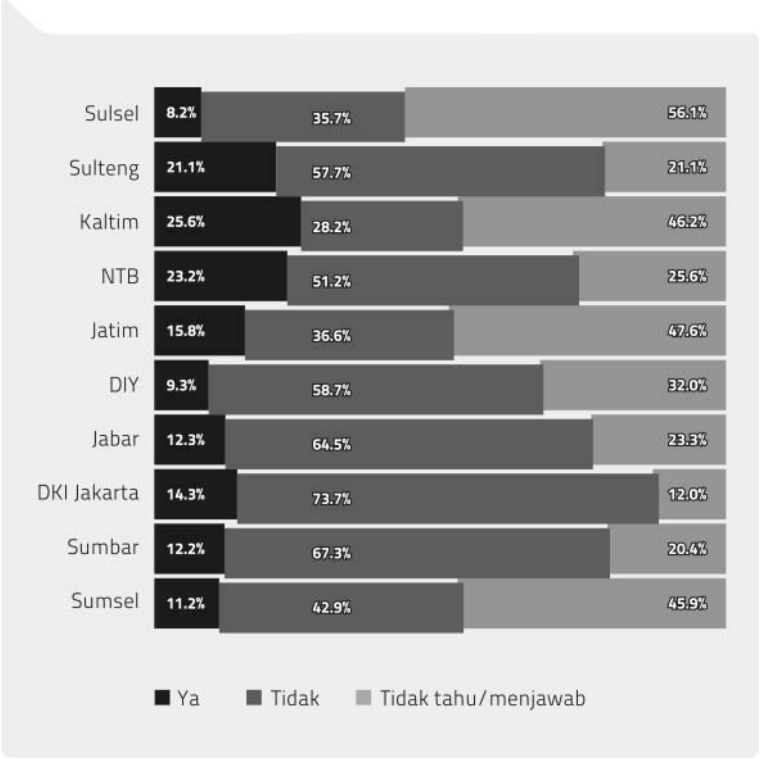

Posisi para penganut ajaran Ahmadiyah yang dipandang sebagai bukan saudara seiman tampaknya berasal dari berbagai sumber informasi yang diterima oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, informasi tentang tuduhan 'sesat' terhadap Ahmadiyah ternyata diperoleh dari banyak sumber. Terkait dengan informasi ini, ceramah keagamaan di masjid sebagai sumber informasi utama (25,4%) kemudian ikuti melalui forum pengajian (22,0%) media massa (16,8%) dan bahan bacaan (2.2%). Namun demikian, cukup menarik bahwa ternyata sekitar 1/3 responden justru tidak menjawab tentang sumber informasi yang menyatakan bahwa ajaran Ahmidyah adalah 'sesat'.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 105 11/1/2011 5:38:05 AM

Grafik 44:
Sumber informasi tentang Ahmadiyah

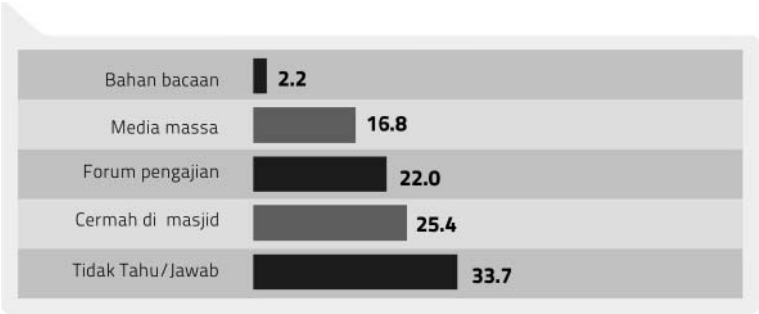

Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa pandangan mayoritas masyarakat, khususnya yang beragam Islam, tentang 'sesatnya' para pengikut ajaran Ahmadiyah boleh jadi merupakan fenomena yang masih dalam batas kewajaran. Fenomena semacam ini agaknya tidak hanya terjadi pada komunitas pemeluk agama Islam. Atau dengan kata lain, kecenderungan semacam ini pada umumnya juga kerap muncul di hampir setiap komunitas pemeluk agama lain.

Di samping itu survei ini juga memperlihatkan bahwa tidak banyak anggota masyarakat yang memiliki teman (4.1%), tetangga (4.2%) ataupun sanak saudara (4.6%) yang menganut ajaran Ahmadiyah. Atau dengan kata lain, sebagian besar responden (87.2%) mengaku bahwa mereka tidak memiliki teman, tetangga ataupun sanak saudara yang menganut ajaran Ahmadiyah

Grafik 45:
Apakah responden mempunyai teman Ahmadiyah?

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 106 11/1/2011 5:38:06 AM

Di luar dugaan, soal Ahmadiyah ternyata bukan merupakan isu yang cukup populer di masyarakat. Survei ini membuktikan bahwa sekitar setengah anggota masyarakat (50.4%) mengaku tidak pernah membicarakan soal Ahmadiyah dengan siapapun. Sementara itu dari mereka yang mengaku pernah membicarakan soal Ahmadiyah terlihat bahwa saudara menduduki peringkat atas (29.7%), kemudian diikuti oleh tetangga (11.6%) dan teman (8.3%).

Grafik 46:
Lawan bicara dalam membicarakan soal Ahmadiyah

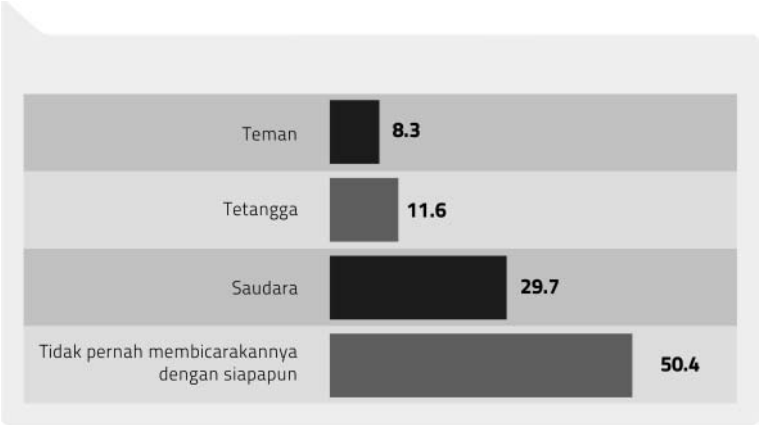

Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa secara umum Ahmadiyah memang kurang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan termasuk yang beragama Islam sekalipun. Di samping sebagian besar masyarakat tidak atau kurang mengetahui substansi ajaran Ahmadiyah, mereka juga kurang atau tidak terlalu intens mendiskusikan persoalan Ahmadiyah. Atau dengan kata lain, soal-soal yang terkait dengan Ahmadiyah tampaknya bukan merupakan isu populer di kalangan masyarakat awam. Lebih dari itu, sebagian besar masyarakat juga mengaku tidak banyak memiliki kerabat/saudara, tetangga ataupun teman yang menganut ajaran Ahmadiyah.

Di samping menggali pandangan masyarakat terkait dengan tingkat pengetahuan mereka tentang Ahmadiyah, survei ini juga

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 107 11/1/2011 5:38:06 AM

berusaha mengidentifikasi sikap anggota masyarakat terkait dengan aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dari jawaban yang dikemukakan responen terlihat bahwa aksi yang dilakukan sekelompok orang terhadap warga Ahmadiyah yang berakibat pada tewasnya 3 orang pengikut ajaran Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang,Banten, rupanya kurang atau tidak memperoleh simpati yang luas dari masyarakat—meskipun mereka beranggapan bahwa para pengikut Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman. Hal ini terkonfirmasi dari sikap masyarakat terhadap peristiwa tragis tersebut. Sebagian besar dari mereka (52.8%) mengekspresikan sikapnya dengan menyatakan bahwa peristiwa tersebut sangat disayangkan. Hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (23.4%) yang dapat 'menerima' kejadian tersebut dengan menyebutkan alasan bahwa hal semacam itu merupakan sesuatu yang 'wajar'.

Grafik 47:
Sikap responden terhadap peristiwa Cikeusik Banteng

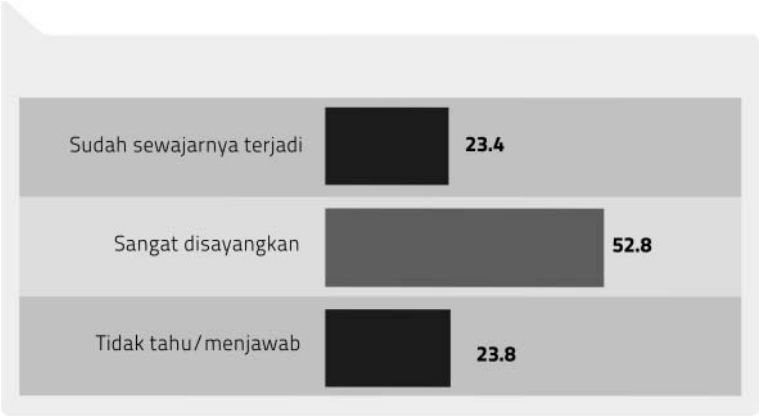

Menarik untuk membandingkan pandangan masyarakat berdasarkan wilayah restriksi dan non-restriksi terhadap warga Ahmadiyah terkait dengan kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah. Meski di kedua wilayah terlihat lebih banyak mereka yang menyayangkan terjadinya aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dibandingan dengan yang menganggapnya sebagai

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 108 11/1/2011 5:38:06 AM

sebuah kewajaran, namun ekspresi sikap menyayangkan tampak lebih kuat disuarakan oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah non-restriksi (47.1%) dibandingkan dengan mereka yang berdomisili di wilayah restriksi (37.8%).

Grafik 48:
Sikap Responden terhadap peristiwa Cikeusik Banten
[*Crosstabulation* wilayah restriksi vs non restriksi
terhadap Ahmadiyah]

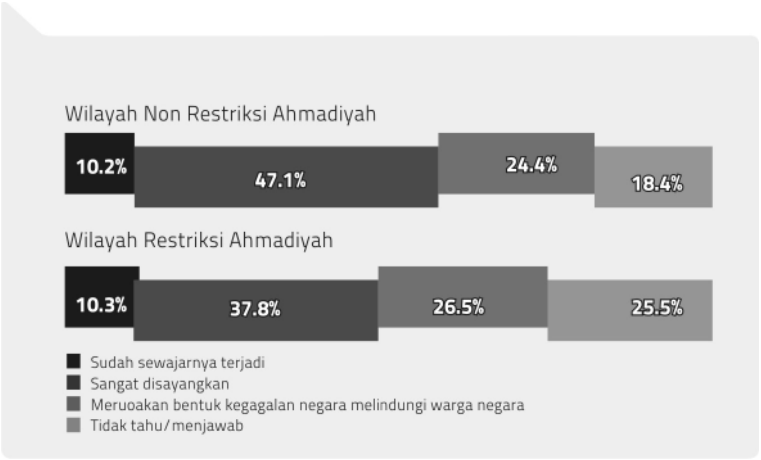

Dilihat berdasarkan propinsi hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat di seluruh propinsi pada umumnya menyayangkan terjadinya aksi penyerangan/kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Ekspresi yang paling kuat—lebih dari masyarakat di propinsi manapun—diperlihatkan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah dengan bobot 80%, kemudian diikuti oleh masyarakat yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan bobot 70%. Sementara itu ekspresi yang lumayan kuat muncul di Provinsi Sumatera Barat (68%), Jawa Barat (62.7%) Sulawesi Tengah (61.8%) dan DIY (60%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (56.4%) dan Sumatera Selatan (55%). Ekspresi paling rendah dibandingkan dengan seluruh propinsi yang menjadi lokasi survei ini terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan bobot masing-masing sebesar 41%.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 109 11/1/2011 5:38:06 AM

Grafik 49:
Sikap responden terhadap peristiwa Cikeusik Banteng
[*crosstabulation* per propinsi]

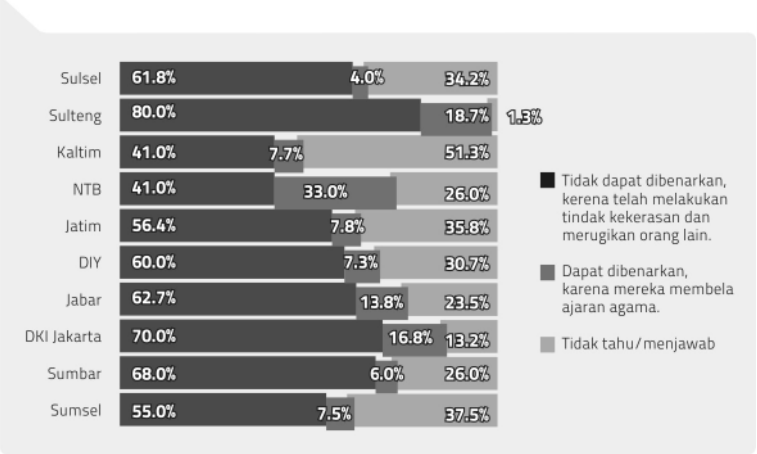

Lebih dari 40% anggota masyarakat di 10 propinsi (43.6%) tidak dapat mengidentifikasi terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Sementara itu, dari mereka yang dapat mengemukakan jawaban, hanya sekitar 1/3 anggota masyarakat saja (33.5%) yang menunjuk faktor perbedaan keyakinan agama sebagai latarbelakang terjadinya tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Sementara itu, mereka yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut merupakan rekayasa di luar kepentingan agama hanya didukung oleh minoritas masyarakat (22.9%).

Grafik 50:
Identifikasi penyebab peristiwa Cikeusik Banten

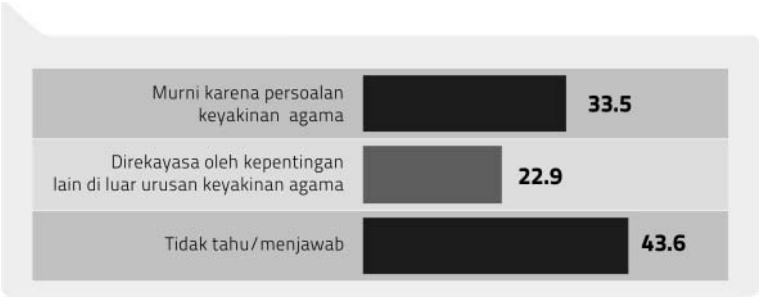

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 110 11/1/2011 5:38:06 AM

Konsisten dengan jawaban sebelumnya yang bernada menyayangkan atas tragedi Cikeusik, sebagian besar responden (60.6%) juga cenderung tidak membenarkannya. Tolakan sebagian besar masyarakat tindakan semacam itu karena terdapat unsur kekerasan serta cenderung merugikan kepentingan orang hak orang lain. Sementara itu, sikap membenarkan tindakan semacam itu dengan alasan bahwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah merupakan upaya membela ajaran agama hanya didukung oleh minoritas masyarakat dengan persentase yang tidak signifikan (11.5%). Hasil survei ini dengan sendirinya mengindikasikan bahwa tindak kekerasan fisik terhadap warga Ahmadiyah kurang atau tidak memperoleh dukungan dari masyarakat luas, atau dengan kata lain, tindakan semacam itu cenderung tidak populer di mata publik.

Grafik 51:
Penilaian terhadap kekerasan di Cikeusik Banten

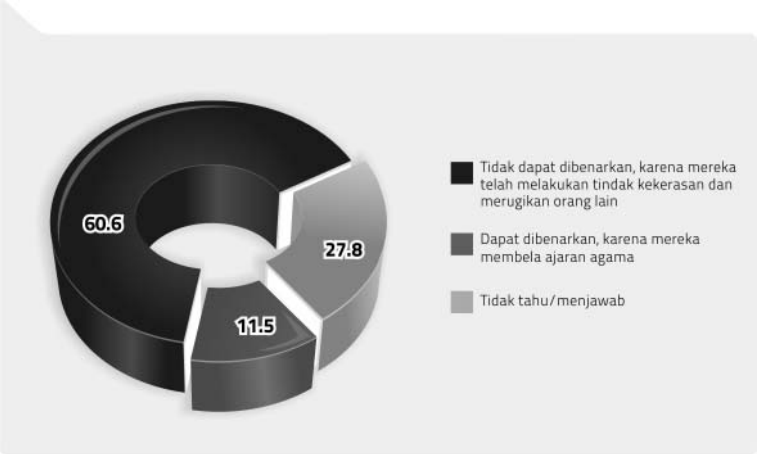

Di wilayah yang menerapkan restriksi terhadap warga Ahmadiyah dan wilayah yang non-restriksi terdapat kecenderungan sikap yang sama dari masyarakat, yakni tidak dapat membenarkan tindakan atau aksi penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan substansi terkait dengan sikap masyarakat di kedua wilayah. Namun demikian, tolakan terhadap aksi kekerasan fisik atas warga Ahmadiyah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 111 11/1/2011 5:38:06 AM

tampaknya cenderung lebih kuat disuarakan oleh masyarakat di wilayah non-restriksi dibandingkan dengan masyarakat di wilayah restriksi dengan komposisi 67.3% berbanding 58.6%.

Grafik 52:
Penilaian terhadap kekerasan di Cikeusik Banten
[*crosstabulation* wilayah restriksi vs non restriksi terhadap Ahmadiyah]

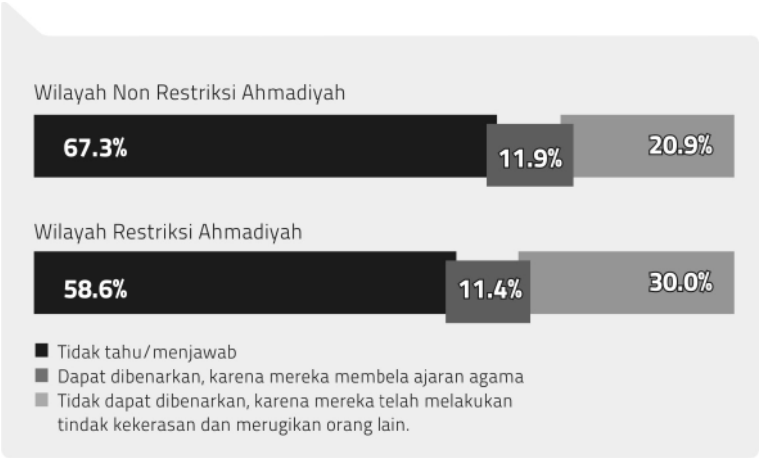

Meski sebagian besar responden cenderung menyayangkan peristiwa kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah dan cenderung tidak membenarkannya, namun saat ditanyakan, apakah tindakan penyerangan itu mewakili kepentingan mereka, muncul jawaban yang cukup menarik dari masyarakat di 10 propinsi. Benar bahwa sikap yang menganggap penyerangan tersebut sebagai tidak mewakili kepentingan responden merupakan opsi jawaban terbesar (45.5%), namun tidak sedikit pula (38.9%) yang tidak dapat menentukan sikapnya terkait dengan opsi ini. Di sisi lain, hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (15.6%) yang secara berterus-terang menyatakan bahwa tindakan penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah mewakili atau sejalan dengan kepentingan mereka.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 112 11/1/2011 5:38:06 AM

Grafik 53:
Tindakan Penyerangan terhadap Ahmadiyah mewakili kepentingan responden

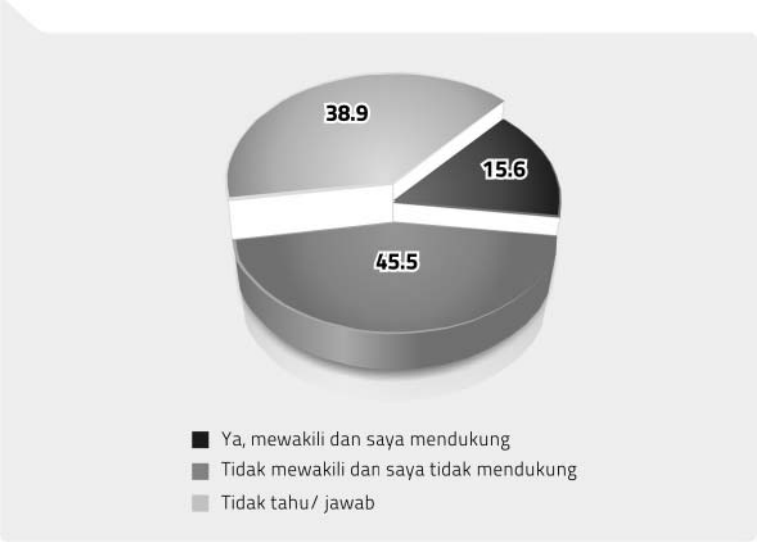

Namun demikian, pandangan ini masih cukup konsisten jika dihubungkan dengan jawaban responden sebelumnya yang sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa di kalangan warga Ajmadiyah. Jawaban yang menyatakan bahwa tindakan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah tidak mewakili diri responden masih lebih besar dibandingkan yang merasa terwakili oleh aksi kekerasan tersebut.

Dilihat berdasarkan kategori wilayah restriksi dan non restriksi terhadap warga Ahmadiyah terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan terkait dengan sikap yang kurang mendukung terhadap aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Di kedua wilayah tersebut, responden cenderung tidak merasa terwakili oleh tindakan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah. Hanya saja, sikap semacam ini tampak lebih kuat disuarakan oleh mereka yang bermukim di wilayah non-restriksi di bandingkan dengan mereka yang berdomisili di wilayah restriksi dengan komposisi 52.3% berbanding 43.5%.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 113 11/1/2011 5:38:06 AM

Grafik 54:
Tindakan penyerangan terhadap
Ahmadiyah mewakili kepentingan responden
[*crosstabulation* wilayah restriksi vs non restriksi]

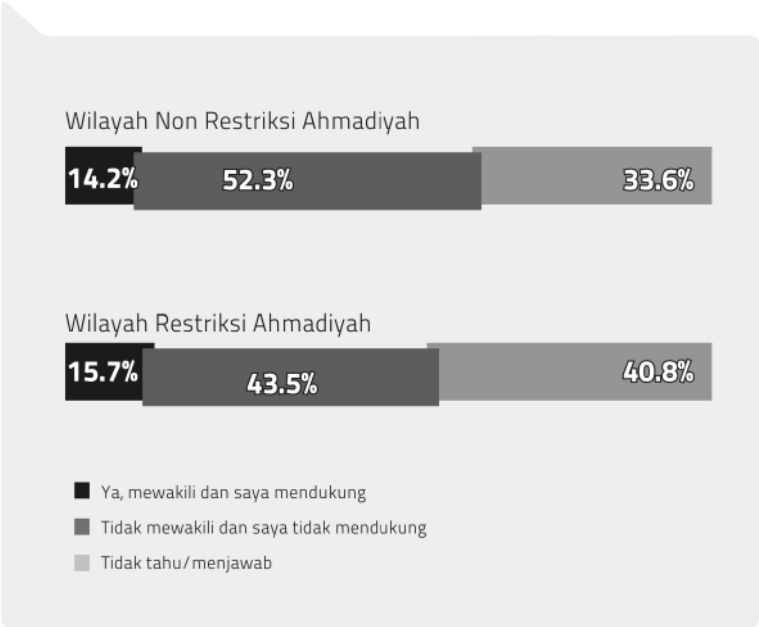

Sementara itu, berdasarkan domisili responden per propinsi terlihat bahwa di hampir semua wilayah masyarakat pada umumnya merasa tidak terwakili oleh aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah. Hanya masyarakat di satu propinsi saja yang tampak bertolak belakang dengan pandangan masayarakat di sembilan propinsi lainnya. Hal ini terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana lebih banyak anggota masyarakat yang merasa aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah itu sebagai mewakili kepentingan mereka (33%) dibadingkan dengan yang berpandangan sebaliknya (26%). Perbedaan yang agak tipis terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Di propinsi ini komposisi antara mereka yang merasa mewakili dengan tidak merasa tidak mewakili adalah 21% berbanding 25.5%.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 114 11/1/2011 5:38:06 AM

Grafik 55:
Tindakan penyerangan terhadap Ahmadiyah mewakili kepentingan responden [*crosstabulation* per propinsi]

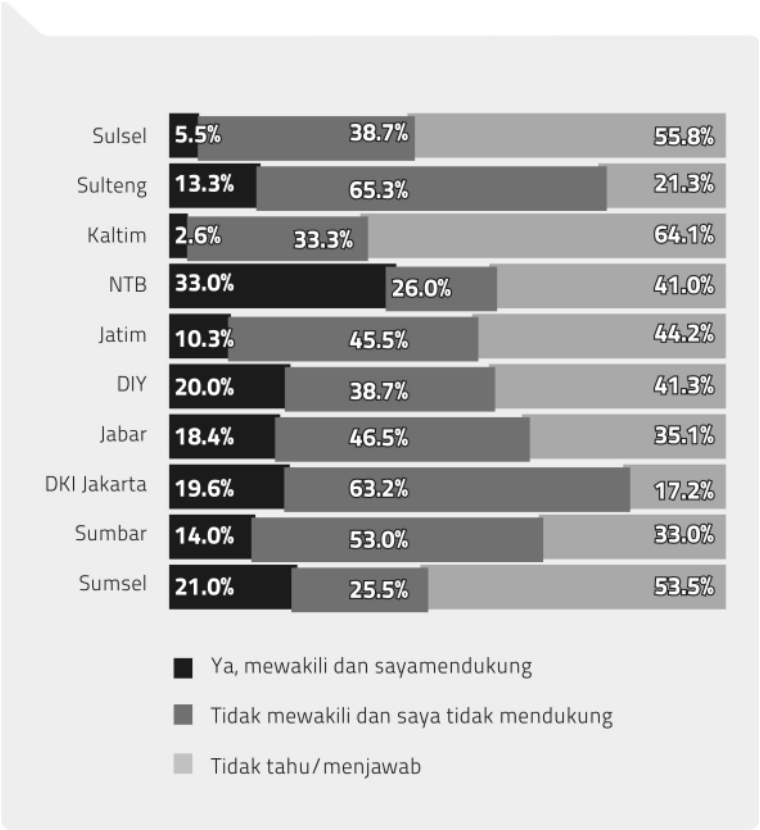

Lalu, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam persitiwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah? Di mata sebagian besar responden (66%), proses hukum terhadap para pelaku merupakan pilihan yang terbaik. Dalam persoalan ini terlihat bahwa masyarakat cenderung mendukung atau memilih jalan *rule of law* sebagai upaya penyelesaian kasus ini. Sementara itu, opsi agar para pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dibebaskan dari jeratan hukum disertai alasan bahwa mereka membela ajaran agama hanya didukung oleh segelintir masyarakat (6.8%) saja.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 115 11/1/2011 5:38:06 AM

Grafik 56:
Tindakan yang perlu dilakukan pemerintah
atas peristiwa Cikeusik

Meski masyarakat umumnya tidak dapat menerima tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dalam berbagai peristiwa akhir-akhir ini, namun bagi bagian terbesar masyarakat (32.2%), pemerintah beserta seluruh perangkatnya merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya berbagai tindak kekerasan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah dianggap tidak mampu mencegah terjadinya tragedi Cikeusik yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga Ahmadiyah. Hanya sebagian kecil saja (15.8%) yang melemparkan tanggungjawab tersebut kepada pihak para penyerang Ahmadiyah. Bahkan -meski angkanya sangat kecil- ada pula yang secara eksplisit (18.7%) justru menuding warga Ahmadiyah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas persitiwa tersebut dengan alasan: mereka telah melakukan praktik keagamaan yang menyimpang.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 116 11/1/2011 5:38:06 AM

Grafik 57:
Pihak yang paling bertanggung jawab atas
Peristiwa Cikeusik

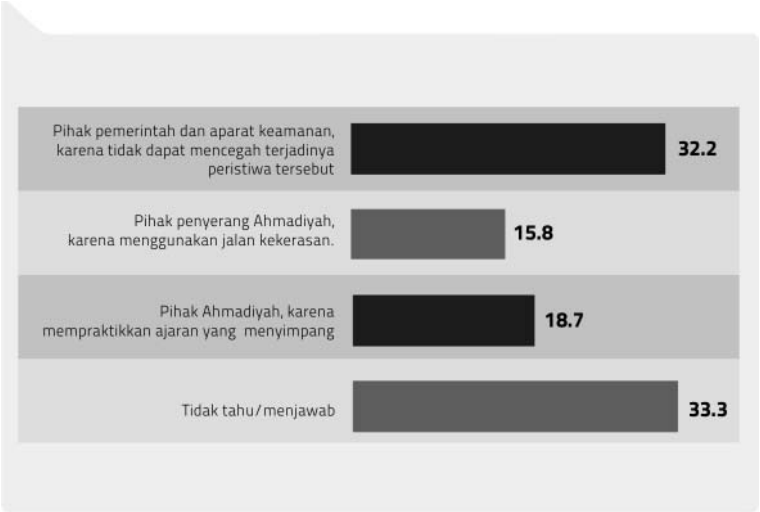

Cukup menarik untuk dicermati lebih dalam terkait dengan peran yang harus diambil pemerintah terhadap kemungkinan terjadinya tindakan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah. Hasil survei ini memperlihatkan lebih banyak anggota masyarakat (48.7%) yang tidak dapat menentukan sikapnya terkait dengan peran yang harus diambil pemerintah kepada warga Ahmadiyah saat terjadinya serangan fisik dari kelompok lain. Sementara itu dari mereka yang dapat menentukan sikapnya, sebagian terbesar (42%) memilih opsi jawaban bahwa pemerintah sebaiknya melindungi warga Ahmadiyah jika kemungkinan semacam itu terjadi. Hanya sebagian kecil saja (9.3%) yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya mendiamkan saja seandainya peristiwa semacam itu muncul. Hasil survei ini memperlihatkan bahwa, meski prosentase anggota masyarakat yang menginginkan agar pemerintah tampil sebagai pelindung warga Ahmadiyah saat terjadi serangan cukup besar, namun prosentase dari mereka yang mengalami kesulitan untuk menentukan sikapnya tampak lebih besar.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 117 11/1/2011 5:38:07 AM

Grafik 58:
Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah
apabila ada penyerangan

Secara umum terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan kecenderungan sikap, baik di wilayah yang telah merestriksi Ahmadiyah maupun di wilayah yang tidak melakukan restriksi, terkait dengan posisi yang harus diambil pemerintah manakala terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah. Di kedua tipologi wilayah, sebagian besar responden berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi warga Ahmadiyah dari kemungkinan terjadinya serangan dari pihak lain. Hanya saja ekspresi sikap untuk menempatkan pemerintah pada posisi semacam itu tampak lebih kuat disuarakan responden yang berdomisili di wilayah non-restriksi (56.4%) dibandingkan dengan mereka yang bermukim di wilayah restriksi (47.1%).

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 118 11/1/2011 5:38:07 AM

Grafik 59:
Tindkan yang harus dilakukan pemerintah apabila ada penyerangan [*crosstabulation* wilayah restriksi vs non restriksi]

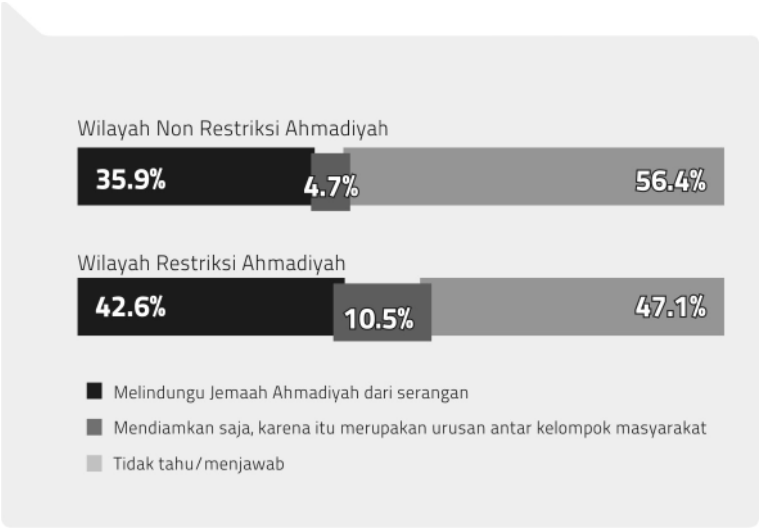

Kondisi jemaah Ahmadiyah terkait dengan keyakinan dan praktik beribadah mereka dalam 5 tahun ke depan agaknya masih sulit diprediksi. Tidak banyak orang yang dapat memastikan bahwa hak-hak keberagamaan warga Ahmadiyah akan terbebas dari berbagai kekangan dan hambatan. Hasil survei ini memperlihatkan bahwa sekitar separuh dari responden (50.4%) tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimanakah kondisi jemaah Ahmadiyah dalam lima tahun yang akan datang. Lebih dari itu, sebanyak 29.7% anggota masyarakat lainnya menyatakan bahwa jemaah Ahmadiyah akan semakin terbatas ruang geraknya, sementara 11.6% selebihnya menyatakan bahwa kondisi kehidupan beragama warga Ahmadiyah akan tetap seperti sekarang. Hanya 8.3% saja yang masih memiliki sisa-sisa keyakinan bahwa hari depan warga Ahmadiyah akan cerah alias semakin bebas dalam menjalankan agamanya.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 119 11/1/2011 5:38:07 AM

Grafik 60:
Kondisi Ahmadiyah 5 tahun mendatang

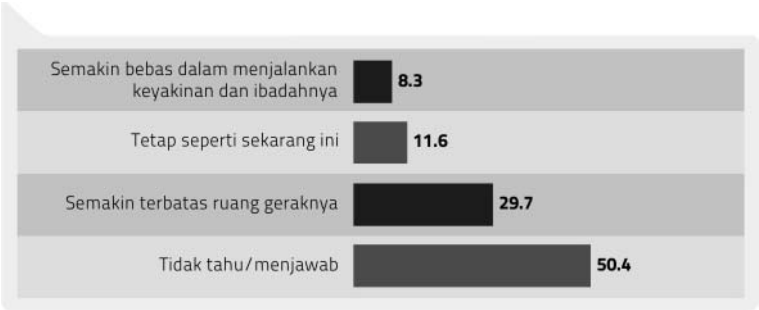

Di sisi lain, sebagian besar anggota masyarakat di 10 propinsi (41,1%) tidak dapat menentukan sikapnya terkait dengan persoalan, apakah organisasi dan keyakinan beragama jamaah Ahmadiyah sebaiknya diberikan jaminan kebebasan atau dikekang. Dari mereka yang dapat memberikan pandangannya, sebagian besar (38.8) berpendapat bahwa organisasi dan keyakinan beragama jamaah Ahmadiyah sebaiknya dilarang. Sementara itu, yang berpandangan agak moderat -dengan persentase yang lebih kecil (14.6%)- menyatakan bahwa sebaiknya organisasi Ahmadiyah dilarang tetapi keyakinannya dijamin. Prosentase yang paling kecil (5.5%) justru muncul dari mereka yang mendukung sepenuhnya hak para penganut ajaran Ahmadiyah, baik hak untuk berorganisasi maupun hak untuk memeluk keyakinan agama.

Grafik 61:
Rekomendasi penanganan Ahmadiyah

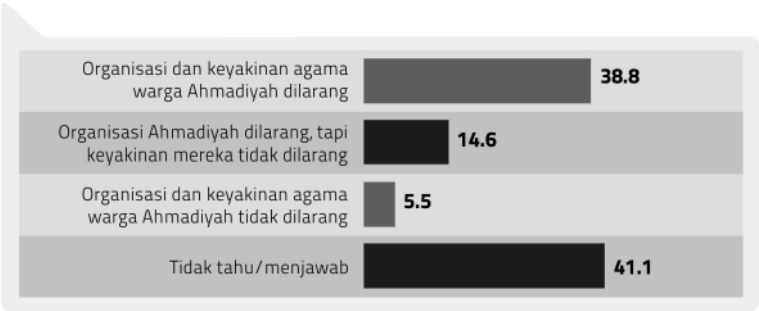

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 120 11/1/2011 5:38:07 AM

Dengan demikian, 'misteri' yang menyelimuti hari depan warga Ahmadiyah terjawab sudah melalui fakta-fakta yang terungkap dalam survei ini. Hari depan warga Ahmadiyah yang agaknya jauh dari perlindungan dan jaminan kebebasan itu ternyata—setidaknya untuk sebagian—justru muncul dari sikap warga masyarakat sendiri yang cenderung menolak Ahmadiyah, baik dalam bentuk organisasi maupun dalam bentuk keyakinan beragama.

Konsisten dengan kecenderungan untuk menolak organisasi dan keyakinan Ahmadiyah, bagian terbesar masyarakat di 10 propinsi (41.5%) ternyata bersikap mendukung posisi negara untuk ikut campur/intervensi terhadap keyakinan warga Ahmadiyah. Hanya 16.5% saja yang secara ekspilist menyatakan tolakannya terhadap campur tangan tangan negara atas keyakinan warga Ahmadiyah. Di sisi lain, cukup menarik bahwa tidak sedikit anggota masyarakat (42%) yang tidak dapat memberikan pandangan atau penilaian menyangkut persoalan semacam ini.

Grafik 62:
Negara ikut campur dalam hal Ahmadiyah

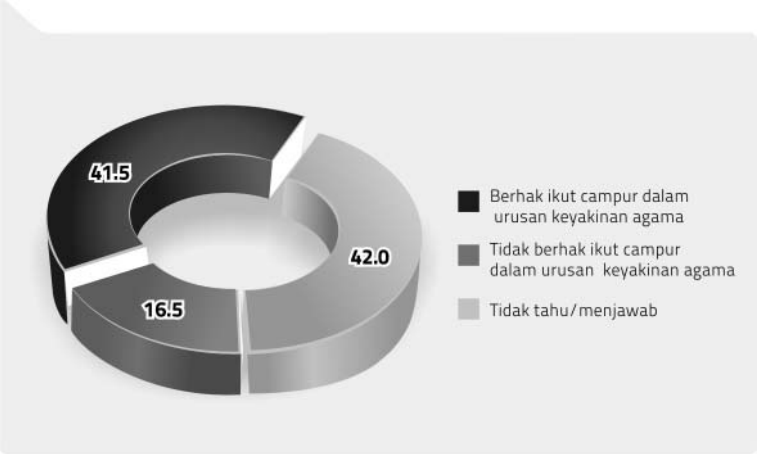

Dengan demikian, tampak terlihat bahwa terjadi inskonsistensi sikap responden terhadap persoalan ini. Pada jawaban tentang

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 121 11/1/2011 5:38:07 AM

pertanyaan keberagamaan yang bersifat umum sebagian besar masyarakat menolak berbagai bentuk intervensi pihak ketiga atas kebebasan beragama/berkeyakinan, sementara pada kasus restriksi Ahmadiyah terlihat bahwa sikap sebagian besar masyarakat cenderung membebarkannya.

Di wilayah yang melakukan restriksi terhadap warga Ahmadiyah dan di wilayah yang non-restriksi, mereka yang berpandangan bahwa pemerintah tidak berhak mencampuri urusan keyakinan agama tetap lebih besar dibandingkan dengan yang berpandangan sebaliknya. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan kecenderungan sikap masyarakat terkait dengan persoalan ini. Namun demikian, cukup unik bahwa ekspresi dukungan terhadap perlunya campur tangan pemerintah dalam urusan keyakinan agama tampak lebih kuat disuarakan oleh mereka yang bermukim di wilayah non-restriksi (48.6%) dibandingkan dengan mereka yang berdomisili di wilayah restriksi (39.2%).

Grafik 63:
Negara ikut campur dalam hal Ahmadiyah
[*Crosstabulation* wilayah restriksi vs non restriksi terhadap Ahmadiyah]

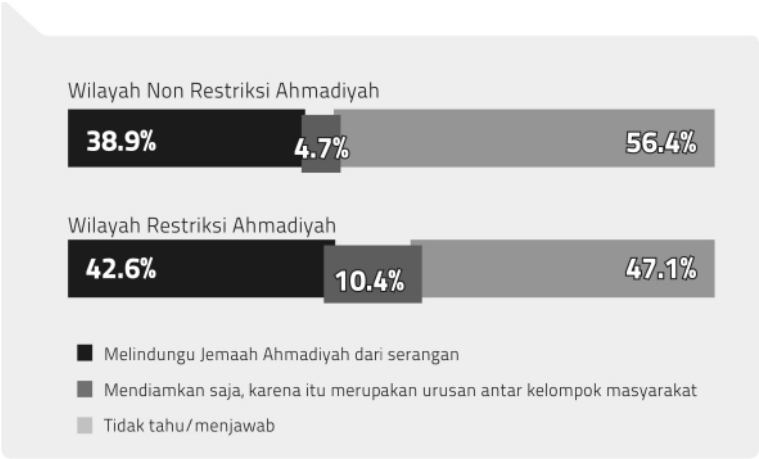

Menarik bahwa dalam memberikan penilaian terhadap latar belakang pelarangan Ahmadiyah di berbagai wilayah di

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 122 11/1/2011 5:38:07 AM

tanah air, hampir setengah anggota masyarakat di 10 propinsi (48.4%) tidak dapat memberikan jawaban. Namun, dari mereka yang dapat memberikan penilaian, bagian terbesar (24.7%) menyatakan bahwa pelarangan tersebut didasarkan atas keinginan yang murni untuk menegakkan ajaran agama. Hanya 12.3% saja yang beranggapan bahwa pelarangan itu merupakan akibat dari tekanan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, sementara 7.1% lainnya berpendapat bahwa hal itu lebih didorong oleh motif politik, yakni: keinginan pemerintah setempat untuk menarik simpati/dukungan dari kaum muslim. Mereka yang menyatakan bahwa tindakan pelarangan tersebut merupakan cermin dari ketidaktahuan pemerintah setempat tentang hak dan kebebasan beragama hanya didukung oleh segelintir anggota masyarakat (7.5%).

Grafik 64:
Latar belakang kebijakan pelarangan Ahmadiyah

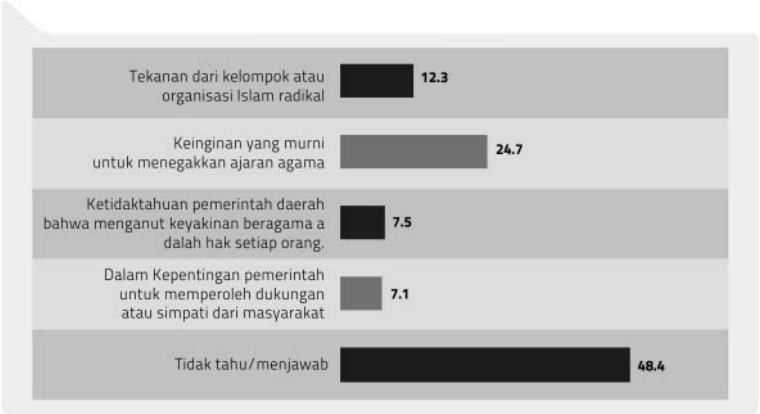

Tendensi sikap masyarakat yang menolak keberadaan Ahmadiyah, juga diperlihatkan melalui persetujuan (48.9%). terhadap fatwa MUI yang memposisikan aliran Ahmadiyah sebagai ajaran sesat berbanding dengan pandangan sebaliknya yang hanya didukung oleh 12.3% responden. Namun demikian, cukup menarik bahwa terdapat 38.7% yang tidak dapat mengekspresikan pandangannya terhadap persoalan ini. Dukungan (41.9%) yang lebih besar juga ditujukan pada SKB tiga menteri yang membatasi

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 123 11/1/2011 5:38:07 AM

ruang gerak jamaah Ahmadiyah berbanding dengan 12.7% yang menolaknya. Untuk persoalan ini, mereka yang tidak dapat menentukan sikapnya bergerak naik menjadi 45.4%.

Grafik 65:
Tingkat persetujuan terhadap tindakan berbagai elemen pada Ahmadiyah

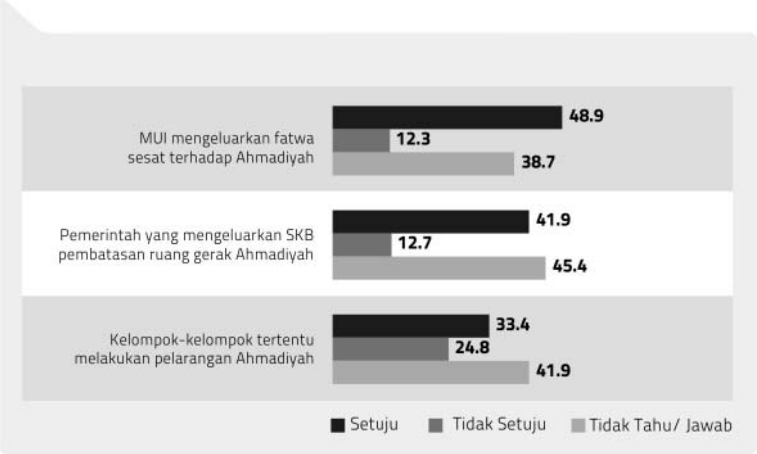

Demikian pula dengan kelompok-kelompok sipil yang melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah. Terhadap tindakan semacam ini tampak lebih banyak responden (33.4%) yang mendukungnya dibandingkan dengan yang menolaknya (24.6%). Berbeda dengan kebijakan pemerintah/negara atas Ahmadiyah yang memperlihatkan daya dukung yang cukup kuat, terhadap kelompok-kelompok sipil yang melakukan tindakan yang sama terlihat ada penurunan dukungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat tampaknya lebih setuju terhadap pembatasan Ahmadiyah yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan organisasi masyarakat sipil.

Menarik bahwa meski mayoritas responden Muslim menganggap para penganut Ahmadiyah bukan merupakan saudara seiman, namun mayoritas dari mereka (68.1%) beranggapan bahwa warga Ahmadiyah merupakan saudara sebangsa. Sementara itu, jumlah yang berpandangan sebaliknya sangat kecil (11.0%). Menarik jika dibandingkan dengan jawaban sebelumnya, di mana

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 124 11/1/2011 5:38:07 AM

tolakan terhadap warga Ahmadiyah sebagai saudara seiman dinyatakan oleh 52.6% responden Muslim. Namun, responden yang sama justru memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi (68.1%) terhadap warga Ahmadiyah sebagai bagian dari saudara sebangsa. Fenomena ini memperlihatkan bahwa responden umumnya dapat memilah sikap keagamaan di satu sisi dengan sikap kebangsaan di sisi lain. Atau dengan kata lain, pandangan responden yang memposisikan para penganut ajaran Ahmadiyah sebagai sesat ternyata tidak menghalangi responden untuk memposisikan mereka sebagai saudara sebangsa.

Grafik 66:
Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa

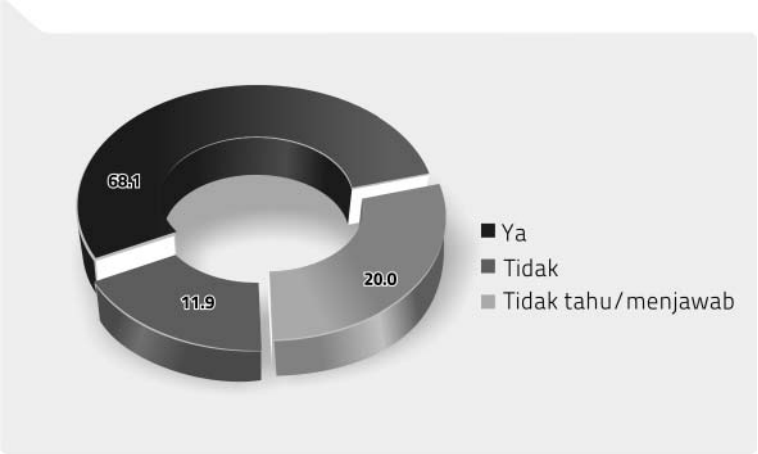

Pandangan yang menempatkan warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa tampak cukup tinggi di semua lokasi, tidak saja di wilayah-wilayah yang tidak menerapkan kebijakan restriksi terhadap warga Ahmadiyah, tetapi juga di wilayah yang telah menerapkan restriksi. Atau dengan kata lain, di semua wilayah, berdasarkan kategori ini, sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap yang tidak keberatan untuk menempatkan warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa. Hanya saja di wilayah-wilayah non-restriksi terlihat bahwa ekspresi untuk menempatkan warga Ahamdiyah sebagai saudara sebangsa tampak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah non-restriksi, yakni 78.3%

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 125 11/1/2011 5:38:07 AM

berbanding 65.1%. Kendati secara umum tidak terdapat perbedaan pandangan signifikan di antara kedua wilayah tersebut, namun selisih angka yang muncul lumayan besar.

Grafik 67:
Ahmadiyah sebagai Saudara Sebangsa
[Crosstabulation Wilayah restriksi vs non restriksi terhadap Ahmadiyah]

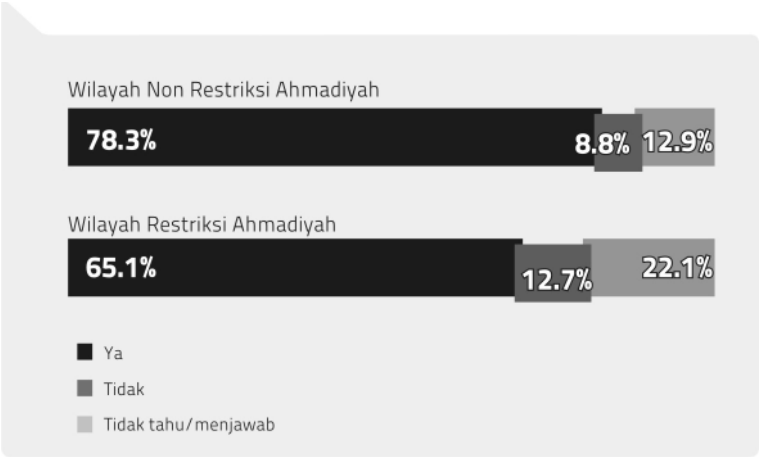

Di seluruh propinsi yang menjadi lokasi survei terlihat bahwa lebih banyak anggota masyarakat yang menganggap warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa. Dengan kata lain, tidak terdapat satu propinsi pun yang tidak menganggap warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa. Namun demikian, kecenderungan dari masing-masing propinsi terlihat sedikit terdapat perbedaan bobot satu sama lain.

Sikap yang menganggap warga Ahmadiyah sebagai sudara sebangsa dengan ekspresi yang kuat (di atas 80%) muncul di Sulawesi Tengah (84%), Daerah Istimewa Yogyakarta (84%) dan Sumatera Barat (83%). Sikap serupa dalam *range* antara 70% - 80% hanya muncul di DKI Jakarta saja dengan nilai 76.4%. Sementara itu, *range* antara 60% - 70% muncul di tiga propinsi, yaitu: Nusa Tenggara Barat (67%), Jawa Timur (66.1%)dan Jawa

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 126 11/1/2011 5:38:07 AM

Barat (65.8%). Ekspresi sikap yang menganggap warga Ahamdiyah sebagai saudara sebangsa dengan bobot yang agak lemah terjadi di Kalimantan Timur (53.8%) dan Sumatera Selatan (50%).

Grafik 68:
Ahmadiyah sebagai Saudara Sebangsa
[*Crosstabulation* Per Propinsi]

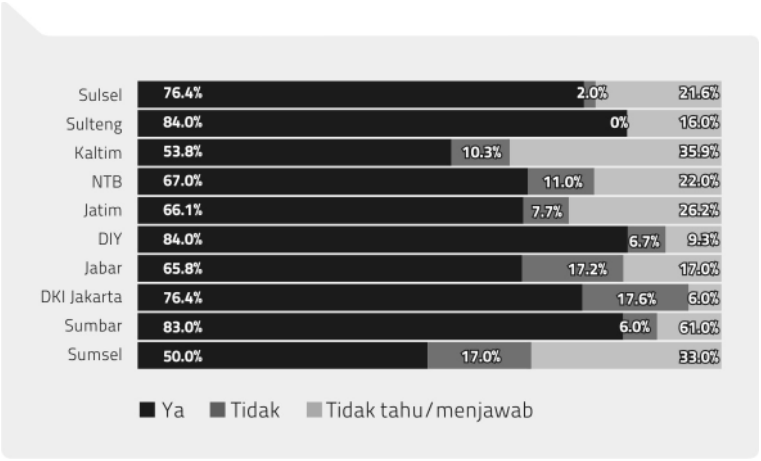

Konsisten dengan sikap terhadap pengikut aliran Ahmadiyah yang diposisikan sebagai saudara sebangsa, sebagian besar masyarakat (51.5%) rupanya juga tidak ingin terjadi semacam segregasi sosial dengan warga Ahmadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bermasyarakat, mereka pada umumnya dapat menerima untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*) dengan warga Ahamdiyah. Hanya sebagian kecil saja (15.2%) yang memandang perlu ada jarak antara mereka sebagai Muslim kebanyakan dengan para jemaah Ahmadiyah.

Keinginan untuk hidup berdampingan sacara damai dengan warga Ahmadiyah tampak cukup merata, baik di wilayah yang melakukan restriksi (51.9%) maupun di wilayah yang non-restriksi (51.3%). Sejalan dengan pandangan ini, mereka yang menolak hidup berdampingan secara damai dengan warga Ahmadiyah juga tampak kecil jumlahnya di kedua wilayah tersebut. Dengan kata lain, keinginan kuat untuk hidup berdampingan secara damai tampak

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 127 11/1/2011 5:38:08 AM

jauh lebih besar dibandingkan dengan yang menginginkan adanya jarak yanh terpisah dengan warga Ahmadiyah, tidak saja di wilayah yang melakukan restriksi, tetapi juga di wilayah yang non-restriksi. Dari sisi ini, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan terkait dengan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai dengan jemaat Ahmadiyah berdasarkan dua kategori wilayah tersebut.

Sikap bersedia untuk hidup secara damai dengan warga Ahmadiyah terlihat di seluruh propinsi yang menjadi lokasi survei ini. Hanya saja tekanan yang lebih kuat terkait dengan sikap semacam itu muncul di dua propinsi, yaitu: Sumatera Barat dan DKI Jakarta dengan bobot masing-masing sebesar 68% dan 60.8%. Sementara itu, ekspresi yang cukup kuat muncul di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur dengan bobot masing-masing sebesar 56.1%, 52% dan 51.3%. Ekspresi sikap yang berada pada *range* 40% - 50% terjadi di Provinsi Jawa Timur (48.7%), DIY (46.7%), Nusa Tenggara Barat (44%) dan Sulawesi Selatan (42.7%). Bobot eksprersi yang paling rendah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan (34.5%). Provinsi ini juga memiliki *gap* yang paling kecil antara yang bersedia hidup damai dengan warga Ahmadiyah dengan yang berpandangan sebaliknya dengan komposisi 34.5% berbanding 18%.

Grafik 69:
Pola relasi sosial Ahmadiyah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 128 11/1/2011 5:38:08 AM

Grafik 70:
Pola relasi sosial Ahmadiyah
[*Crosstabulation* wilayah restriksi dan non restriksi terhadap Ahmadiyah]

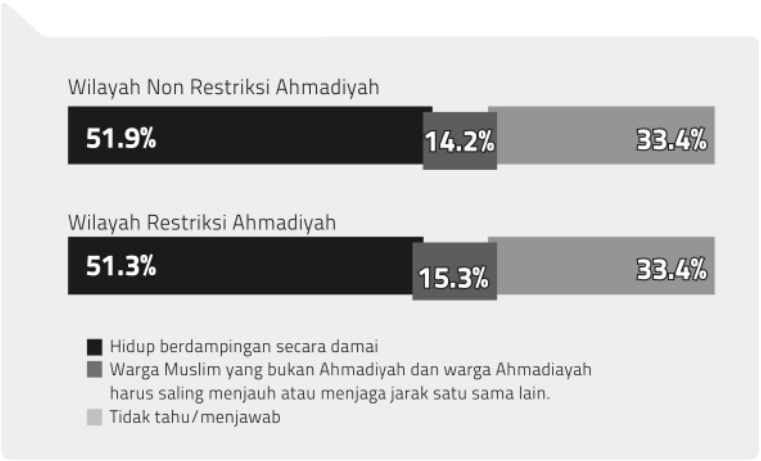

Grafik 71:
Pola hidup bagi Ahmadiyah
[*Crosstabulation* per propinsi]

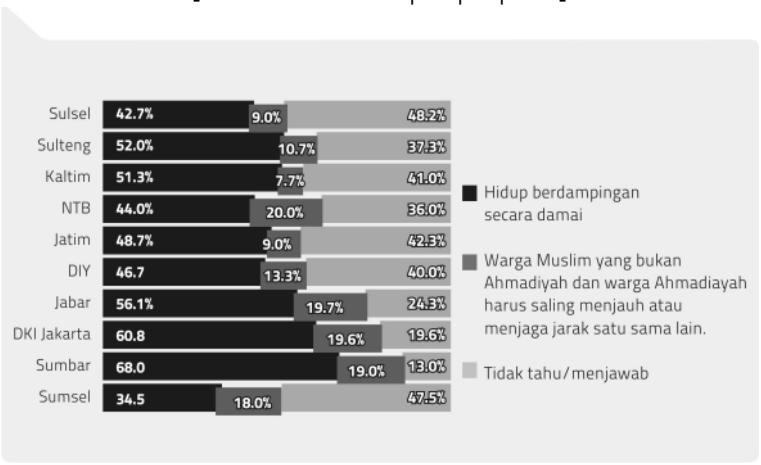

Terkait dengan keberadaan Ahmadiyah, pandangan masyarakat agaknya kurang sejalan dengan sikap keagamaan masyarakat sebagaimana temuan sebelumnya di mana sebagian

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 129 11/1/2011 5:38:08 AM

besar dari mereka menyatakan setuju bahwa keyakinan beragama seseorang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain, termasuk kesanggupan untuk hidup dalam kondisi yang majemuk. Meski masyarakat sangat menyangkan terjadinya kekerasan terhadap warga Ahamidiyah, namun mereka tidak menunjukkan penolakan terhadap upaya pembatasan Ahmadiyah di sejumlah wilayah di tanah air. Terkait dengan persoalan ini, mereka juga mendukung fatwa MUI dan SKB tiga menteri yang membatasi ajaran Ahmadiyah. Uniknya, sebagian besar masyarakat justru mengaku tidak mengetahui isi ajaran Ahmadiyah.

Sikap masyarakat terhadap Ahmadiyah ini agaknya dilatarbelakangi oleh oleh adanya anggapan bahwa Ahmadiyah melakukan praktik keagamaan yang menyimpang, dan oleh karenanya, mereka memposisikan warga Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman. Persepsi semacam ini tentu saja merupakan gejala umum dalam hal keyakinan beragama. Namun, persetujuan terhadap pelarangan Ahmadiyah, tentu merupakan bertolak belakang dengan dukungan mereka terhadap pluralitas bangsa Indonesia dan tidak sejalan dengan anggapan mereka sendiri tentang keabsolutan posisi Tuhan sebagai satu-satunya pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban keimanan seseorang.

Ini berarti bahwa pandangan masyarakat yang cenderung toleran hanya berlaku pada persoalan keberagamaan yang bersifat umum; namun pada saat persoalan ini menyentuh Ahmadiyah, masyarakat -terutama yang beragama Islam- cenderung bersikap *reserve*. Dengan demikian, di mata masyarakat yang beragama Islam, pluralitas agama di luar Islam boleh jadi bukan merupakan persoalan serius. Namun, persoalan justru muncul manakala terjadi pluralitas di dalam tubuh umat Islam sendiri. Hasil survei ini mendorong ditariknya sebuah kesimpulan bahwa masyarakat yang beragama Islam di Indonesia agaknya tidak mudah menerima sebuah kenyataan bahwa di dalam tubuhnya sendiri terdapat gejala pluralitas.

Dari sisi ini, maka sikap masyarakat yang cenderung mendukung pembatasan Ahmadiyah dan menempatkan para penganut ajaran

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 130 11/1/2011 5:38:08 AM

ini bukan sebagai saudara seiman agaknya perlu dipahami secara lebih berhati-hati. Di samping gejala untuk menganggap para pemeluk Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman perlu dipahami sebagai sebuah kewajaran karena hampir semua komunitas agama juga muncul fenomena semacam ini, dukungan terhadap restriksi atas jemaat Ahamdiyah yang dilakukan pemerintah tampaknya juga hanya bersifat pasif.

Dukungan muncul setelah kebijakan restriksi dikeluarkan, dan oleh karenanya, tidak terdapat indikasi bahwa masyarakat berinisiatif untuk mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan semacam itu. Atau dengan kata lain, seandainyapun pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan restriktif terhadap jemaah Ahmadiyah, mayoritas masyarakat tampaknya akan tetap bersikap pasif—kecuali sekelompok kecil yang menganggap kebijakan semacam itu 'penting' untuk dilaksanakan.

Dukungan yang bersifat pasif itu juga dilandasai oleh adanya fakta bahwa masyarakat menolak upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor non-negara untuk melakukan restriksi terhadap warga Ahmadiyah, termasuk penggunaan cara kekerasan. Di samping itu, masyarakat juga merasa tidak terwakili dalam aksi-aksi kekerasan semacam itu. Aksi-aksi tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh survei ini, sama sekali tidak merepresentasikan pandangan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat menyatakan dukungannya terhadap upaya hukum bagi para pelaku aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Dengan demikian, sikap mendukung pembatasan ruang gerak Ahmadiyah itu tidak secara otomatis memperlihatkan persetujuan atas berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok ini. Masyarakat jelas menolak kekerasan terhadap Ahmadiyah.Di sisi lain, sejauh para penganut Ahmadiyah diposisikan sebagai saudara sebangsa, masyarakat umumnya dapat menerima keberadaan mereka. Bahkan, masyarakat juga tidak merasa keberatan sama sekali untuk hidup berdampingan dengan warga Ahmadiyah sebagai sesama warga bangsa.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 131 11/1/2011 5:38:08 AM

F. Catatan Analitik

Dilihat berdasarkan latar belakang identitasnya masyarakat Indonesia tergolong amat majemuk. Ini adalah sebuah fakta sosiologis yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Masyarakat Indonesia yang menghuni sekitar 17.000 pulau itu telah terbiasa hidup dalam kemajemukan. Oleh karenanya, kemajemukan masyarakat Indonesia itu tidak saja merupakan fakta sosiologis (baca: pluralitas), melainkan juga merupakan fakta antropologis (baca: pluralisme). Kemajemukan tidak saja menjadi jati-diri bangsa Indonesia, melainkan telah menjadi semacam *way of life* mereka. Para pendiri negeri ini dengan jitu telah menemukan sebuah rumusan yang paling representatif dalam mengidentifikasi watak dasar masyarakat penghuni bumi Nusantara: Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagaimana temuan dalam survei ini terlihat bahwa secara umum masyarakat pada dasarnya dapat menerima perbedaan latar belakang identitas, tidak saja dari segi agama tetapi juga dari segi suku-bangsa dan budaya. Bahkan mereka beranggapan bahwa kemampuan untuk dapat menerima perbedaan identitas itu sebagai salah satu nilai luhur masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pluralitas sosial semacam itu juga merupakan jati-diri bangsa Indonesia. Dalam kerangka semacam inilah pandangan masyarakat tentang apa yang mereka bayangkan sebagai "Indonesia" itu diletakkan. Jika nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibayangkan masyarakat itu diposisikan sebagai jati-diri bangsa, maka masyarakat Indonesia pada dasarnya, mengutip Benedict Anderson, telah memiliki kemampuan dan energi kultural untuk membangun sebuah *nation* yang melampaui kesetiaan primordial—sekalipun dalam batas-batas imajiner. Masyarakat plural, demokratik serta berkeadilan sosial sebagai intisari dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sejenis *imagined communities*.[77] Oleh karenanya, penerimaan masyarakat Indonessia

77 Benedict Anderson, *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*, Pengantar: Daniel Dhakidae, Yogyakarta: Insist bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 132 11/1/2011 5:38:08 AM

terhadap pluralitas sosial secara damai tidak saja terjadi pada alam kognitif melainkan juga termanifestasi secara konkret dalam kehidupan sehari-sehari. Terkait dengan cara pandang di atas, masyarakat Indonesia menerima sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam rumusan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Bagi mereka Pancasila masih mampu berperan sebagai alat perajut kerukunan bangsa.

Dengan demkian dapat disimpulkan bahwa -karena watak dasarnya yang mampu menerima pluralitas itu- masyarakat Indonesia agaknya cenderung menolak sikap atau cara pandang yang mengarah pada bentuk-bentuk homogenitas, penyeragaman dan standarisasi nilai yang terlalu monolitik di mana tapal batas identitas sosio-kultural menjadi lenyap dan perbedaan menjadi tabu. Soal inilah yang hingga saat ini menjadi tantangan di Indonesia. Loyalitas primordial yang cenderung lebih kuat dibandingkan dengan loyalitas kebangsaan dapat menjadi penyebab ketegangan permanen dalam rangka membentuk *nation and character building*. Di tengah-tengah reformasi demokratik yang sedang berlangsung dewasa ini, maka upaya meletakkan dasar-dasar kohesi sosial antar elemen masyarakat agaknya menjadi pekerjaan rumah pertama sebelum penataan kelembagaan demokrasi dapat dilakukan. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang pengamat:

> "The real test for Indonesian democracy will come not on election day but after the result are tabulated. *Democracy and identity politics are incompatible*, particulary in ethnically and religiously diverse societies. If Indonesia is to be imagined as a pluralistic democracy, as the leaders of the reformation hope it will be, it is necessary for primordial loyalties to be subordinated to a national democratic vision. This will be possible only if the parties proposing 'imagined communities' based on priomordial loyalities are willing to accept election results that grant them only minority status."[78]

78 Mark R. Woodward, *"Imagining Indonesia: Democracy and Identity Politics in the Reformation Order,"* (Department of Religious Studies), tanpa tanggal. Lihat juga Malik Miah, "*Race and Politics: Indonesia's Ethnic Conflicts," Against the Current*, 1999.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 133 11/1/2011 5:38:08 AM

Cara pandang masyarakat yang menempatkan pluralisme sebagai faktor positif ini telah mendorong mereka untuk mengapresiasi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk memilih dan memeluk agama. Bagi sebagian besar masyarakat menentukan pilihan terhadap keyakinan bergama merupakan wilayah ekslusif orang per orang yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Atas dasar itu, masyarakat menolak segala bentuk intervensi -baik yang dilakukan oleh negara maupun kekuatan non-negara- terhadap keberagamaan dalam memilih dan menjalankan keyakinan beragama; terlebih yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Di mata masyarakat, hanya Tuhan YME yang paling memiliki otoritas memperkarakan keimanan seseorang.

Di sisi lain, masyarakat juga mengakui bahwa setiap agama dapat mengantarkan umatnya menuju jalan keselamatan. Dengan demikian, jalan keselamatan agama tidak dimiliki secara eksklusif oleh agama yang dianut masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat juga memposisikan negara sebagai entitas yang seharusnya netral dan menjaga jarak yang sama kepada setiap agama. Negara, di mata masyarakat, tidak boleh tunduk pada agama manapun, sekalipun kedudukannya bersifat mayoritas.

Sampai pada tahap ini dapat dikatakan bahwa sikap umum masyarakat terkait dengan pluralitas agama pada dasarnya cukup positif atau toleran. Tidak terdapat indikasi yang memperlihatkan sikap ekstrem dalam memandang pluralitas keyakinan agama. Sikap masyarakat ini tampak konsisten dengan pandangan mereka terhadap kebhinnekaan pada umumnya. Di samping memiliki kemampuan untuk menerima kebhinnekaan sebagai sebuah kenyataan sosial, masyarakat juga selalu berada dalam keadaan siap untuk hidup secara damai dalam kebhinnekaan.

Salah satu bukti bahwa pluralitas agama dipandang secara positif oleh masyarakat adalah munculnya kekhawatiran mereka terkait dengan merosotnya keberagaman di tanah air akhir-akhir ini. Atau dengan kata lain, masyarakat mencemaskan kondisi keberagaman dewasa ini yang dianggap tengah menghadapi ancaman serius. Masyarakat sama sekali tidak memberikan dukungan terhadap terorisme yang mengatasnamakan agama.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 134 11/1/2011 5:38:08 AM

Konsisten dengan sikap yang dapat menerima perbedaan agama, masyarakat juga menolak tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Bahkan, masyarakat mendukung secara penuh dilakukannya proses hukum kepada para pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.Namun demikian, sekalipun masyarakat menolak terhadap kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, secara umum mereka beranggapan bahwa ajaran Ahmadiyah telah menyimpang (sesat) dari apa yang mereka yakini sebagai kebenaran ajaran agama, dan oleh karenanya, para penganut ajaran Ahmadiyah dipandang bukan sebagai saudara seiman. Faktor ini pula yang membuat masyarakat cenderung mendukung upaya pelarangan Ahamdiyah di berbagai daerah, termasuk mendukung SKB tiga menteri terkait dengan pembatasan ruang gerak Ahmadiyah.

Pada sisi yang lain, masyarakat sepenuhnya juga dapat menerima keberadaan warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa, bahkan siap untuk hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Lebih dari itu, masyarakat juga beranggapan bahwa berbagai hal yang terkait dengan Ahamidiyah bukan merupakan persoalan yang penting dilihat dari sudut kepentingan pribadi mereka.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap Ahmadiyah cenderung ambivalen (mendua). Anggapan bahwa ajaran Ahmadiyah sesat serta dukungan terhadap kebijakan pembatasan ajaran Ahamdiyah berdampingan dengan sikap menganggap Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa dan sikap anti-kekerasan terhadap Ahmadiyah, termasuk kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan Ahmadiyah. []

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 135 11/1/2011 5:38:08 AM

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 136 11/1/2011 5:38:08 AM

5
Kesimpulan: Ahmadiyah saudara Sebangsa

Titik tolak pluralisme sivik, yang mengandaikan keharusan memperlakukan setiap warga negara harus dilihat sebagai anak bangsa yang memiliki hak sama dan serangkaian usaha untuk terus menerus membangun dialog membangun toleransi adalah pilihan utama bagi bangsa Indonesia mengelola keberagaman. Namun demikian, berbagai dinamika terkait kehidupan beragama/ berkeyakinan termasuk hasil studi tentang Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita, menunjukkan bahwa cara pandang keindonesiaan yang netral dan bertolak dari posisi warga negara sebagai saudara sebangsa masih belum terbangun.

Kemajemukan Indonesia adalah jati diri sejati bangsa Indonesia. Eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran dan semangat kemajemukan di kalangan segenap warganya. Indonesia tetap akan tegak selama semangat kemajemukan juga tegak. Pun demikian sebaliknya, Indonesia akan berakhir bersamaan dengan runtuhnya semangat kemajemukan. Apalagi secara konstitusional dan legal jaminan kemajemukan itu nyata-nyata menjadi prinsip dasar bernegara dan menjadi asas dari berbagai peraturan perundang-undangan. Menyantuni keberagaman termasuk menerima Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa adalah salah satu cara merawat keberagaman dan merawat Republik Indonesia.

Peranan Ahmadiyah dalam meraih kemerdekaan dan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 137 11/1/2011 5:38:08 AM

kelahiran Indonesia juga dapat menjadi argumentasi historis bahwa keberadaan Ahmadiyah sesungguhnya nyata dan merupakan saudar sebangsa yang sejak awal berjuang bersama. Pengakuan historis ini menjadi cara kita untuk memperlakukan Ahmadiyah setara dengan anak bangsa yang lain. Apalagi nyata-nyata pula Ahmadiyah tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Kontradiksi demokrasi

Secara konseptual, lonjakan kekerasan dan diskriminasi yang menimpa Ahmadiyah adalah bagian dari bentuk kontradiksi demokrasi yang justru digulirkan sebagai koreksi dari masa lalu yang otoriter. Demokrasi yang secara prinsip mengakui keberagaman dan menjadikan hak asasi manusia sebagai tolok ukur utama kualitas demokrasi, tapi justru di era demokrasi kekerasan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah mengalami lonjakan. Menelisik secara mendalam bagaimana demokrasi diperagakan oleh para penyelenggara negara, sesungguhnya yang terjadi hari ini adalah supremasi demokrasi prosedural yang menihilkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Segala kebijakan diproduksi dengan mekanisme demokrasi yang mengandalkan mayoritas sebagai pemegang kendali keputusan, meskipun keputusan itu menciderai nilai demokrasi: keberagaman dan hak asasi manusia.

Pelbagai macam aksi kekerasan dan diskriminasi yang dialami Ahmadiyah bermuara pada tiga hal sebagai persoalan utama. *Pertama,* ketidaktegasan pemerintah pusat dalam melindungi segenap anak bangsa, apa pun perbedaan agama dan keyakinannya. Ketidaktegasan pemerintah pusat membuat kelompok-kelompok tertentu semakin berani untuk menjadi hakim jalanan. Bahkan telah membuat para penegak hukum mengabaikan keadilan, sebagaimana terlihat jelas dalam peradilan kasus Ahmadiyah Cikeusik Pandeglang Banten.

Kedua, pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mendiskriminasi anak-warganya sendiri atas nama perbedaan tertentu. Pada era otonomi daerah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 138 11/1/2011 5:38:09 AM

seperti sekarang, ketidaktegasan pemerintah pusat membuat pemerintah daerah kehilangan kendali nasional dan harus berjuang sendirian menghadapi tantangan yang ada di wilayah masing-masing. Padahal pemerintah daerah berkepentingan langsung untuk menciptakan stabilitas wilayahnya demi keberlangsungan pemerintahan yang ada.

Ketiga, nihilnya politik kebangsaan. Politik kebangsaan meniscayakan adanya komitmen untuk meletakkan kepentingan semua anak bangsa (apa pun perbedaan mereka) di atas segalanya dengan menjadikan ketentuan konstitusi sebagai panglima.

Keempat, penguatan politik identitas dan politisasi identitas (agama) untuk menghimpun dukungan politik dan/ atau alat menundukkan lawan-lawan politik. Praktik politisasi identitas dipicu oleh miskinnya kreativitas politik dari elit-elit politik baik di tingkat lokal maupun nasional dalam meraih tampuk kekuasaan. Pragmatisme kemudian menjadi menonjol dan demi meraih atau mempertahankan kekuasaan, politik identitas diakomodir begitu saja tanpa memperdulikan konsekuensinya bagi kemajemukan Indonesia.

2. Berbeda tapi Sebangsa

Sikap masyarakat yang cenderung mendukung pembatasan Ahmadiyah dan menempatkan para penganut ajaran ini bukan sebagai saudara seiman merupakan pandangan yang wajar karena pada dasarnya *truth claim* dalam beragama/berkeyakinan merupakan keharusan untuk memperkuat keimanan seseorang pada apa yang diyakininya. Klaim atas kebenaran tidak selalu pararel dengan penolakannya terhadap kelompok yang berbeda, hal ini yang tergambar dalam temuan survei bahwa meski bukan saudara seiman tapi tetap sebagai saudara sebangsa.

Meski mayoritas responden muslim menganggap para penganut Ahmadiyah bukan merupakan saudara seiman, namun mayoritas dari mereka beranggapan bahwa warga Ahmadiyah merupakan saudara sebangsa. Sementara itu, jumlah yang berpandangan sebaliknya sangat kecil. Survei ini menggambarkan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 139 11/1/2011 5:38:09 AM

bahwa responden umumnya dapat memilah sikap keagamaan di satu sisi dengan sikap kebangsaan di sisi lain. Atau dengan kata lain, pandangan responden yang memposisikan para penganut ajaran Ahmadiyah sebagai sesat ternyata tidak menghalangi responden untuk memposisikan mereka sebagai saudara sebangsa.

Pandangan yang menempatkan warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa tampak cukup tinggi di semua lokasi, tidak saja di wilayah-wilayah yang tidak menerapkan kebijakan restriksi terhadap warga Ahmadiyah, tetapi juga di wilayah yang telah menerapkan kebijakan restriksi. Atau dengan kata lain, di semua wilayah, berdasarkan kategori ini, sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap yang tidak keberatan untuk menempatkan warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa.

3. Kebijakan sebagai kehendak elit

Secara kualitatif, studi ini menggambarkan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pembatasan Ahmadiyah merupakan kehendak elit di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Kehendak elit ini erat kaitannya dengan tekanan dari berbagai kelompok di tingkat lokal dan bagaimana cara elit mengelola isu Ahmadiyah sebagai kapital politik di tingkat lokal.

Temuan kualitatif dalam survei ini sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan bahwa penilaian terhadap latar belakang pelarangan Ahmadiyah di berbagai wilayah di tanah air, hampir setengah anggota masyarakat di 10 propinsi (48.4%) tidak dapat memberikan jawaban. Namun, dari mereka yang dapat memberikan penilaian, bagian terbesar (24.7%) menyatakan bahwa pelarangan tersebut didasarkan atas keinginan yang murni untuk menegakkan ajaran agama. Hanya 12.3% saja yang beranggapan bahwa pelarangan itu merupakan akibat dari tekanan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, sementara 7.1% lainnya berpendapat bahwa hal itu lebih didorong oleh motif politik, yakni: keinginan pemerintah setempat untuk menarik simpati/dukungan dari kaum muslim. Mereka yang menyatakan bahwa tindakan pelarangan tersebut merupakan cermin dari ketidaktahuan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 140 11/1/2011 5:38:09 AM

pemerintah setempat tentang hak dan kebebasan beragama hanya didukung oleh segelintir anggota masyarakat (7.5%).

Mengacu pada temuan survei yang justru mayoritas tidak mampu memberikan penilaian terhadap latar bekangan munculnya kebijakan Ahmadiyah menegaskan temuan studi kualitatif yang menduga kuat bahwa politisasi adalah niat utama elit lokal dalam mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Oleh karenanya, tidak terdapat indikasi kuat bahwa masyarakat berinisiatif untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan semacam itu. Atau dengan kata lain, seandainyapun pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan restriktif terhadap jemaah Ahmadiyah, mayoritas masyarakat tampaknya akan tetap bersikap pasif kecuali sekelompok kecil yang menganggap kebijakan semacam itu 'penting' untuk dilaksanakan.

Dukungan yang bersifat pasif itu juga dilandasai oleh adanya fakta bahwa masyarakat menolak upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor non-negara untuk melakukan restriksi terhadap warga Ahmadiyah, termasuk penggunaan cara kekerasan. Di samping itu, masyarakat juga merasa tidak terwakili dalam aksi-aksi kekerasan semacam itu. Aksi-aksi tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh survei ini, sama sekali tidak merepresentasikan pandangan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat menyatakan dukungannya terhadap upaya hukum bagi para pelaku aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah.

4. Langkah ke depan

Studi ini menemukan persepsi publik yang menegaskan bahwa sebagian besar anggota masyarakat di 10 propinsi (41,1%) tidak dapat menentukan sikapnya terkait dengan persoalan, apakah organisasi dan keyakinan beragama jamaah Ahmadiyah sebaiknya diberikan jaminan kebebasan atau dikekang. Ada tiga opsi yang diwacanakan publik dalam survei ini, yaitu [1] sebagian besar (38.8%) responden berpendapat bahwa organisasi dan keyakinan beragama jamaah Ahmadiyah sebaiknya dilarang; [2] berpandangan agak moderat —dengan persentase yang lebih kecil (14.6%)—

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 141 11/1/2011 5:38:09 AM

menyatakan bahwa sebaiknya organisasi Ahmadiyah dilarang tetapi keyakinannya dijamin; dan [3] Prosentase yang paling kecil (5.5%) muncul dari mereka yang mendukung sepenuhnya hak para penganut ajaran Ahmadiyah, baik hak untuk berorganisasi maupun hak untuk memeluk keyakinan agama.

Masa depan Ahmadiyah tetap akan sama dengan situasi yang sekarang dialami jika tidak ada terobosan sungguh-sungguh dari negara, termasuk memandu opini publik dengan kebijakan-kebijakan kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Hari depan warga Ahmadiyah yang agaknya jauh dari perlindungan dan jaminan kebebasan itu ternyata—setidaknya untuk sebagian—justru muncul dari sikap warga masyarakat sendiri yang cenderung menolak Ahmadiyah, baik dalam bentuk organisasi maupun dalam bentuk keyakinan beragama.

Penolakan terhadap Ahmadiyah yang direkam dari suara publik sesungguhnya tidak bisa sepenuhnya dijadikan rujukan utama bagi pemerintah untuk merumuskan langkah ke depan terkait dengan Ahmadiyah. Karena persepsi publik ini bisa jadi dikonstruksi oleh peragaan diskriminatif yang selama ini diprakarsai oleh negara, yang sebenarnya adalah melanggar jaminan-jaminan konstitusional warga negara.

Melihat fakta gejala intoleransi yang cukup kuat, pijakan pluralisme sivik dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru terkait kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk soal Ahmadiyah adalah pilihan tepat. Negara harus memprakarsai dialog-dialog untuk mempromosikan persamaan-persamaan sebagai modal sosial membangun toleransi; sebaliknya pemerintah juga harus memprakarsai dan mengelola perbedaan-perbedaan itu sebagai bagian dari kemajemukan yang harus diterima, karena kemajemukan adalah modal dasar berbangsa dan bernegara.[]

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 142 11/1/2011 5:38:09 AM

Daftar Pustaka

Abdul Halim Mahally, *Benarkah Ahmadiyah Sesat?*, PT Cahaya Kirana Rajasa, Jakarta, Cet. II, Tahun 2006.

Ahmad Zainul Hamdi dan Wahyuni W. *Shelter untuk Warga JAI Jatim*. Laporan hasil investigasi, Mei 2008. Tidak dipublikasikan.

Akhol Firdaus dan Ahmad Zainul Hamdi. *Sekilas tentang JAI Jawa Timur Sebelum dan Seduah SKB* (Laporan hasil wawancara dengan Ma'sum Ahmad, Shd--Pengurus Jemaat Ahmadiyah Jatim), Juli 2006. Tidak dipublikasikan.

Benedict Anderson, *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang,* Pengantar: Daniel Dhakidae, Yogyakarta: Insist bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001

Djohan Effendi, *Ahmadiyah Qodyan di Desa Manis Lor,* dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No. 4 Vol. 1 (Jakarta: 1990).

Mark R. Woodward, *"Imagining Indonesia: Democracy and Identity Politics in the Reformation Order,"* (Department of Religious Studies), tanpa tanggal. Lihat juga Malik Miah, "Race and Politics: Indonesia's Ethnic Conflicts," Against the Current, 1999.

Muhammad Abid Al-Jabiri, Dr. , *Al-Aqlul Akhlaqi Al-Arabi,* Darun Nasyr Al-Maghribiyah, 2001.

Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur SK No. Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pembatasan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 143 11/1/2011 5:38:09 AM

Rosyidin dan Ali Mursyid, *Diskriminasi Hak Sipil Minoritas: Pelarangan Pencatatan Pernikahan Ahmadiyah Kuningan dalam Ahmad Suaedi, dkk, Politisasi Agama dan Konflik Komunal; beberapa isu penting di Indonesia,* (Jakarta: the wahid institute, 2007.

Sayid Abdul Hasan Ali Nadwi, *Tikaman Ahmadiyah terhadap Islam,* Fadlindo, Jakarta, Cet. II, 2006.

Wawancara:

1. Mudasyir Achmad Surbakti, Mubalig Ahmadiyah wilayah Sumatera Barat.
2. Nanang Sanusi, Mubalih JAI Yogyakarta, tanggal 15 Juli 2011.
3. Nasrudin (51) adalah penggerak dan pendiri GERAH (gerakan anti Ahmadiyah).
4. Gatot Rianto, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBHB).
5. Cecep Ahmad Santosa, Ketua JAI Garut dan Jafar Ahmad, Mubalig Ahmadiyah Garut.

Media Cetak dan Online:

1. Koran Surya
2. www.radarcirebon.com
3. www.poskota.co.id
4. www.Inilahjabar.com
5. www.detik.com
6. www.nasional.kompas.com
7. www.pikiran-rakyat.com
8. www.tribunnews.com
9. www.vhrmedia.com
10. www.kelanakota.suarasurabaya.net
11. www.us.surabaya.detik.com
12. www.id.wikipedia.org

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 144 11/1/2011 5:38:09 AM

13. www.pakistani.org
14. www.republika.co.id
15. www.themwl.org
16. www.voanews.com
17. www.metrotvnews.com
18. www.beritajatim.com
19. www.i-berita.com
20. www.alislam.org

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 145 11/1/2011 5:38:09 AM

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 146 11/1/2011 5:38:09 AM

Lampiran

KEJAHATAN YANG TIDAK TERHUKUM

Catatan atas Peradilan Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik Banten

SETARA Institute, Jakarta, 8 Agustus 2011

1. Penyerangan dan pembantaian anggota jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Banten, 6 Februari 2011 merupakan kekerasan paling keji yang menimpa jemaat Ahmadiyah Indonesia setidaknya dalam lima tahun terakhir. Kekejian itu bahkan dapat disaksikan dengan vulgar oleh mata publik domestik dan internasional. Pembantaian 3 orang dan 5 orang luka serius yang menimpa anggota JAI merupakan kejahatan serius yang seharusnya disikapi oleh penegak hukum dengan menghukum para pelaku dan aktor intelektual peristiwa itu. Namun, vonis hakim yang dijatuhkan kepada para pelaku pada 28 Juli 2011 lalu, jelas menunjukkan bahwa kejahatan yang sesungguhnya tidak terhukum. Sejumlah 12 terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3-6 bulan penjara.
2. Vonis Pengadilan Negeri Serang merupakan peragaan praktek peradilan yang manipulatif yang sengaja dikonstruksi sejak dari Kepolisian, Kejaksaan, dan berujung pada vonis di Pengadilan. Manipulasi institusi peradilan ini sengaja diciptakan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban negara mengadili sebuah kejahatan bukan untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi dan mewujudkan keadilan.
3. Sejak awal, pascaperistiwa penyerangan, **Kepolisian RI** dengan secara sengaja mengkonstruksi peristiwa ini sebagai penyerangan dan bentrokan dengan meletakkan anggota

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 147 11/1/2011 5:38:09 AM

jemaat Ahmadiyah sebagai pihak yang menjadi pemicu penyerangan tersebut. Kepolisian bahkan gagal mengurai fakta-fakta peristiwa yang sesungguhnya telah direncanakan karena kepolisian sibuk mengkonstruksi penolakan tuduhan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dugaan perencanaan penyerangan yang melibatkan banyak aktor dan bahkan dari luar Propinsi Banten hanya dibantah oleh Kepolisian dengan argumen, bahwa kemajuan teknologi memungkinkan pergerakan orang secara cepat, apalagi SMS rencana penyerangan sudah beredar sejak tanggal 2 Februari 2011, 4 hari sebelum peristiwa terjadi.

4. **Kejaksaan,** berbekal pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian mengkonstruksi dakwaan dengan menjerat para pelaku dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman 6 tahun dan Pasal 170 KUHP tentang perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan tuntutan pidana maksimal 12 tahun. Dua dakwaan yang berbentuk alternatif ini gagal diurai dalam Surat Dakwaan dan dalam proses pembuktian sehingga di ujung pemeriksaan di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut para terdakwa dengan hukuman 5-7 bulan penjara. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa mengakui bahwa pilihannya menuntut ringan para terdakwa didasarkan pada permintaan dari ulama-ulama Banten. Pertimbangan semacam ini jelas merupakan kekeliruan dalam proses peradilan, karena jaksa menjadi tidak profesional dan independen.

5. Sedangkan para hakim **Pengadilan Negeri Serang** yang memutus perkara ini dengan sangat ringan didasarkan pada pertimbangan subyektif para hakim yang dalam proses persidangan menunjukkan kebenciannya kepada Ahmadiyah. Hakim mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan dan memilih menggunakan emosi keagamaannya untuk memutus perkara. Sebagaimana diperagakan oleh salah satu hakim saat memeriksa Deden (terdakwa dari anggota JAI), Pinta Uli BR. Tarigan. Pada sidang tanggal 31 Mei 2011. Sama dengan para jaksa yang menangani kasus ini, para hakim pun bekerja tidak profesional dan tidak independen.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 148 11/1/2011 5:38:09 AM

6. Seluruh institusi penegak hukum yang terlibat dalam menangani perkara ini telah secara sempurna menampilkan wajah penegakan hukum di Indonesia yang tidak fair dan tidak independen. Dalam kasus-kasus yang mengatasnamakan agama, peradilan di Indonesia gagal memberikan keadilan. Peradilan di Indonesia tidak memberikan kontribusi apapun bagi pemajuan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain tidak profesional dan tidak independen, pengerahan massa dan tekanan publik yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam menekan seluruh proses pengadilan, telah nyata berpengaruh terhadap prinsip independensi dan peradilan yang berwibawa.
7. Vonis Pengadilan Negeri Serang sama saja artinya bahwa pengadilan telah gagal menjadi benteng terakhir bagi perlindungan hak warga negara. Dalam kasus kekerasan atas nama agama, peradilan di Indonesia gagal memberikan keadilan. Vonis di PN Serang menegaskan bahwa pengadilan dalam tekanan sebagaimana terjadi di Cibinong Bogor untuk kasus Cisalada, di Temanggung untuk kasus penodaan agama, di Bekasi untuk kasus Ciketing. Bahkan Putusan Mahkamah Agung terkait dengan Gereja Taman Yasmin juga gagal dieksekusi. Pembangkangan atas Putusan MA justru diprakarsai oleh Pemkot Bogor dan didukung oleh Kemendagri. Dalam situasi demikian, nyaris tidak ada lagi ruang keadilan bagi kasus-kasus kekerasan atas nama agama.
8. Jika dilihat dari pasal-pasal yang dituduhkan terhadap semua terdakwa adalah pasal-pasal serius di mana ancaman pidananya sampai 6 tahun. Bahkan, pasal tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian diancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Hal ini menguatkan dugaan bahwa sejak awal Kepolisian dan Kejaksaan mengkonstruksi penyidikan dengan tidak hanya menempatkan Ahmadiyah sebagai pemicu penyerangan, tetapi juga pihak yang menghendaki terjadinya penyerangan. Kesimpulan penyelidikan kepolisian itu mendasarkan pada alasan yang sangat lemah, yakni keberadaan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik yang meresahkan masyarakat, dan kedatangan 17 anggota jemaat Ahmadiyah

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 149 11/1/2011 5:38:09 AM

ke Cikeusik yang disebut tidak mengindahkan himbauan dari aparat untuk mengevakuasi diri sebagai bentuk provokasi. Dengan demikian baik polisi maupun jaksa secara konsisten menempatkan pihak yang menjadi korban adalah yang paling bersalah, bukan para penyerang. Padahal, fakta empiris menunjukkan kedatangan 17 jemaat Ahmadiyah ke Cikeusik bukan merupakan faktor penentu terjadinya penyerangan. Datang atau tidaknya mereka ke Cikeusik, penyerangan akan tetap terjadi karena telah direncanakan.

9. SETARA Institute menyimpulkan bahwa kekeliruan utama dalam penanganan kasus penyerangan anggota JAI di Cikeusik terletak pada **Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono** yang gagal menegaskan keberpihakannya untuk menegakkan hukum secara adil dalam kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Perlu dicatat, bahwa Kepolisian RI dan Kejaksaan RI adalah institusi peradilan di bawah koordinasi Presiden. Jika SBY sungguh-sungguh ingin memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara, maka SBY seharusnya memberikan perhatian khusus kepada Polri dan Kejaksaan untuk bekerja sungguh-sungguh. Vonis Pengadilan Negeri Serang menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak mampu *(un able)* dan tidak mau *(un willing)* menegakkan keadilan dan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

10. SETARA Institute merekomendasikan:

    a. Presiden RI memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung agar mengevaluasi kinerja polisi dan jaksa yang menangani kasus Cikeusik.

    b. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memeriksa aparat kepolisian yang menangani kasus Cikeusik dan mengeluarkan laporan evaluasinya secara tebuka.

    c. Komisi Kejaksaan RI memeriksa para jaksa yang menangani kasus Cikeusik dan mengeluarkan evaluasinya secara terbuka.

    d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil prakarsa menembus kebekuan keadilan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 150 11/1/2011 5:38:09 AM

dengan berpijak pada laporan investigasi yang dilakukannya, yang hingga hari ini tidak dipublikasikan.

e. Komisi Yudisial memeriksa para hakim yang mengadili kasus Cikeusik dan memberikan sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para hakim. []

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 151 11/1/2011 5:38:10 AM

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 152 11/1/2011 5:38:10 AM

Rekonstruksi SETARA Institute
Penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikesik
8 Agustus 2011

1. Ringkasan Kronologi[1]

Aksi penyerangan yang dilakukan sekitar 1500-an orang terhadap kediaman Suparman pimpinan Ahmadiyah setempat berlangsung pada Minggu, 6 Februari 2011 di Kampung Peundeuy. Kendati ada upaya perlawanan dari komunitas Ahmadiyah, namun upaya mereka tidak dapat membendung aksi-aksi penyerangan itu. Akibat penyerangan, sebanyak 3 orang tewas, puluhan orang lainnya menderita luka-luka. Sebelum terbunuh, para korban mengalami pengeroyokan dan penganiayaan berat oleh para penyerang.

Jumat, 4 Februari:

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pandeglang melakukan pertemuan. Mereka membahas tentang komunitas Ahmadiyah dalam menjalankan aktivitas kepercayaan atau keagamaannya di Cikeusik.

1 Kronologi disusun berdasarkan wawancara saksi, korban, Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 153 11/1/2011 5:38:10 AM

Sabtu, 5 Februari:

Pukul 10.00: Empat orang komunitas Ahmadiyah dipanggil dan dibawa oleh petugas Polres Pandeglang untuk "diamankan" di Markas Polres. Mereka yang dibawa adalah Ismail Suparman (Parman), Haitonang Aquino (istri Parman), Putri Aquino suparman (2 tahun, anak Parman), dan Atep Suratep. Semula, Suparman tidak mengetahui alasan dan latar belakang pengamanan terhadap keluarga dan anggota Ahmadiyah. Namun dia menduga, polisi **telah mengetahui ancaman bahaya** yang akan terjadi sebelum penyerangan dilakukan. Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Cikeusik, Madsupur, menuturkan tentang ancaman penyerangan itu.

Suparman mengatakan, dia "diamankan" bersama tiga orang lainnya dievakuasi supaya tidak menjadi sasaran pelampiasan amuk massa. Dia mengungkap:

"Mereka ke saya ngomong hanya dipanggil, diundang ke Polres, tidak ngomong-ngomong akan ada penyerangan, nah sampai di sini ngomong, bapak di sini bukan ditangkap tapi diamankan, demi keamanan karena akan ada penyerangan. Itu yang ngomong Koramil dengan polisinya, Kapolsek. Keluarga saya ini berantakan anak saya tiga lagi masih di sana, di muara. Di sini anak saya cuma satu yang dibawa, karena saya tidak tahu bahwa akan dievakuasi."

Suparman mengungkap, komunitas Ahmadiyah di sini sering diganggu pemerintah dan MUI setempat kendati kelompoknya di Cikeusik telah mentaati Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri sebagaimana dituturkannya:

"Gabungan pak, orang-orang kampung dimanfaatkan dari Rancaseneng itu, dari kampung sebelah. Orang sananya, juga provokatornya lurah itu pak, lurah, Haji Samid, sembunyi sembunyi itu. Terus ketua MUI-nya itu, guru saya itu, Haji Amir, kami kondusif, kami tidak bertengkar, kami tidak apa apa. Memang saya pernah diminta membubarkan diri, saya gak mau. Karena apa, kita (punya. pen) hak hidup. Untuk membu-barkan diri saya gak mau, saya hanya mau mentaati perjanjian, ya saya mentaati SKB saja, dan berbaur hidup dengan masyarakat dalam bidang sosial, itu saja."

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 154 11/1/2011 5:38:10 AM

Minggu, 6 Februari:

Pukul 07.00-08.00:

Rombongan Jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dari Jakarta dan Serang yang berjumlah sekitar 17 orang datang ke rumah Parman dengan menggunakan mobil Suzuki APV dan Toyota Kijang Innova. Mereka tidak menemukan Suparman dan keluarganya. Maksud kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dan ingin mengecek kebenaran tentang informasi bahwa Suparman ditahan aparat kepolisian. Mereka disambut oleh komunitas Ahmadiyah Kampung Peundeuy.

Pukul, 09.00-10.00:

Dalam waktu yang bersamaan dan berdekatan pula dengan lokasi kejadian, telah berkumpul puluhan petugas Polres Pandeglang yang turun dari truk Dalmas (Pengendali Massa). Polisi diturunkan hanya untuk berjaga-jaga atas kemungkinan ancaman aksi penyerangan dan bentrokan.

Sementara itu di lokasi yang berbeda, berjarak sekitar 500 meter dari tempat kejadian, ratusan orang dari desa lain telah berkumpul di halaman Masjid Al-Huda, Kampung Cangkore. Di lokasi ini terdapat Kyai Ujang, yang juga pimpinan FPI Pandeglang. Sebagian lagi berkumpul di perempatan jalan Umbulan. Mereka datang dengan menggunakan empat bus dan satu mobil pick up. Massa penyerang telah menyiapkan batu, golok dan minyak tanah. Mobilisasi massa penyerang pada dua titik ini telah diketahui para petugas Polsek Cikeusik.

Terdengar teriakan-teriakan lantang yang mengumandangkan "Allahu Akbar" dan "bubarkan Ahmadiyah" dari massa yang berkerumun dan mempersiapkan penyerangan.

Seorang saksi mengatakan, sebelum kejadian sudah terlihat massa bersenjata tajam telah menunggu dijemput beberapa kendaraan dan penyerangan ini jelas terlihat direncanakan dan dikoordinasikan pengerahan massa.

"Massa telah kumpul kan, kebetulan saya datang sekitar (jam)

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 155 11/1/2011 5:38:10 AM

sepuluh lebih seperempat ya, saya lihat orang orang itu telah siap, untuk dijemput oleh mobil kan, dipusatkan di satu titik gitu."

Pukul 10.00:

Sekitar 500 orang pun telah bergerak mendekati ke tempat kejadian sambil meneriakkan "Allahu Akbar" dan "bubarkan Ahmadiyah" untuk membangkitkan semangat massa dalam melakukan penyerangan.

Pukul 10.30:

Tanpa dilengkapi peralatan dalam menangani huru-hara, beberapa petugas polisi yang berjaga berupaya mencegah masuknya massa penyerang yang merangsek ke halaman depan rumah Suparman. Namun upaya polisi gagal total dalam mencegah dan menghalangi bentrokan. Lemparan batu massa penyerang dibalas oleh lemparan dari anggota komunitas Ahmadiyah. Bentrokan tidak terelakkan. Upaya bertahan dari komunitas Ahmadiyah, tidak berlangsung lama.

Belasan massa mulai mengamuk dan dua sepeda motor (Yamaha Mio dan Honda Tiger) menjadi sasaran perusakan. Kemudian disusul perusakan dua unit mobil. Mereka pun menghancurkan dan membakar kedua mobil itu hingga hangus (Toyota Kijang dan Suzuki APV). Rumah juga mereka rusak dengan lemparan batu dan pemukulan dengan kayu dan bambu.

Seorang ibu bernama Aminah, ibu Suparman, sempat menghampiri polisi dan memohon dengan sangat sambil menangis kepada para petugas polisi supaya anak-anak dan tamunya dilindungi dan diselamatkan dari pengeroyokan dan penganiayaan, namun polisi tak dapat berbuat apa-apa sebagai aparat keamanan dan penegak hukum.

Karena gagal mempertahankan diri, sebagian komunitas Ahmadiyah berupaya menyelamatkan diri dari amukan massa. Ada yang lari untuk menyelamatkan diri ke tengah sawah.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 156 11/1/2011 5:38:10 AM

Saat bersamaan seorang saksi datang. Saksi menuturkan:

"Saya saat itu datang sekitar 10.45, saya langsung masuk ke dalam rumah pak Parman, saat itu saya menyaksikan pak Deden dan pak Diaz dikeroyok dan dianiaya massa. Saat itu pak Deden dan pak Diaz hampir sama sekali tidak melakukan perlawanan, saya juga menyaksikan pak bagaimana tangan pak Deden hampir putus disabet golok."

Karena sebagian besar berupaya menyelamatkan diri, jemaat Ahmadiyah yang ada di dalam rumah hanya tersisa empat orang.

Massa berbagi empat tindakan: sebagian melakukan pengeroyokan dan penganiayaan di halaman, sebagian lainnya melakukan perusakan rumah, mobil dan motor, sebagian melakukan pengejaran terhadap jemaat yang melarikan diri, sebagian lagi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jemaat Ahmadiyah yang ada di dalam rumah.

"Saya melihat banyak juga teman teman yang lari menyelamatkan diri ke tengah sawah,..."

Sejumlah massa juga terus mengejar terhadap anggota jemaat yang menyelamatkan diri. Saksi menuturkan:

"Massa saat itu sudah sangat sporadis, mereka membawa senjata tajam, bambu runcing, parang dan lainnya. Mereka seperti sudah merencanakan hal ini. Saat tu sudah berjaga kurang lebih 30 polisi, tapi polisi tidak dapat melakukan apa-apa"

Dalam pengeroyokan dan penganiayaan di halaman, dua orang komunitas Ahmadiyah menjadi sasaran tindakan sadis. Keduanya disabet golok. Kendati sudah berlumuran darah dan tidak berdaya lagi, masih terus dipukuli secara bertubi-tubu dengan kayu dan bambu sampai nyawa mereka terenggut. Kedua mayat yang berlumuran lumpur ini masih menjadi sasaran amarah. Kedua jenazah ini dihantam dengan kayu dan bambu oleh massa yang mengamuk. Tubuh dan kepalanya masih juga diinjak-injak dengan cara melompat dan menghempaskan kaki mereka.

Puluhan polisi tak dapat berbuat banyak. Mereka tidak dapat membendung aksi penganiayaan dan pengrusakan. Banyak dari

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 157 11/1/2011 5:38:10 AM

mereka hanya menyaksikan penganiayaan berat itu. Hanya dua petugas polisi yang berupaya meminta massa untuk mengehentikan aksi sadis mereka. "Stop-stop. Tahan-tahan," seru kedua polisi itu.

Pukul 11.00:

Konsentrasi massa mulai berkurang dan aksi penganiayaan berakhir. Para petugas kepolisian lalu melakukan evakuasi terhadap korban yang berada di dalam rumah Parman. Mereka ditemukan dalam kondisi terluka parah. Dengan menggunakan mobil Ranger, petugas polisi menyelamatkan korban ke rumah sakit terdekat. Tidak lama berselang datang polisi dan membawa tiga jenazah dan beberapa korban luka-luka menuju RSU Malingping.

Saksi mengungkapkan:

"Pada salah satu korban terdapat celana panjang yang dililitkan ke leher korban, sepertinya korban tewas digantung. Saya tidak menyaksikan secara pasti di mana korban dianiaya."

Akibat penyerangan itu, tiga orang meninggal di lokasi kejadian. Identitas korban adalah:

1. Warsono (31 Thn), berdomisil di RT. 16 RW. 17 Muara Baru Jakarta Utara
2. Tubagus Candra Mubarok Syafei (34 Thn), berdomisili di Babakan Desa Pondok Udik RT. 01. RW. 04 Kemang, Bogor, Jawa Barat
3. Roni Patina Sarani (35 Thn), berdomisili di Kampung Luar Batang RT. 14 RW. 03 Penjaringan Jakarta Utara ;

Sementara korban luka berat adalah:

1. Ferdiaz (30), menderita luka bacokan di punggung, betis kanan, luka lebam di seluruh tubuh, kecuali kepala karena pakai helm.
2. Deden Sujana (45) menderita luka bacok dipergelangan tangan kanan bagian luar kondisi nyaris putus. Luka bacok di

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 158 11/1/2011 5:38:10 AM

kaki, paha, dan tangan kiri. Kondisinya kini setengah sadar.

3. Baby (45) asal Jelambar, Jakarta Barat, matanya bengkak, hidung keluar darah, mulut keluar darah, menagalami luka dalam.
4. Adit (26), warga Kota Serang
5. Ahmad Mashudi (22), menderita luka bacok di seluruh tubuh dengan wajah bengkak, mata lebam, mulut jontor. Mashudi ditelanjangi massa di sawah lalu dipukuli.

Kerugian material, sejauh ini belum dapat ditaksir. Namun, satu rumah hancur, mobil Suzuki APV dan Kijang Innova hangus dibakar, motor Yamaha Mio dan motor Honda Tiger dirusak.

2. Kesimpulan

1. Muspida dan Bakor Pakem Pandeglang telah melakukan pertemuan Jumat, 4 Februari. Mereka membahas tentang komunitas Ahmadiyah dalam menjalankan aktivitas kepercayaan atau keagamaannya di Cikeusik.
2. Ada indikasi tentang tiga tokoh yang berpengaruh untuk memprovokasi aksi pembubaran Ahmadiyah, yaitu Kyai Ujang, Haji Samid, Kepala Desa Umbulan M. Djohar, dan Ketua MUI Cikeusik KH. Amir.
3. Aparat kepolisian, bahkan Kepala Polres Pandeglang Ajun Komisaris Besar (AKB) Alex Fauzy Rasyad **sudah mengetahui** akan terjadinya peristiwa penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Kampung Cipeundeuy, Kecamatan Cikeusik, Kebupaten Pandeglang. Pimpinan JAI Cikeusik Ismail Suparman dan keluarganya serta Atep telah "diamankan" di Markas Polres. Mereka dijemput oleh petugas polisi, petugas Komando Rayon Militer (Koramil) dan Camat pada Sabtu, 5 Februari.
4. Aparat Polres Pandeglang dan Polsek Cikeusik telah menurunkan para petugas di TKP sebelum aksi penyerangan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 159 11/1/2011 5:38:10 AM

oleh sekelompok massa itu berlangsung. Polisi juga mengetahui dua titik pengerahan ratusan orang. Namun penerjunan petugas ini justru tidak dilengkapi dengan peralatan standar dalam penanganan huru-hara.

5. Massa penyerang tidak berasal dari Kampung Peundeuy dan Desa Umbulan, melainkan beberapa desa di Cikeusik dan Pandeglang. Mereka dimobilisasi dengan menggunakan empat bus dan satu mobil pick up. Mereka berkumpul di dua titik, yaitu di halaman Masjid Al-Huda di Kampung Cangkore dan perempatan jalan Umbulan yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP untuk menunggu komando. Mereka bersenjatakan golok, kayu dan bambu. Mobilisasi massa ini membutuhkan dana.

6. Massa penyerang berhasil merangsek masuk halaman depan rumah Ismail Suparman. Memang ada upaya beberapa petugas polisi mencegah secara persuasif, upaya ini gagal total. Aksi saling lempar batu antara massa penyerang dan komunitas Ahmadiyah yang bertahan di dalam rumah, tidak terelakkan.

7. Perusakan sepeda motor, pembakaran mobil dan penghancuran rumah tidak dapat dicegah oleh polisi yang berkumpul di dekat truk. Bahkan pengeroyokan dan penganiayaan massal tidak terbendung. Puncak kebrutalan massa adalah terbunuhnya tiga orang jemaat Ahmadiyah dan beberapa lainnya menderita luka berat dan ringan, serta menyelamatkan diri.

8. Polisi tidak dalam posisi melindungi korban penyerangan, melainkan hanya menyaksikan perbuatan sadis dan hanya dua petugasnya yang berupaya meminta dihentikan penganiayaan massal itu. Langkah-langkah antisipasi dan tidak merasa kecolongan yang dinyatakan pimpinan polisi, ternyata telah gagal menyelamatkan orang dari amuk massa.

9. Penerjunan tambahan pasukan polisi sudah terlambat, karena sudah ada yang terbunuh, terluka, mobil terbakar dan rumah rusak.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 160 11/1/2011 5:38:10 AM

3. Penelusuran Pascaperistiwa

Investigasi SETARA Institute mengkonfirmasi dugaan adanya skenario penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah. Tokoh sentral di lapangan dalam peristiwa ini adalah Kyai Ujang yang merupakan Ketua FPI Pandeglang dan mantan Laskar Ahulus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) pimpinan Ja'far Umar Tholib. Ujang juga yang menurut keterangan saksi menyebarkan SMS mengajak warga untuk melakukan penyerangan.

SETARA Institute mengidentifikasi indikasi-indikasi penyerangan ini terencana dan dibiarkan oleh polisi, yaitu:[2]

1. Polisi telah mengetahui 2 hari sebelum peristiwa
2. Kepolisian tidak menggunakan prosedur penanggulangan anarki.
3. Adanya massa dari luar Desa Umbulan yang turut serta dalam penyerangan. Bahkan diakui oleh salah satu pelaku, bahwa puluhan orang di antaranya dikirim dari Bogor Jawa Barat. Massa berada di bawah pimpinan sejumlah tokoh ulama yaitu Kyai Ujang, H. Komarudin, KH. Khairudin, KH. Hafidz, Kyai Muhammad, Kyai Munir, Kyai Endang, dan Kyai Amin.
4. Adanya massa yang berlogat Jakarta dan sejumlah kendaraan yang berplat "B".
5. Kampung Pendeuy Desa Umbulan adalah wilayah terpencil yang sengaja dibidik untuk diserang. Doktrin "memukul lawan yang terlemah" berlaku dalam peristiwa Cikeusik.
6. Adanya dugaan pembagian sejumlah uang yang dilakukan di rumah Kepala Desa Umbulan.
7. Kebutuhan publikasi kelompok penyerang dalam rangka penyebaran kecemasan dan 'teror' untuk menimbulkan rasa tidak aman.
8. Adanya tanda-tanda khusus (pita hijau dan pita biru) yang digunakan oleh kelompok penyerang.

2 Wawancara SETARA Institute dengan saksi, 'orang yang diduga' pelaku. Indikasi ini juga diolah dari berbagai sumber termasuk video rekaman peristiwa yang beredar.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 161 11/1/2011 5:38:10 AM

DARI INTOLERANSI KE GENOSIDA

Sasaran korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, sepanjang 5 tahun terakhir terdiri dari beberapa kelompok minoritas di dalam dan di luar suatu agama atau keyakinan. Secara lebih spesifik adalah kelompok penganut Ahmadiyah dan jemaat Kristiani yang tersebar di sejumlah daerah.

Jika dipertautkan dengan salah satu peristiwa mutakhir, khususnya penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah adalah peristiwa pada 6 Februari 2011 di Kampung Peundey, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Komunitas Ahmadiyah sebagai korban kekerasan bukan saja menjadi sasaran diskriminasi, akan diusir atau dievakuasi dari tempat tinggal, penghancuran rumah dan harta benda mereka, namun juga menjadi sasaran penyerangan langsung dari pengeroyokan dan penganiayaan massal serta pembantaian atau pembunuhan.

Apa pun kepentingan politik, sosial-budaya dan keagamaan yang melatari peristiwa itu dapatlah dikemukakan bahwa bentuk kejahatan itu sangatlah keji, sehingga mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan penduduk. Hampir tidak terbayangkan bahwa kejahatan itu berlangsung secara buas dan mengerikan, menyayat hati nurani serta sangat merendahkan martabat dan harkat (*dignity*) manusia. Dampak yang ditimbulkan pun sangat membekas dalam memori atau kenangan paling buruk dan trauma bagi penduduk setempat, juga anak-anak dan perempuan. Selain kehancuran harta benda, komunitas ini juga menderita kerusakan tubuh (*personal integrity*) – luka berat dan ringan – bahkan kehilangan anggota keluarga untuk selama-lamanya karena menjadi sasaran pembantaian.

Rangkaian kekerasan atau kejahatan atas nama agama itu terus berlangsung dan berulang tanpa dapat dicegah dengan sasaran korban yang sudah teridentifikasi dengan jelas pada komunitas agama atau keyakinan tertentu. Situasi ini berpotensi mengancam keselamatan suatu komunitas yang dapat bergerak menuju suatu rangkaian kejahatan serius (*serious crimes*) atau kejahatan luar

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 162 11/1/2011 5:38:10 AM

biasa (*extra-ordinary crimes*) yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan genosida (*genocide*) atau pemusnahan suatu kelompok agama atau keyakinan.

SETARA Institute mengamati bahwa rangkaian kekerasan atau kejahatan atas nama agama telah mendekati unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 6 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), yaitu:

> "suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan. Jenis-jenis perbuatan yang dimaksud adalah: (a) membunuh anggota kelompok tersebut; (b) menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c) secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; dan (e) memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Kekerasan atas nama agama yang terus berlangsung dan berulang, terlebih lagi mengandung kaitannya dengan suatu kepentingan politik, dapat mengarah dan menabur benih-benih kejahatan genosida. Secara spesifik, arahan politik dan perbuatan ini tertuju pada komunitas Ahmadiyah sebagai sasaran langsung kekerasan itu. Lagi pula, dapat diduga perbuatan atau tindak kekerasan ini justru banyak yang tidak dapat dicegah oleh aparat keamanan dan penegak hukum.

Pola dan tipologi kekerasan itu dalam berbagai bentuk perbuatan atau tindakan yang mencakup pembunuhan, penganiayaan, pengusiran atau pemindahan komunitas secara paksa, membatasi kebebasan beribadah dan melarang beraktivitas, perusakan dan pembakaran rumah-rumah dan masjid-masjid, serta bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Rangkaian perbuatan

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 163 11/1/2011 5:38:10 AM

atau tindakan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:[3]

1. pembunuhan, kasus Cikeusik (6 Februari 2011) dan kasus Lombok Barat (2001).
2. penganiayaan, peristiwa ini berupa penyerangan, pemukulan, dll.
3. perusakan dan pembakaran rumah, masjid dan sekolah, serta penghancuran harta benda lainnya, di antaranya terjadi di Lombok Timur, Manis Lor Kuningan, Cianjur, Cisalada Bogor, Parakan Salak Sukabumi, Tasikmalaya, dll.
4. penyisiran, pengusiran atau pemindahan komunitas secara paksa, serta dampaknya bagi perempuan dan anak dalam komunitas ini: kasus Mataram (NTB).
5. diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, menikah, kependudukan, beribadah haji.[4]
6. pembatasan beribadah dan pelarangan beraktivitas: dampak intimidasi, teror, penutupan dan perusakan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
7. pemaksaan memilih atau pindah agama: pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan ini berupa pemaksaan pindah keyakinan.
8. ancaman verbal dan intimidasi, memberi tanda khusus pada rumah-rumah Ahmadiyah, seperti di NTB dan bahkan beberapa teror lainnya di malam hari untuk menimbulkan rasa takut seperti di Garut, Tasikmalaya, Lombok Barat, dll.
9. dampak yang diperhitungkan dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian pada suatu komunitas: seperti hidup dalam pengungsian atau akibat perumahan, kebun dan ternak yang hancur dari tindakan perusakan sarana-sarana hidup mereka. Ini sangat nyata dalam peristiwa yang menimpa jemaat Ahmadiyah di NTB.

---

3 Lihat Laporan Pemantauan tentang Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeya-kinan 2007, 2008, 2009, 2010, SETARA Institute.

4 Lihat Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan, Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, 2008.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 164 11/1/2011 5:38:10 AM

10. bentuk-bentuk pernyataan pejabat, tokoh politik dan agama, serta organisasi massa Islam untuk mengucilkan, pembubaran, dan ancaman pemusnahan, jika tidak membubarkan.

Sepuluh bentuk kekerasan yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah hampir memenuhi apa yang dalam hukum pidana internasional disebut sebagai kejahatan genosida. Rentang peristiwa kekerasan yang dialami Ahmadiyah tidak bisa dipandang sebagai semata intoleransi warga negara tapi sudah menuju pada genosida.

Jika merujuk pada indikator gejala-gejala intoleransi yang dikeluarkan oleh UNESCO, 10 tipologi peristwa di atas juga tinggal satu langkah lagi menuju penghancuran (genosida).[5] Berikut ini adalah matrik indikator yang menggambarkan skala dari intoleransi yang bersifat pasif hingga intoleransi aktif dan mewujud pada penghancuran.

Matrik 1:
Indikator Intoleransi

Indikator	**Penjelasan**	**Intoleransi yang dialami oleh JAI** [6]
bahasa	pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.	JAI berulang kali mengalami kekerasan verbal dalam berbagai bentuk dan kesempatan. Selain dilakukan oleh individu, kelompok, juga pejabat publik

5 *Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO. 1994, p. 16.)

6 Detail peristiwa intoleransi yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah, lihat berbagai Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, yang diterbitkan oleh berbagai institusi, termasuk SETARA Institute

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 165 11/1/2011 5:38:11 AM

Indikator	Penjelasan	Intoleransi yang dialami oleh JAI [6]
Stereotip	mendeskripsikan semua anggota kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama – biasanya negatif.	Prasangka subyektif terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi melalui penyesatan dan berbagai tuduhan lainnya. Dilakukan oleh individu, kelompok, dan pejabat publik
menyindir	menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.	Sindiran yang mengejek dan menghina berlangsung karena prasangka buruk subyektif. Dilakukan oleh individu, kelompok, dan pejabat publik secara terbuka
prasangka	penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotip daripada atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.	Perbedaan-perbedaan sebagian keyakinan Ahmadiyah menjadi instrumen generalisasi negatif.
pengkam-binghitaman	menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.	Setiap kekerasan yang menimpa JAI selalu ditujukan pada JAI yang terus menyebarkan keyakinan atau melanggar UU; atau reviktimisasi dalam berbagai peristiwa

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 166 11/1/2011 5:38:11 AM

Indikator	Penjelasan	Intoleransi yang dialami oleh JAI [6]
diskriminasi	pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.	JAI kehilangan hak-hak sipilnya hanya karena dianggap sesat. Di banyak tempat, bahkan mereka tidak diperbolehkan membuat kartu identitas yang memangkas seluruh akses pada hak-hak pelayanan publik lainnya.
pengasing-an	berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.	Gagasan pengasingan mulai muncul di NTB dimana Gubernur merencanakan memindahkan JAI ke dalam suatu pulau. Gagasan yang sama muncul dari Anggota DPR RI dari Komisi VIII HM Busyro (17/2/11)
pelecehan	perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.	Intimidasi yang merendahkan dialami oleh semua JAI hampir di semua tempat

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 167 11/1/2011 5:38:11 AM

Indikator	Penjelasan	Intoleransi yang dialami oleh JAI [6]
penajisan & penghapus-an	bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.	Penodaan terhadap simbol-simbol kesucian keyakinan dan prilaku keagamaan JAI terjadi dalam bentuk pengrusakan tempat ibadah
gertakan	penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.	Gertakan mewujud dalam bentuk desakan bertubi-tubi terhadap JAI agar membubarkan diri atau pindah keyakinan
pengusiran	pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk di mana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.	Di beberapa tempat terjadi pengusiran dan pemangkasan akses ekonomi (NTB); di dunia kerja (Garut).

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 168 11/1/2011 5:38:11 AM

Indikator	Penjelasan	Intoleransi yang dialami oleh JAI [6]
pengeluaran	penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.	Secara umum, ini belum terjadi. Karena dalam banyak kasus, sekalipun mereka memiliki akses terbatas, mereka masih mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan dalam kegiatan Pemilu mereka menjadi bagian yang dimobilisasi, meski tidak punya KTP (NTB). Namun demikian kemungkinan penyangkalan ini tetap terbuka
segregasi	pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk Apartheid).	Segregasi secara massal masih menjadi wacana. Namun gejala segregasi nyata dengan memberi tanda khusus pada rumah JAI di beberapa tempat.
represi	pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.	Represi publik dan negara mewujud pada desakan untuk menanggalkan agama dan/ atau pembatasan sebagaimana dalam SKB Ahmadiyah.

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 169 11/1/2011 5:38:11 AM

Indikator	Penjelasan	Intoleransi yang dialami oleh JAI [6]
penghan-curan	penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk **GENOSIDA**).	Secara kumulatif unsur penghancuran belum terjadi. Tetapi letupan kekerasan fisik dan pembunuhan telah terjadi.

Sementara kekerasan yang menimpa jemaat Kristiani umumnya masih terbatas pada pengrusakan tempat ibadah, pelarangan mendirikan rumah ibadah. Sekalipun kekerasan tersebut telah nyata, skala intoleransi dan kekerasan yang menimpa jemaat Kristiani tidak mengarah pada genosida, sebagaimana yang dialami jemaat Ahmadiyah.

Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan telah secara terus menerus merenggut hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi RI dan instrumen internasional HAM lainnya. Hak-hak yang paling sering dilanggar adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan; hak untuk bebas beribadah; hak untuk bebas dari diskriminasi; dan hak atas rasa aman. Dalam beberapa kasus, telah dilanggar juga hak atas diri (integritas personal); hak untuk hidup; dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Meski demikian, hak-hak yang dilanggar di atas telah juga menimbulkan pelanggaran hak lainnya seperti hak atas penghidupan yang layak; hak atas pendidikan; hak atas kesehatan; dll.

Mengapa Peristiwa Terjadi?

Berbagai organisasi masyarakat, pakar, dan bahkan pengakuan institusi kepolisian sendiri menunjukkan bahwa penyerangan jemaat Ahmadiyah Cikeusik (yang juga diikuti dengan kerusuhan Temanggang) mengandung sejumlah kejanggalan. Daftar

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 170 11/1/2011 5:38:11 AM

kejanggalan di lapangan dan dugaan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian[7] mengarahkan kesimpulan bahwa dua peristiwa itu *by design.* Namun demikian, dugaan *by design* ini tidak berarti bahwa organisasi-organisasi radikal pengusung aspirasi intoleran 'bebas' dari dugaan keterlibatan dalam dua peristiwa tersebut.

Pesan politik yang didesain dalam dua peristiwa itu, yang utama adalah **instabilitas keamanan.** Artinya negara tidak memiliki kuasa menciptakan stabilitas keamanan. Sedangkan isu sesatnya Ahmadiyah, penodaan agama,dll., selain hanya menjadi pemicu dan medium, juga menjadi agenda 'jihad' organisasi-organisasi radikal.[8]

Dari segi isu, dua peristiwa itu lebih terlihat sebagai **politik antikeberagaman** dengan sasaran kelompok-kelompok minoritas agama baik dalam Islam maupun di luarnya. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari fatwa MUI, Menteri Agama dan Bakorpakem yang diteruskan dalam bentuk aksi kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah.

Namun pengalaman sejarah politik di Indonesia, terlihat bahwa rentetan peristiwa kejahatan politik dan kekerasan berdasarkan agama atau etnis, sering menjadi tujuan antara tentang instabilitas politik. Letupan-letupan yang menggegerkan bisa menjadi satu kesatuan yang direncanakan untuk menciptakan instabilitas politik, dengan tujuan berikutnya adalah merebut kekuasaan politik, seperti pengalaman Mei 1998. Kini, isu agama bisa digunakan untuk tujuan yang sama. Gampang disulut, kelompoknya cair dan bisa digunakan.

Pada dasarnya tidak banyak pihak yang mampu mengorganisasikan dengan rapih suatu kekerasan atau penyerangan, kecuali tiga aparatur negara, yaitu TNI, Polri dan BIN. Mereka punya pengalaman dengan kerusuhan Malari (1974), kerusuhan Mei dan pembentukan Pam Swakarsa (1998), kejahatan kemanusiaan di Timor Timur (1999), dan pembunuhan berencana atas Munir (2004). Namun keterlibatan mereka sulit diselidiki

7 Kapolda Banten Tak Terima Laporan Intel, www.jpnn.com, 14 Februari 2011

8 Wawancara dan investigasi SETARA Institute, Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 171 11/1/2011 5:38:11 AM

kendati relasi-relasinya bisa diketahui secara samar-samar, karena skenario amuk massa atau pembantaian dan kerusuhan disusun di belakang layar.

Mereka menguasai beberapa simpul massa yang mampu melakukan mobilisasi puluhan atau bahkan ratusan orang. Dengan penguasaan simpul-simpul massa ini maka jumlah orang yang berpartisipasi dalam kelompok-kelompok amuk massa dan kerusuhan dapat diangkut dengan menggunakan truk atau bus untuk menuju lokasi. Mereka ditempatkan beberapa kelompok dalam suatu titik yang telah ditentukan sebelum aksi amuk dan kerusuhan berlangsung. Sebagian mereka diberi tanda untuk dikenali sebagai sesama kawan –untuk membedakan mereka dengan kelompok sasaran korban–dalam aksi-aksi amuk massa atau kerusuhan.

Dengan suatu komando, provokasi dan teriakan yel-yel yang lantang, massa pun digerakkan untuk melakukan aksi-aksi sesuai skenario. Mereka berbagi tugas pada aksi pengrusakan, pembakaran, perburuan atau pengejaran orang, penganiayaan, bahkan pembantaian.

SETARA Institute mengidentifikasi **tiga hipotesis** yang dapat menjelaskan dugaan desain peristiwa Cikeusik dan Temanggung yang diduga melibatkan berbagai aktor dan untuk tujuan politik yang berbeda-beda.

1. *Recovery* 'Jihadis' di Jalur Aman

Peristiwa penyerangan Cikeusik dan kerusuhan Temanggung diduga kuat telah menjadi medium bagi *rocovery* kaum Jihadis (Jamaah Islamiyah-JI) di jalur aman. Jalur aman yang dimaksud adalah radikalisasi massa tidak di tengah konflik. Sebagaimana diketahui, kaum Jihadis selalu memanfaatkan arena konflik untuk melakukan kaderisasi dan *recovery* gerakan terorisme. Di Poso, Ambon, dan di tengah konflik lainnya, kaum jihadis mampu melakukan kaderisasi secara cepat untuk me*recovery* gerakannya, bahkan di Sulawesi Tengah mereka bisa membentuk empat *wakalah*. Tanpa ada konflik, sulit bagi kaum Jihadis memperoleh

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 172 11/1/2011 5:38:11 AM

kader-kader baru militan. Kristenisasi, penodaan agama, termasuk Ahmadiyah adalah isu-isu yang dipungut oleh kaum Jihadis untuk melakukan kaderisasi, sejak 2002.[9]

Sebagaimana diketahui, untuk menjadi kaum jihadis setidaknya dibutuhkan dua tahap: menjadi radikal terlebih dahulu, baru kemudian menjadi Jihadis. Kelompok-kelompok radikal dengan sendirinya menjadi kelompok yang paling dekat untuk berhijrah dari jalan radikal menjadi Jihadis.

Investigasi SETARA Institute menegaskan bahwa pimpinan organisasi-organisasi radikal berada di lokasi kejadian di dua tempat tersebut. Kyai Ujang diduga kuat merupakan tokoh lapangan yang mengendalikan peristiwa Cikeusik. Sebagaimana diketahui bahwa Ujang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian. Sedangkan tokoh di balik Temanggung yang menghubungkan peristiwa ini dengan organisasi Islam tertentu diduga adalah Said Sungkar (Dewan Syuro FPI Pekalongan). Pada peristiwa berlangsung, Said Sungkar berada di lokasi. Sekalipun diakuinya hanya untuk tujuan berjualan obat herbal, keberadaannya di Pengadilan Negeri Temanggung sulit diterima akal sehat kalau hanya untuk tujuan berjualan.[10]

Baik Ujang maupun Said Sungkar, keduanya adalah pimpinan Front Pembela Islam di daerahnya masing-masing. Ujang sebelumnya merupakan anggota laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) pimpinan Ja'far Umar Tholib. Ujang juga berperan menghimpun eks anggota laskar Aswaja bergabung dalam Laskar Pembela Islam (LPI), organisasi sayap bentukan FPI. Sedangkan Said Sungkar selain menjadi pentolan FPI Pekalongan, ia juga memiliki kedekatan khusus dengan jaringan Jemaah Islamiyah. Dalam beberapa BAP terdakwa terorisme, Said Sungkar selalu disebut sebagai salah satu orang yang memfasilitasi berbagai kebutuhan aktor-aktor terorisme (khususnya Dumatin dan Noordin M Top), tapi Sungkar tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas perannya dalam beberapa aksi terorisme, kecuali dkenakan wajib

9 Wawancara SETARA Institute, Februari 2011

10 Wawancara Said Sungkar, Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 173 11/1/2011 5:38:11 AM

lapor. Pada tahun 1999 Said Sungkar juga diduga menjadi pihak yang memfasilitasi pengadaan senjata untuk aksi-aksi terorisme.[11]

Dalam konteks penyerangan Cikeusik dan Temanggung, kaum Jihadis hanya menggunakan FPI sebagai 'kondom' bagi gerakannya.[12] JI merupakan organisasi jaringan yang selalu membutuhkan organ permukaan sebagai sarana radikalisasi dan menyebar agitasi, sebagaimana Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang menjadi organisasi cover permukaan dari kelompok jihadis. Lalu siapa yang menghubungkan FPI dengan kaum jihadis? Secara idiologi, FPI (termasuk ormas-ormasi Islam lainnya) dan kaum jihadis memiliki perbedaan pendekatan, tapi dari segi gagasan mereka memiliki kesamaan: anti kristenisasi, anti ahmadiyah, penegakan syariat Islam, dan beberapa diantaranya mencita-citakan *daulah islamiyah* dan *khilafah islamiyah*. Dalam riset SETARA Institue, organisasi radikal secara kelembagaan tidak memiliki hubungan langsung dengan kaum jihadis, tapi secara ideologi dan relasi personal beberapa di antaranya memiliki kedekatan.[13]

Jamaah Islamiyah, sekalipun dianggap sudah tercerai berai, tapi sebagai organisasi jaringan JI tidak pernah mati. Selain selalu membutuhkan sarana artikulasi di permukaan, juga dibagi dalam dua kategori: JI agitasi, yang melakukan agitasi secara terbuka dan JI tempur, yang melakukan aksi-aksi terorisme dan bersenjata. Sejak 2002, disadari atau tidak, JI agitasi telah merasuk ke tubuh FPI melalui JI Jakarta Raya yang dikendalikan oleh Wahyu Ramadhan alias Uci, aktor yang berencana meledakkan Depo Pertamina Plumpang Maret 2010. Wahyu sebelumnya pernah terlibat dalam insiden penyerangan terhadap Markas Brigadir Mobil di Loki, Maluku dan perlawanan dengan Markas Besar Polri pada 22 Januari 2007 di Poso, Sulawesi Utara.[14] Selain FPI, JI agitasi juga merasuk ke tubuh Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang berpusat di Cianjur.

---

11 Wawancara mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Februari 2011

12 Wawancara mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Februari 2011

13 Lihat Lihat Laporan Radikalisme Agama di Jawa Barat dan Jabodetabek: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan, SETARA Institute, 2010.

14 Wawancara mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 174 11/1/2011 5:38:11 AM

Penggunaan FPI sebagai medium artikulasi kaum jihadis di permukaan, selain memiliki kedekatan ideologis meski berbeda pendekatan, juga sebabkan oleh longgarnya keanggotaan FPI. Longgarnya keanggotaan FPI menjadikan mudahnya FPI digunakan sebagai medium untuk berbagai kepentingan. Cara yang sama pernah terjadi di tahun 1998. Tidak lama setelah FPI berdiri, meletus Peristiwa Ketapang, Jakarta, 22 November 1998. Sekitar 200 anggota FPI bentrok dengan ratusan preman. Bentrokan bernuansa suku, agama, ras, antargolongan ini berbuntut kepada pembakaran rumah warga, rumah ibadah dan menewaskan sejumlah orang. Padahal memberantas preman bukan menjadi agenda FPI.

Dugaan keterlibatan aktor-aktor dari jaringan di luar wilayah Temanggung sempat disinyalir oleh Kapolri Timur Pradopo saat mengomentari peristiwa Temanggung dan pernyataan Boy Rafli Amar Kabag Penerangan Umum Mabes Polri:

Inilah awal dari pemeriksaan lebih lanjut dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Jateng (Jawa Tengah) beserta jajarannya, "tutur Timur setelah menghadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Kantor Wapres kemarin. Mantan Kapolda Metro Jaya itu belum mau menyebutkan dari mana penggerak dan pelaku kerusuhan berasal. Namun, Timur **memastikan**[15] mereka masih berasal dari Propinsi Jateng. Berdasarkan keterangan Gubernur Jateng Bibit Waluyo (8/2), pelaku kerusuhan datang dari wilayah Pekalongan, Kendal, dan Solo. "Artinya masih dalam kawasan Jateng kalau dikaitkan dengan geografis Temanggung, tidak dalam satu kabupaten, " kata Timur.[16]

Mantan anggota Desus 88 itu menjelaskan, dugaan otak pengerahan massa masih tertuju pada dua organisasi massa (ormas). "Kita masih mendalaminya, belum bisa menyebut nama dua ormas tersebut," imbuh Boy. Dia berharap, setelah diperiksa secara intensif, M bisa membongkar otak-otak di balik kerusuhan Temanggung yang berasal dari dua ormas tersebut. Saat ini, M yang

15 Cetak tebal dari SETARA Institite

16 Koran Sindo, 9 Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 175 11/1/2011 5:38:11 AM

berasal dari luar Temanggung itu menjelaskan, rekan-rekannya yang ikut aksi kerusuhan itu berasal dari Pekalongan, Kendal, Solo, dan Boyolali.[17]

Kendal, Solo, dan Boyolali merupakan wilayah basis operasi kaum jihadis. Dari Solo, Amir Jamaah Anshoru Tauhid, Abu Bakar Ba'syir berasal. Namun demikian, kinerja Polri hingga laporan ini disusun justru hanya menetapkan tersangka yang berasal dari Temanggung. Bahkan Syihabudin yang diduga sebagai aktor utama justru dari Wonoboyo Temanggung. Selain pemimpin pesantren, Syihabudin juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). Sampai saat ini, pernyataan Timur Pradopo dan Boy Rafli Amar belum dianulir, yang artinya menjadi pekerjaan lanjutan yang harus ditindaklanjuti.

"Awalnya wilayah-wilayah itu mau langsung "didensuskan", tapi berdasarkan berbagai pertimbangan, sementara dilokalisir dulu."[18]

Dalam peristiwa Cikeusik dan Temanggung, selain jaringan JI yang berupaya memanfaatkan radikalisme organisasi Islam untuk *recovery* kaum jihadis, terdapat juga aktor-aktor lain yang bermain, yang memiliki kepentingan sama yaitu menciptakan instabilitas politik untuk berbagai kepentingan. Sebagaimana diketahui, kaum Jihadis tidak pernah memilih "*partner* koalisi" dalam berbagai usahanya sejauh memiliki pesan yang sama. Selain kelompok jihadis, diduga sejumlah purnawirawan jenderal juga diduga turut serta mendesain dan atau/ membantu penyerangan Cikeusik dan rusuh Temanggung.[19]

"M" diduga adalah tokoh sentral dalam dua peristiwa ini yang menghubungkan dengan mantan petinggi militer. Selain memegang kendali operasional FPI, "M" adalah penghubung antara FPI dengan para purnawirawan jenderal, termasuk dalam hal dukungan pendanaan.[20]

---

17 Sumatera Ekspres, 11 Februari 2011, http://sumeks.co.id

18 Wawancara SETARA Institute, Februari 2011

19 Wawancara mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Februari 2011

20 Selain diduga berasal dari para purnawirawan jenderal, dukungan dana

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 176 11/1/2011 5:38:11 AM

Dalam menjalankan operasinya, masing-masing kelompok mengusung kepentingan berbeda-beda, meski tujuan permukaannya sama: instabilitas keamananan dan politik. Kelompok jihadis misalnya berkepentingan dengan upayanya untuk mencari medium kaderisasi bagi *recovery* gerakan terornya melalui organisasi radikal semacam FPI dan sejenisnya. Kelompok jihadis juga menggunakan aksi-aksi kelompok radikal untuk menekan proses persidangan Abu Bakar Ba'syir. Sementara para purnawirawan jenderal berkepentingan dengan instabilitas politik dan pelemahan terus menerus pemerintahan SBY. Demikian juga "TS" berkepentingan untuk kembali ke gelanggang politik. Untuk mencapai tujuan itu, instabilitas keamanan dan politik adalah sasaran antara.[21]

Sedangkan bagi FPI dan organisasi Islam radikal lainnya, selain dalam rangka menjalankan keyakinan jihad melawan Ahmadiyah, kristeni-sasi, aliran sesat, dll., juga dalam rangka memupuk dukungan pendanaan dari berbagai para simpatisan dan donaturnya.[22] Dalam desain yang diperoleh SETARA Institute, masing-masing kelompok kepentingan tidak bekerja secara terpisah, dan mungkin tidak saling mengetahui. Namun demikian, kerjasama antara mereka secara terbuka juga sangat mungkin terjadi. Secara prinsip kelompok-kelompok kepentingan ini berbeda pandangan tapi memiliki agenda jangka pendek yang sama, yaitu melemahkan pemerintahan SBY.

Dalam kasus Temanggung, sangat mungkin bahwa kelompok-kelompok radikal yang tergabung dalam berbagai organisasi Islam tidak menyadari proses "penunggangan" oleh kelompok-kelompok di luar kelompoknya. Meski diakui bahwa mereka juga pengusung aspirasi intoleran, tapi Buku Putih yang dikeluarkan oleh Forum Umat

juga diduga berasal dari "TS" yang disalurkan melalui "HAB" melalui "RS". Sebelum peristiwa Cikeusik dan Temanggung mereka kerap berkumpul di Lt. 19 salah satu apartemen di kawasan elit Jakarta. (Investigasi SETARA Institute, Februari 2011)

21 Wawancara mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Februari 2011

22 Dalam istilah narasumber SETARA Institute, mereka harus terus menerus menyetor laporan kinerja pada penyedia dana. Sementara bagi aktor lainnya, selain untuk memupuk dukungan dana juga sebagai alat untuk menunjukkan hegemoni dan mempertahankan otoritas dan kekuasaan di wilayah-wilayah tertentu

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 177 11/1/2011 5:38:12 AM

Islam Bersatu (FUIB) Temanggung menggambarkan keterkejutan mereka atas peristiwa Temanggung. Karena proses infiltrasi dan penunggangan tidak dilakukan secara institusional tapi secara personal. FUIB sendiri dimotori oleh organisasi-organisasi yang selama ini secara nyata mengusung aspirasi intoleran. Beberapa aktivis DDII, sebuah organisasi kumpulan ideolog radikalisme di Indonesia, juga ada dibalik FUIB Temanggung.

Membaca peta bagaimana kaum Jihadis dan sejumlah purnawirawan berperan dalam dua aksi ini, maka tidak cukup penindakan hukum hanya sebatas aktor lapangan. Pengusutan beberapa nama yang diduga menjadi aktor intelektual atau yang paling bertanggung jawab mutlak dilanjutkan. Berbagai kejanggalan yang ditangkap di lapangan termasuk bagaimana aktor-aktor lapangan memprovokasi massa menjadi sangat jelas, bahwa desain di balik dua peristiwa ini melibatkan aktor profesional.

2. Lemahnya Otoritas BIN

Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana intelijen negara bekerja mendeteksi desain penyerangan Ahmadiyah dan rusuh Temanggung sehingga bisa dicegah? Institusi kepolisian mengakui dalam berbagai kesempatan telah mengetahui rencana penyerangan massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang. Pengakuan ini ditandai dengan adanya 'penjemputan' Suparman dari rumahnya ke Polres Pandeglang. Sementara di Tamanggung, polisi juga semestinya telah memonitor potensi rusuh ini karena pada sidang kasus penodaan agama sebelumnya juga terjadi amuk massa di ruang pengadilan.

"Kami sedang diminta mencari tahu orang-orang Pekalongan yang sehari sebelum peristiwa rusuh Temanggung menggelar rapat di Temanggung"[23]

Dua kejanggalan di atas sesungguhnya menggambarkan bahwa dua peristiwa ini sudah diketahui sebelumnya. Tapi mengapa intelijen tidak bekerja cepat berkoordinasi dan mencegah

23 Investigasi dan wawancara SETARA Institute Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 178 11/1/2011 5:38:12 AM

peristiwa ini agar tidak terjadi. Bahkan justru tampak janggal, ketika pasca rusuh Temanggung intelijen dari Jakarta justru baru turun ke lapangan.

Hipotesis yang bisa dikemukakan di sini adalah bahwa intelijen tidak bekerja optimal dalam mendeteksi atau menindaklanjuti hasil deteksi dininya sehingga langkah antisipatif bisa dilakukan. Mengenai lemahnya intelijen dalam mendeteksi dua peristiwa ini dilontarkan juga oleh Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Thamrin Amal Tomagola (Sosiolog UI), juga AC Manullang (Pengamat Intelijen).

Anas Urbaningrum tidak mempercayai kasus kekerasan yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung terjadi spontan. Ia menilai peristiwa itu ada yang menggerakkan atau merencanakan kekerasan.

"Sangat mungkin ada yang mendorong menggerakkan kekerasan," ujar Anas di Jakarta.

Menurutnya intelijen negara harus bekerja menyimpulkan peristiwa ini karena kejadian ini beruntun, dan sebelumnya juga pernah ada peristiwa lainnya. "Saya termasuk yang tidak percaya kalau peristiwa itu spontan," ujarnya.[24]

Sementara Thamrin Amal Tomagola mengatakan curiga rangkaian konflik bernuansa agama yang belakangan ini mencuat merupakan produk rekayasa intelijen. Pergerakan intelijen ini muncul sebagai serangan balik terhadap dinamika politik di level elit yang cenderung menyudutkan pemerintahan SBY.

"Saya curiga ini manipulasi intelijen yang sedang mengobok-obok keadaan sekarang ini. Memang pada dasarnya kayu dan jerami keringnya (potensi konflik, Pen.) sudah ada, lalu ini dimanipulasi operasi intelijen," kata Tamrin dalam diskusi Akar Konflik Horizontal di Indonesia di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (17/2). ...

Menurut Tamrin, model penyerangan yang terjadi terhadap

24 Anas Tak Percaya Kekerasan Cikeusik Spontan, Vivanews.com, 12 Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 179 11/1/2011 5:38:12 AM

jamaah Ahmadiyah di Ciekusik dan pembakaran sejumlah gereja di Temanggung, sangat terorganisasi. "Ada yang pakai pita, lalu serangan datang bergelombang dengan sangat terorganisasi, hanya militer yang bisa berfikir begitu," ungkap Tamrin.

Menurut dia, kedua peristiwa itu sangat mengingatkan pada konflik Ambon. "Seolah ini kelompok ekstrim. Padahal, ada operasi intelijen yang mengadu domba," tegasnya. ...[25]

Sementara pengamat Intelijen AC Manulang mengatakan[26]:

"Saya dapat informasi, arsitek atau provokatornya dari Jakarta," ungkapnya kepada **okezone**, Jumat (11/2/2011).

Informasi di atas, imbuh dia, seolah menjadi penguat dugaannya atas siapa aktor di balik kericuhan di Pandeglang dan Temanggung beberapa waktu lalu. Pasalnya dia sedari awal sudah curiga karena dua peristiwa tersebut berlangsung cukup rapih.

"Itu ditunggangi intelijen. Kalau ada tanda-tanda tak tersentuh, maka itu operasi intelijen. Masa polisi tak tahu akan terjadi sesuatu kejadian yang begitu besar. Ingat ada yang namanya kontra intelijen," terangnya.

"Tak mungkin intelijen tuli, buta, atau jutek. Kalau sudah begitu maka intelijen bubar. Kalau intelijen bubar maka negara terancam. Ancaman-ancaman ini untuk membubarkan negara."

Memang sulit menangkap indikasi lemahnya intelijen baik di BIN, kepolisian, maupun di dalam Densus 88. Yang bisa dipastikan adalah dengan menerapkan logika terbalik, yakni bahwa seharusnya jika intelijen bekerja dengan baik, maka peristiwa-peristiwa yang mengundang instabilitias politik dan keamanan dapat dicegah sedini mungkin. Sebaliknya, jika peristiwa itu dengan mudah meledak dan bahkan menunjukkan keganjilan, maka kemungkinan yang terjadi adalah dua hal: *pertama,* intelijen memang tidak bekerja dengan baik; dan *kedua,* intelijen turut serta menjadi bagian dari peristiwa

25 Sangat Beraroma Operasi Intelijen, SBY Diminta Klarifikasi Kisruh Cikeusik dan Temanggung, www.jpnn.com, 18 Februari 2011

26 Arsitek Cikeusik & Temanggung dari Jakarta, http://.news.okezone.com, 11 Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 180 11/1/2011 5:38:12 AM

itu. Meskipun demikian, bisa saja intelijen bekerja bukan atas nama institusi tapi personal.[27]

Berbeda dengan pandangan Thamrin Amal Tomagola di atas, SETARA Institute melihat kemungkinan yang pertama jauh lebih kuat dibandingkan dengan kemungkinan yang kedua. Sebagaimana diketahui, respons keras Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap penyerangan di Cikeusik dan aksi kerusuhan di Temanggung dipastikan mengacu pada informasi intelijen dan presiden ingin menunjukkan dan menyampaikan pesan publik bahwa desain insiden tersebut tidak datang dari pemerintah yang berkuasa. Karena sangat merugi kalau hanya untuk menutup aksi kampanye kebohongan publik yang dilakukan oleh para tokoh agama, intelijen menggunakan cara-cara ini.

Pertanyaan lanjutannya mengapa intelijen tidak bekerja. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak Presiden SBY menunjuk Sutanto, sebagai Kepala BIN dinamika di tubuh BIN mengalami ketegangan. Secara institusional aparatur BIN memang tunduk pada perintah Kepala BIN tapi secara personal sebagaimana dalam tradisi intelijen, seorang agen intelijen dapat bekerja untuk orang lain bahkan bukan untuk kepentingan negara. Sementara pengaruh dua mantan pimpinan BIN sebelumnya masih sangat kuat.

"BIN kita lemah, tidak banyak tahu. Ketegangan antara para loyalis dua pimpinan BIN sebelumnya sangat nampak dan itu berdampak pada kinerja intelijen secara kelembagaan".

"Dalam sebuah peristiwa kelompok agen BIN bisa berbeda sikap berdasarkan preferensi masing-masing. Dalam kasus penyerangan di salah satu lokasi ketegangan terkait rumah ibadah misalnya, terdapat dua faksi BIN yang turun ke lapangan. Satu menghendaki bentrok dan satu lagi justru mencegah agar tidak terjadi bentrok. Akhirnya penusukan terjadi."[28]

Namun demikian, karena wilayah-wilayah terjadinya penyerangan dan kerusuhan adalah "wilayah Densus 88",

27 Wawancara mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Februari 2011

28 Wawancara SETARA Institute, Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 181 11/1/2011 5:38:12 AM

"sebenarnya Densus 88 (BNPT) mengetahui akan terjadinya peristiwa ini, namun sengaja dibiarkan untuk tujuan menangkap pelaku-pelaku terorisme yang sedang dibidik yang lebih besar."[29] Pola membiarkan sebuah peristiwa untuk menangkap aktor utama memang menjadi salah satu strategi gerakan pemberantasan terorisme yang saat ini berada di bawah kendali BNPT.

"Karena wilayah dan aktor-aktor JI juga menunggangi peristiwa ini, maka sebenarnya dua peristiwa tersebut masuk dalam radar Densus 88".[30] Jika merujuk pada pendapat-pendapat di atas, kuat diduga bahwa tiga otoritas di tubuh BIN saat ini sedang mengalami ketegangan. Implikasinya sangat serius, di mana kinerja intelijen jadi melemah. Sementara Densus 88, selain kemungkinan tidak berkoordinasi juga memiliki cara kerja tersendiri dalam menangani aksi-aksi terorisme. Jika benar Densus 88 mengetahui dua peristiwa ini, alasan pembenar yang bisa dikemukakan mengapa Densus 88 tidak bertindak adalah karena kerusuhan, penyerangan, sebagaimana terjadi pada dua peristiwa ini di permukaan bukanlah domain kerja Densus 88.

3. Membiarkan untuk Mendulang Anggaran Kepolisian

Hipotesis ketiga muncul dari pertanyaan mengapa polisi membiarkan peristiwa tersebut terjadi? Untuk tujuan apa? Jika hipotesis pertama dan kedua benar, maka wajar aparat kepolisian (organik)[31] tidak bisa mencegah terjadinya aksi massa. Di sinilah muncul pelanggaran HAM karena pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian. Merujuk pada Protap Kapolri No. 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki, dalam dua peristiwa tersebut prosedur tetap ini nyaris tidak dijalankan. Di Cikeusik misalnya, upaya polisi sangat nampak tiada guna untuk mencegah aksi massa. Selain

29 Wawancara SETARA Institute, Februari 2011

30 Wawancara SETARA Institute, Februari 2011

31 Kerja Polisi organik dengan Densus 88 memiliki komando yang berbeda. Densus 88 tidak tunduk pada polisi organik di masing-masing Polda atau Polres. Sangat mungkin terjadi tindakan Densus 88 tidak diketahui oleh polisi organik di wilayah. Lihat kasus rangkaian penanganan terorisme di Sumatera Utara, 2010

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 182 11/1/2011 5:38:12 AM

jumlah yang terbatas, anggota kepolisian pun tidak dibekali dengan perlengkapan pengamanan diri dan/ atau senjata yang memadai. Sementara dalam rusuh Temanggung, anggota Polri bahkan membiarkan penggulingan mobil polisi yang hanya dilakukan oleh 20 orang; sedangkan polisi yang berjarak 20 meter dan berjumlah lebih dari 100 orang tidak mengambil tindakan.[32] Keganjilan lain juga sangat tampak di depan gereja yang dibakar. Sebelum dibakar gereja dijaga oleh Polisi dan TNI tapi mengapa pula pencegahan tidak bisa dilakukan.

Sejumlah keganjilan baik di Cikeusik Pandeglang dan Temanggung menjadi indikasi kuat bahwa aparat kepolisian membiarkan terjadinya penyerangan dan kerusuhan. Mendulang anggaran institusi kepolisian di tengah kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan yang semakin terancam diduga kuat menjadi medium bagi kepolisian untuk memikat perhatian internasional dan para politisi Senayan mengucurkan anggaran bagi Polri. Demikian juga operasi pemberantasan terorisme yang sejak akhir tahun 2010 berpindah ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diduga menjadi salah satu penyebab keterbatasan anggaran kepolisian. Dukungan dana bagi pemberantasan terorisme kini dikelola langsung oleh BNPT bukan oleh kepolisian. Pembiaran dua peristiwa di atas juga diduga sebagai pembenar implementasi Protap No.1/2010 yang di dalamnya memungkinkan aparat kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat.

Tahun 2011 institusi Polri memiliki anggaran Rp. 29,781 triliun, naik 9,5% dari anggaran tahun 2010 sebesar 27,580 triliun. Persetujuan DPR RI sedikit tidak sesuai dengan harapan Polri yang meminta kenaikan 30,670 triliun. Sekalipun keinginannya untuk menaikkan anggaran dipenuhi oleh DPR RI meski tidak sepenuhnya, Polri masih merasa kurang dengan anggaran tersebut.[33] Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Timur Pradopo, bahwa alokasi Pagu APBN Polri tahun anggaran 2011 sebesar Rp

32 Investigasi SETARA Institute, Februari 2011

33 DPR Ancam Batalkan Kenaikan Anggaran Polri, www.tempointeraktif.com, 01 Oktober 2010; Lihat juga Anggaran Polri Naik Tapi Kurang, Kapolri Curhat ke DPR, www.detiknews.com, 24/01/2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 183 11/1/2011 5:38:12 AM

29,781 triliun digunakan untuk kerja di lingkungan Polri.

Namun demikian, kata Timur, pelaksanaannya diperkirakan menemui kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, pertama kekurangan anggaran pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas sebesar Rp 277,590 miliar dari kebutuhan minimal sebesar Rp 1,2 triliun.

Kendala kedua, untuk memenuhi kebutuhan pembayaran listrik, telepon air dan gas atau LPJA sebesar Rp 413,585 miliar.

"Akibat penambahan peralatan IT dan fasilitas gedung kantor dan akan terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp 181,651 miliar.

Selanjutnya kendala ketiga, kekurangan alokasi anggaran perlengkapan perorangan atau kapor Polri sebesar Rp 79 miliar hanya dapat memenuhi 21 persen dari kebutuhan minimal kapor sebesar Rp 379,324 miliar atau mengalami kekurangan sebesar Rp 300,324 miliar.

Keempat pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dialokasikan anggaran sebesar Rp 634,723 miliar.

"Di dalamnya terdapat alokasi anggaran operasional penyidikan sebesar Rp 367,453 miliar hanya dapat membiayai 87.029 perkara sehingga di tiap Polres dianggarkan untuk menangani 118 perkara per tahun dan di Polsek sebanyak 6 perkara per tahun," papar Timur.

Kelima, untuk memberikan pelayanan Kamtibmas perlu diwujudkan dengan penyediaan fasilitas gedung kantor yang memadai. Namun, pada tahun 2011 masih banyak ditemukan kantor polres dan polsek serta polsubsektor yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar pelayanan, masih mengontrak, pinjam pakai termasuk kurangnya peralatan operasional Kepolisian.[34]

Pasca peristiwa Cikeusik dan Temanggung wacana keterbatasan anggaran juga mengemuka dan menjadi wacana publik, bahkan DPR RI kemudian memberikan perhatian khusus

34 Anggaran Polri Naik Tapi Kurang, Kapolri Curhat ke DPR, www.detiknews.com, 24/01/2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 184 11/1/2011 5:38:12 AM

pada soal anggaran ini. Adalah Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy yang mengatakan bahwa kerusuhan di sejumlah daerah menandakan lemahnya intelijen kepolisian dalam menangani massa. "Polisi lemah di bidang intelijen sehingga tak bisa mengontrol massa".

".... ia menilai faktor anggaran yang minim yang membuat lemahnya intelijen Kepolisian. Karena, untuk melakukan kerja-kerja intel, sepertimenyamardan membaur dengan masyarakat membutuh-kan biaya yang tak sedikit."

"Satu Polres itu anggarannya sekitar Rp 45 juta setahun. Ya, mau dapat apa. Akibatnya, polisi terlambat terus," ujarnya. Kede-pan, ia berharap anggaran Kepolisian bisa ditingkatkan sehingga mereka memiliki alat-alat yang canggih untuk menghalau massa yang sedang rusuh."[35]

Kampaye keterbatasan anggaran telah dimulai oleh Wakapolres Temanggung sebagaimana kutipan berikut ini:

Pecahnya kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, mendorong kepolisian meminta anggaran pengamanan pada pemerintah kabupaten setempat. Soalnya, polisi merasa pengamanan kurang maksimal, sehingga pecah kerusuhan karena kurangnya anggaran untuk pengamanan.

"Masalah yang saya cermati, otonomi daerah saat ini lebih fokus pada bagaimana mengambil PAD sebanyak-banyaknya untuk keperluan daerah tanpa dianggarkan untuk yang lain seperti keamanan. Begitu meletup kerusuhan baru tersadar kalau tidak aman," cetus Wakapolres Temanggung Komisaris Roy Ardhia Candra saat rapat dengan Muspida Temanggung dan Direktur Kewaspadaan Nasional Kesbangpolinmas Kementerian Dalam Negeri Widiyanto di Ruang Gajah Sekda Temanggung, Kamis (10/2).

"Padahal saat dua kali sidang sebelumnya sudah muncul kata-kata yang mengisyaratkan akan ada pembakaran. Jika ada anggaran

35 Temanggung Rusuh Karena Anggaran Polri Minim, www.hukumonline.com, 09 Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 185 11/1/2011 5:38:12 AM

yang cukup, setidaknya ini sudah bisa diantisipasi," ujarnya.[36]

Gagasan membentuk satuan khusus atau deks khusus untuk penanganan konfilk dan kekerasan atas nama agama tampaknya akan menjadi pilihan Polri atau bisa jadi diintegrasikan ke dalam BNPT (Polri akhirnya membentuk Desk Anti Anarki. red.). Sebagaimana diketahui, sama seperti isu terorisme, bahwa isu kebebasan beragama/ berkeyakinan mendapat perhatian dunia internasional yang cukup luas. Selain memupuk dukungan penambahan anggaran dari DPR RI, isu ini juga sangat menarik bagi dunia internasional untuk mengucurkan bantuan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas aparat kepolisian.

Mendahului terwujudnya gagasan ini, dalam waktu dekat, Polri juga akan menggelar pelatihan khusus untuk intelijen kepolisian.

"Intelijen Polri akan melakukan pembenahan terhadap personil Intel Polri di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat Baintelkam Polri akan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan intelijen.

Sebuah sumber di Mabes Polri mengatakan, pihaknya sudah meminta data-data anggota intel yang akan menjalani pelatihan dan pendidikan dari seluruh Polda dan Polres di Indonesia. "Ya kita akan memberikan pelatihan dan pendidikan, untuk lebih meningkatkan kualitas intelijen Polri," kata sumber itu. Namun, dia tidak bersedia memberikan penjelasan, terkait tudingan peristiwa Temanggung dan Pendeglang dan sejumlah kerusuhan lainnya terjadi disebabkan lemahnya intelijen Polri." Kalau soal itu, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskannnya. Tapi saya rasa perlu dilakukan peningkatan kualitas intelijen Polri," ujar sumber tadi."[37]

KESIMPULAN

1. Peristiwa Cikeusik dan Temanggung diduga kuat merupakan desain kelompok-kelompok yang berkolaborasi dan memiliki

36 Pascakerusuhan, Polres Temanggung Minta Tambah Anggaran, www.mediaindonesia.com, 10 Februari 2011

37 Intelijen Polri Akan Dididik & Dilatih Lagi, www.batavia.com, 15 Februari 2011

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 186 11/1/2011 5:38:12 AM

tujuan berbeda-beda antara individu anggota FPI, Jamaah Islamiyah (JI), jenderal-jenderal purnawirawan, dan individu pemasok dana. Tujuan pertama desain kerusuhan ini adalah menciptakan instabilitas keamanan dan politik.

2. Pembiaran organisasi-organisasi radikal yang terus memupuk kebencian, mengkampenyekan intoleransi telah menjadi medan dan medium bagi *recovery* kaum jihadis untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Jalan aman ini merupakan sarana kaderisasi dan transformasi kader-kader organisasi radikal menjadi jihadis. SETARA Institute meyakini bahwa intoleransi adalah titik mula dari terorisme; dan terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu membiarkan organisasi radikal terus tumbuh dan berkembang sama bahayanya dengan menyimpan potensi kader-kader jihadis baru di masa yang akan datang.
3. Badan Intelijen Negara (BIN) diduga kuat kurang menjalankan fungsi deteksi dininya untuk mencegah aksi-aksi kekerasan dan kerusuhan; muncul dugaan bahwa individu-individu intelijen turut serta mendesain peristiwa-peristiwa ini.
4. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian diduga kuat bukan semata-mata keterbatasan personel tapi juga medium bagi kampanye mendulang dukungan pendanaan pada institusi Polri.

Jika situasi ini dibiarkan maka diduga kuat potensi-potensi kekerasan serupa akan terjadi. Desain mewujudkan instabilitas keamanaan dan politik akan terus terjadi sepanjang Abu Bakar Ba'syir mendekam di sel tahanan; akan terus terjadi jika tidak ada peningkatan kinerja intelijen; akan terus terjadi jika pembiaran organisasi radikal menjadi pilihan politik SBY.

Politik instabilitas yang dilancarkan dalam desain ini akan menunggangi isu-isu kontroversial dan mendapat dukungan publik seperti anti Ahmadiyah, anti kristenisasi, penodaan agama, dan perbedaan-perbedaan pandangan keagamaan, sehingga di aras permukaan menjadi semakin kabur, siapa aktor-aktor yang terlibat. []

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 187 11/1/2011 5:38:12 AM

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 188 11/1/2011 5:38:12 AM

Indeks

A

Abdurahman Wahid 19, 71
Absolutisme 90
Abu Bakar Ayyub 16
Abu Bakar Ba'asyir 5
Ahmadiyah iii, iv, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144

Ahmadiyah, JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) iii, iv, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 150

Ahmadiyah, Jemaat iii, iv, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 189 11/1/2011 5:38:12 AM

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 150

Ahmadiyah, Lahore iii, iv, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144

Ahmadiyah, Qodian iii, iv, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 150

Ahmad Nuruddin 16, 17
aksi kekerasan 6, 7, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 51, 52, 55, 57, 60, 62, 95, 108, 111, 113, 131, 138, 141
AKUR 43
Ali bin Abi Thalib 21
ALJABAR (Aliansi Masyarakat Jawa Barat 43
Al-Quran 3, 13
Amir Timur 14
Ancaman 32, 41, 48, 63, 78, 79, 85, 97, 99, 100, 134, 138
Anjuman Isyaati Islam 16
API (Aliansi Pergerakan Islam) 44
Arab Saudi 23, 24
Arif Rahman Hakim 18
As'at Malik 39

B

Bakorpakem 2, 3, 5, 45, 50, 54

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 190 11/1/2011 5:38:12 AM

Banten iii, 6, 9, 28, 40, 108, 109, 110, 111, 112, 138
Barack Obama 30
Barlas 14
Bhinneka Tunggal Ika 9, 30, 63, 75, 132
B.J. Habibie 70
Brunei Darussalam 24
Buya Hamka 24, 25, 56

C

Chauvinis 83, 85
Cikeusik iii, 6, 9, 35, 36, 37, 40, 47, 56, 60, 61, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 138

D

Demokrasi 60, 133, 138
Departemen Agama. 3, 5, 50
Diskriminasi iii, v, 1, 7, 9, 32, 35, 36, 39, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 62, 138, 144
Diskriminatif iii, 6, 7, 35, 39, 40, 44, 51, 62, 141, 142
DKI Jakarta ii, iv, 4, 5, 8, 14, 15, 17,41,42, 43, 44, 47, 50, 54, 59, 66, 67, 104, 109, 126, 128, 143, 144
Dr. Saed Ahmad Khan 20

E

Ekstremis 22

F

fatwa 1, 2, 12, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 56, 58, 123, 130
Fatwa sesat 27
Fazl Ilahi 15
Filsafat 15
Forum Ulama Umat Indonesia 2
FPI 2, 5, 6, 32, 37, 46, 47, 54
Front Pembela Islam 2, 37
FUI 37, 49, 54
FUIB 37

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 191 11/1/2011 5:38:13 AM

G

Gotong-royong 75, 76, 77

H

Habib Riziq Shihab 47
Hadhrat Khalifatul Masih II 16
Haji Barlas 14
Haji Mahmud 17
Haji Rasul 19, 24, 25
hate speech 93, 94, 95
H. Kasno Sudaryanto 39
HTI 32, 46

I

ICCPR 44
ideologi 43, 68, 69, 70, 71, 72, 99, 100
ikrar 42
Imam Mahdi 14, 22
Intelijen 99
Intervensi 43, 89, 92, 96, 121, 122, 134
Intimidasi 41, 48
Intoleran iii, 63
    Intoleransi iii, 1, 98, 101, 142
Isa Al-Masih 13, 15, 22

J

Jakarta
Jawa Barat 6, 8, 28, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 66, 67, 109, 126, 128
    Bandung 41, 42, 43, 44, 48, 49, 144
    Garut 41, 43, 47, 48, 144
    Tasikmalaya 41, 43, 47, 49
Jawa Timur 8, 28, 37, 39, 44, 53, 55, 66, 67, 109, 126, 128, 143
Jerry C. Gunadi 39
Jusuf Kalla 71

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 192 11/1/2011 5:38:13 AM

K

Kalimantan Timur 8, 66, 67, 104, 109, 127, 128
Kejaksaan Agung 1, 2
kekerasan iii, 1, 2, 6, 7, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 95, 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 130, 131, 134, 135, 138, 141
KH. Abdullan Faqih 54
Khalifatul Masih I 19, 20
Khalifatul Masih II 16, 17, 20
Khidmat Khalq 19
Kodam III Siliwangi 42
Konservatif 27, 28, 104
Konservatisme 27, 104
Kontroversi 42
Kuningan 49, 50, 51, 59, 60, 61, 144

L

Legitimasi 59, 67
liberal 104
LPI 6
LPPI 2, 5

M

Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia 18
Malaysia 24, 29
Manis Lor 50, 59, 60, 143
Maroko 21
Masjid 4, 39, 49, 53, 54, 55, 56
Maulana Abdul Wahid 17
Maulana Hakim Nurudin. 20
Maulana Muhammad 20
Maulana Rahmat Ali Haot 17
Maulana Sadrudin 20
Maulana Sayyid Syah Muhammad 18
Maulavi Fazl Ahmad 15
Maulavi Gul Ali Shah 15
Megawati Sukarnoputri 70
Minhadjurrahman Djojosoegito 19, 24, 25, 26

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 193 11/1/2011 5:38:13 AM

Minoritas iii, 23, 55, 90, 110, 111
Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad 16
Mirza Ghulam Ahmad v, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23
Moderat 27, 83, 120, 141
Mohammad Hatta 82
Mohammad Yamin 82
MTA 18, 29
Muhammad Abid Al-Jabiri 21, 143
Muhammadiyah 2, 7, 19, 24, 25, 27, 37, 50, 52
Muhammad SAW 3, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 33, 34, 45, 143
MUI v, 1, 2, 5, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 32, 37, 39, 45, 48, 50, 56, 58, 59, 123, 130

N

NII 78, 99, 100, 101
NKRI 4, 9, 32, 63, 78, 79, 81, 82, 85, 99, 100, 138
Non derogable rights 85
Non-restriksi 108, 109, 111, 112, 113, 118, 122, 125, 127, 128
NU 7, 27, 37, 43, 52
Nurcholish Madjid 30
Nusa Tenggara Barat 8, 46, 66, 67, 109, 114, 126, 128

O

Operasi Sajadah 6, 42
Orde Baru 1, 32, 52, 63
Orde Lama 52
Otonomi Daerah 61, 78, 79, 138

P

Padang 17, 46, 56, 57
Pakem 49, 51
Pakistan 23, 25, 52
Pancasila 6, 9, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 132, 133
Pembakaran 41, 48, 57
Pembatasan 6, 7, 8, 38, 66, 67, 92, 124, 130, 131, 135, 139, 140,143
Penyeragaman 133
Persia 14, 21

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 194 11/1/2011 5:38:13 AM

perusakan 41, 57, 59
Pesantren Sumatera Tawalib 16, 25
PKI 42
Plural 132
    pluralitas 96, 97, 101, 130, 132, 133, 134
    pluralisme 27, 132, 134, 137, 142
Polytheistic 23
Pragmatisme 139
primordial 132, 133
Prof. Dr.Abdul Karim Saeed 20
Prof. Dr. Asghar Hamid 20

R

Radikal 6, 7, 59, 60, 98, 99
Reformasi 28, 57, 60, 70, 80, 133
Restriksi 67, 92, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 140, 141
    non restriksi 67, 109, 112, 113, 114, 119, 122, 126, 129
R. Muhyiddin 17
Rule of law 115

S

Samarqand 14, 21
Sayid Rahman Al Zailani 52
Sjafruddin Prawiranegara 82
SKB 6, 44, 45, 47, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 123, 130, 135, 143
S.M. Kartosoewirjo 82
Soeharto 1, 25, 26, 60, 72
Soekarno 18, 82
Solo 19, 25
Suku Barlas 14
Sulawesi Selatan 8, 44, 45, 66, 67, 128
Sumatera Barat 8, 17, 45, 46, 51, 56, 57, 66, 67, 109, 126, 128, 143, 144
Sumatera Selatan 8, 67, 109, 114, 127, 128
Surabaya 37, 38, 39, 53, 54
Susilo Bambang Yudhoyono 1, 70

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 195 11/1/2011 5:38:13 AM

T

Tadzkirah 4
Tan Malaka 82
Tasawuf 21, 22
Teror 29, 48
    Teroris 29
    Terorisme 78, 134
Timor Timur 18
Toleransi 26, 29, 36, 55, 75, 96, 98, 101, 137, 142
    Toleran 26, 53, 104, 130, 134

U

Ubai bin Salul 34
Utsman bin Affan 21
UUD Negara RI 1945 9, 30, 63, 72, 73, 74, 86, 87, 88

X

Xenophobia 85

Y

Yogyakarta 8, 19, 46, 52, 53, 66, 67, 126, 132, 143, 144
    DIY 46, 52, 109, 128

ahmadiyah dan keindonesiaan kita.indd 196 11/1/2011 5:38:13 AM